



**BADAN PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO**



# Rencana Strategis

2010 - 2014



## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tahun 2010-2014 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 dan sebagai gambaran dari rencana implementasi/pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah dalam penanggulangan lumpur di Sidoarjo yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Rencana Strategis ini merupakan Rencana Strategis kedua dari Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana semburan dan luapan lumpur dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Sebagai Rencana Strategis kedua, penyusunannya juga memperhatikan permasalahan, hambatan, dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran Rencana Strategis pertama (2007-2011).

Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2010-2014. Indikator pencapaian kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran, program dan kegiatan akan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada setiap akhir tahun anggaran.

Demikian Rencana Strategis ini disusun dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan semburan dan luapan lumpur dengan segala dampak yang ditimbulkannya.

**Sekretaris Badan Pelaksana  
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo**

**ADI SARWOKO**

**KEPALA BADAN PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO**

**SAMBUTAN**

Dengan diterbitkannya Rencana Strategis Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tahun 2010-2014 yang merupakan penjabaran dari kebijakan dan program Pemerintah dalam upaya penanggulangan semburan dan luapan lumpur, diharapkan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, semua unit organisasi sampai dengan tingkat Eselon II di lingkungan Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan sebagai dasar penilaian pencapaian kinerja dan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Meskipun Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo bukan merupakan lembaga pemerintah yang mendapatkan eseloniring secara struktural, namun sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang pembiayaannya menggunakan dana APBN, sudah seharusnya Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo menyusun Rencana Strategis sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

Penugasan Pemerintah kepada BAPEL-BPLS dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, adalah sejalan dengan tanggung jawab Negara yang dilaksanakan Pemerintah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun semburan dan luapan lumpur Sidoarjo belum ditetapkan sebagai suatu bencana, namun dengan memperhatikan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu "Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis", maka penanganan yang dilakukan oleh BAPEL-BPLS dalam penanggulangan semburan dan

luapan lumpur sudah didasarkan pada asas dan prinsip-prinsip penanggulangan bencana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Saya berharap Rencana Strategis ini menjadi acuan bagi semua unit organisasi di lingkungan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta bagi para pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan semburan dan luapan lumpur Sidoarjo. Visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran, serta kebijakan dan program yang telah ditetapkan agar dipahami secara seksama dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

**Kepala,**

**SUNARSO**

**BADAN PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO  
Nomor: 14/KPTS/P/2010**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
BADAN PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO  
TAHUN 2010 – 2014**

**KEPALA BADAN PELAKSANA**

- Menimbang: a. bahwa guna memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan upaya penanggulangan semburan dan luapan lumpur Sidoarjo dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana tentang Rencana Strategis Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2010-2014;
- Mengingat: 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, serta terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 / M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO TAHUN 2010 – 2014.**

**KESATU:** Rencana Strategis Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang selanjutnya disebut RENSTRA BAPEL – BPLS adalah dokumen perencanaan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014;

**KEDUA:** RENSTRA BAPEL – BPLS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KETIGA:** Setiap Unit Kerja di lingkungan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo diwajibkan menuangkan RENSTRA BAPEL – BPLS ke dalam program dan rencana kegiatan masing-masing Unit Kerja di lingkungan Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 29 Januari 2010  
Kepala,

SUNARSO

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>SAMBUATAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KEPUTUSAN KEPALA BADAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1.1.1. Kondisi Awal Bencana Lumpur Panas di Sidoarjo ....	1
1.1.2. Kondisi setelah 3 tahun semburan lumpur panas ...	4
1.1.3. Upaya yang Dilakukan.....	6
<b>1.2. Identifikasi Kondisi Umum.....</b>	<b>10</b>
1.2.1. Hasil Evaluasi Terhadap Pencapaian Sasaran Dalam Renstra BAPEL-BPLS Tahun 2007-2011.....	10
1.2.2. Aspirasi Masyarakat.....	49
<b>1.3. Identifikasi Permasalahan dan Potensi .....</b>	<b>50</b>
1.3.1. Permasalahan .....	50
1.3.2. Analisis Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) .....	89
1.3.3. Analisis Lingkungan Eksternal (peluang dan tantangan).....	92
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>97</b>
<b>2.1. Visi .....</b>	<b>97</b>
<b>2.2. Misi .....</b>	<b>99</b>
<b>2.3. Tujuan .....</b>	<b>99</b>
<b>2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis         (impact).....</b>	<b>100</b>
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	<b>101</b>
<b>3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....</b>	<b>101</b>
<b>3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bapel-BPLS .....</b>	<b>102</b>
3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo .....	102
3.2.2. Kelembagaan/organisasi Bapel-BPLS .....	104
3.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM).....	108
3.2.4. Ketatalaksanaan .....	109
3.2.5. Program, Indikator Kinerja Program (outcome), dan Kegiatan Teknis.....	109
3.2.6. Peran PT Lapindo Brantas .....	121
3.2.7. Peran pemerintah daerah dan masyarakat.....	123
3.2.8. Strategi Pendanaan .....	124
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>125</b>

## LAMPIRAN

- Lampiran 1.1. Matrik Kinerja BAPEL-BPLS (Tujuan dan Sasaran)
- Lampiran 1.2. Matrik Kinerja Program dan Kegiatan BAPEL-BPLS
  - Lampiran 1.2. (1) – Bidang Operasi
  - Lampiran 1.2. (2) – Bidang Sosial
  - Lampiran 1.2. (3) – Bidang Infrastruktur
  - Lampiran 1.2. (4) – Bidang Sekretariat/Kelembagaan
- Lampiran 2.1. Matrik Target Pembangunan
- Lampiran 2.2. Matrik Kebutuhan Pendanaan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

##### 1.1.1. Kondisi Awal Bencana Lumpur Panas di Sidoarjo

Semburan lumpur panas di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, berjarak sekitar 200 meter dari sumur pengeboran gas Banjar Panji 1 di Desa Renokenongo yang terjadi sejak tanggal 29 Mei 2006 telah berdampak sedemikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitarnya. Volume lumpur yang keluar dari perut bumi terus meningkat, dari sekitar 5.000 m<sup>3</sup>/hari pada bulan Juni 2006 menjadi 50.000 m<sup>3</sup>/hari menjelang akhir tahun 2006, dan terus meningkat menjadi 100.000 – 120.000 m<sup>3</sup>/hari pada tahun 2007, dan belum ada tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat.



Pusat semburan, Juni 2006

Semburan lumpur panas di Sidoarjo merupakan fenomena geologi yang dikenal sebagai gunung lumpur (*mud volcano*), yakni keluarnya lumpur yang berasal dari lapisan bawah permukaan yang berasal dari formasi Kalibeng dengan kedalaman sekitar antara 1.000 s/d 3.000 meter. Lumpur yang keluar di permukaan adalah campuran fluida, padatan yang terdiri air asin, lumpur dan gas, serta uap dengan temperatur mencapai 100°C. Volume semburan diperkirakan 100.000 - 120.000 m<sup>3</sup> per hari. Lumpur panas ini keluar sampai ke permukaan melalui zona lemah, yang dapat berupa patahan atau rekahan yang timbul akibat pembentukan patahan baru atau reaktifasi patahan lama.

*Mud volcano* banyak muncul di sepanjang zona depresi/cekungan Kendeng. Pada zaman Pliosen, aktivitas deretan gunung berapi selatan Jawa bagian timur

mengisi cekungan Kendeng/selat Madura Purba yang berevolusi dari lingkungan laut dalam menjadi laut dangkal, dan seterusnya menjadi daratan. Posisi geologi yang berdekatan deretan gunung berapi/busur magma inilah yang menyebabkan daerah semburan lumpur berpotensi terkoneksi dengan sistem geotermal kompleks gunung api Penanggungan. Proses sedimentasi yang cepat dengan material kaya organik dan letaknya sangat dalam pada lingkungan yang sesuai, menyebabkan wilayah ini kaya akan kandungan gas dan minyak. Sedangkan sedimen yang tidak terkompaksi sempurna, akibat proses tektonik yang terus berlangsung maupun akibat pembebanan lapisan yang ada di atasnya, banyak memunculkan bentukan *mud diapir* (gunung lumpur). Permeabilitas batuan yang rendah menjadi penghalang fluida formasi yang tersimpan dalam pori batuan mencapai keseimbangan hidrostatik sehingga terjadi '*over pressure*', menghasilkan tekanan fluida yang akan ikut menyangga tekanan pembebanan. Bila kondisi bawah permukaan terganggu, lumpur beserta fluida dan gas berpotensi ke luar ke permukaan melalui rekahan maupun sesar dan membentuk gunung lumpur.

Sebaran *mud volcano* di Jawa Timur dapat ditemukan di Kalang Anyar-Sedati/Sidoarjo, Gunung Anyar-Rungkut/Surabaya, Pulungan-Sedati/Sidoarjo dan Bangkalan (Madura) yang berada satu garis lurus berarah Timur Laut-Barat Daya atau berimpit dengan sesar Watukosek yang berada pada stratigrafi Mandala Kendeng. Adanya kelurusan sebaran gunung lumpur menunjukkan kontrol *setting* tektonik berupa kelurusan struktur sesar permukaan dan bawah permukaan, sebagai hasil

reaktifasi sesar pada zona cekungan Kendeng.

Hasil penggabungan dan analisis data geologi permukaan dan bawah permukaan diinterpretasikan bahwa di area semburan terdapat 2 (dua) sesar, yaitu sesar Watukosek yang berarah Timur Laut - Barat Daya dan sesar Siring yang berarah Barat Laut - Tenggara, yang mengalami reaktifasi. Reaktifasi sesar Watukosek yang merupakan sesar turun geser mengiri dan sesar Siring sebagai sesar turun geser manganan, menimbulkan deformasi geologi di sekitar wilayah semburan.



Sesar Watukosek dan Sesar Siring

Reaktifasi sesar telah menyebabkan pergerakan segmen struktur geologi pada wilayah semburan dan sekitarnya, sehingga ada blok batuan yang mengalami perubahan posisi baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan blok batuan mengalami retak menembus sampai ke permukaan.

Bukti terjadinya peristiwa pergeseran, antara lain: jarak antar pilar jembatan tol bertambah lebar pada jalan tol segmen Porong-Gempol yang menyilang jalan arteri Porong sehingga terpaksa harus dibongkar; rel kereta api yang berada di dekatnya mengalami pembengkokan; terbelahnya bangunan masjid sampai dengan halaman, termasuk rumah di desa Renokenongo, serta kerusakan pada dinding dan lantai rumah-rumah warga di desa Siring Barat.

Peristiwa keluarnya material bawah permukaan secara besar-besaran dan dalam waktu lama, menyebabkan kondisi batuan mengalami perubahan sifat, sehingga daya dukung batuan berkurang dan permukaan mengalami penurunan (*amblesan/subsidence*). Amblesan ini memiliki tingkat penurunan yang bervariasi tergantung radius terhadap semburan dan struktur geologi yang bekerja. Di pusat semburan amblesan mencapai 20 cm per hari, namun pernah terjadi sampai 300 cm. Di samping itu, rumah-rumah dengan radius 1.000 meter mengalami proses ambles yang mengarah ke pusat semburan, dan juga tanggul pengaman lumpur yang dibangun di Peta Area Terdampak.

Adanya pergerakan tanah, baik karena penurunan maupun pergeseran yang menembus lensa/ kantong gas di bawah permukaan tanah, mendorong tubuh air yang ada di atasnya dan keluar sebagai *bubble* (bualan). Di sisi barat dan selatan dari pusat semburan (desa Siring Barat, Jatirejo, dan Mindi) muncul banyak *bubble* yang umumnya disertai air dengan tekanan rendah, namun ada juga yang mencapai 15 (lima belas) meter. Kandungan gas yang ke luar dominan berupa gas *methane* yang memiliki sifat mudah terbakar, di samping itu juga gas aromatik yang berbahaya terhadap kesehatan. Kondisi ini menyebabkan wilayah permukiman tersebut dinilai sebagai tidak layak huni dan warga menuntut untuk dimasukkan dalam Peta Area Terdampak.

Fenomena semburan lumpur panas di Sidoarjo tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk bencana baru, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Ada dua faktor yang membedakan dengan bencana yang sudah pernah terjadi di dunia, yaitu (1) sumber bencana yang tidak jelas kapan akan berhenti, dan (2) pandangan bahwa semburan lumpur tersebut termasuk kategori bencana alam atau non alam. Masyarakat dan media pada umumnya beranggapan bahwa hal itu merupakan bentuk bencana karena gagal teknologi, maka PT Lapindo Brantas dianggap sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas semua kerugian dampak bencana. Meskipun Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa PT Lapindo Brantas tidak

bersalah dan Polri telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP), tetapi hingga kini belum ada penetapan fenomena tersebut sebagai bencana, maka perbedaan cara pandang tetap berkembang.

Di sisi lain ada yang berpandangan bahwa hal tersebut adalah bukan bencana gagal teknologi. Polemik ini semakin membuat warga terdampak panik, marah, dan jengkel. Semua bentuk tekanan psikologis yang dialami warga terdampak ini ditumpahkan ke PT Lapindo Brantas dan pemerintah yang dianggap lambat dalam penanganannya. Kondisi kegoncangan psikologis ini semakin memuncak dengan adanya ledakan pipa gas milik PT Pertamina yang melintas di atas wilayah terdampak pada tanggal 22 November 2006 yang mengubah kondisi kebencanaan menjadi lebih parah.

Dengan kejadian ini semburan lumpur meluas sampai akhirnya mengenai 12 desa/kelurahan, yaitu Siring, Jatirejo, Mindi, Renokenongo, Kedungbendo, Gempolsari, Kedungcangkring, Pejarakan, Besuki, Gempolsari, Glagaharum, Ketapang, dan Kalitengah. Dari 12 desa tersebut dua diantaranya yang seluruh wilayahnya tergenangi lumpur yaitu Desa Renokenongo dan Kedungbendo. Sebanyak lebih kurang 14.000 KK/40.000 jiwa di 12 desa/kelurahan tersebut menjadi korban luapan lumpur.

Di tengah-tengah ketidakpastian itu langkah-langkah cepat untuk penyelamatan warga harus lebih diutamakan daripada menunggu polemik yang berkepanjangan. Di sisi lain, bersamaan dengan hal ini langkah-langkah yang lebih sistematis disiapkan, karena langkah-langkah yang telah dibakukan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat begitu saja diterapkan, kebijakan yang sesuai dengan kondisi kebencanaan di atas perlu dikembangkan. Langkah darurat yang dilaksanakan antara lain adalah mengevakuasi warga ke beberapa tempat, yaitu balai desa, pondok pesantren dan Pasar Porong Baru yang baru saja selesai dibangun namun belum digunakan. Selain itu ada pula warga yang atas inisiatif sendiri pindah ke rumah saudaranya atau tempat aman di desa lain, serta ada pula yang pindah ke rumah miliknya yang lain yang tidak terdampak.

### **1.1.2. Kondisi setelah 3 tahun semburan lumpur panas**

Setelah 3 tahun semburan lumpur panas berlangsung, menurut studi model yang disusun oleh Bambang P. Istadi (Energi Mega Persada), Gatot H. Pramono (Bakosurtanal), Prihadi Sumintadireja (ITB) dan Syamsu Alam (Pertamina) pada awal tahun 2009, bahwa bila volume semburan berkisar 100.000 m<sup>3</sup>/hari, dan berdasarkan cadangan formasi batuan yang potensial menjadi sumber lumpur, maka diperkirakan semburan lumpur akan berlangsung antara 23 sampai 35 tahun. Pada saat ini, sesuai

dengan kondisi bawah permukaan, walaupun dilakukan upaya dengan memanfaatkan teknologi untuk menutup semburan, disimpulkan bahwa semburan tidak mungkin dihentikan, karena selain kecil tingkat keberhasilannya juga ada potensi timbulnya semburan baru.

Reaktifasi sesar Watukosek masih akan terus berlanjut dan menimbulkan deformasi geologi di permukaan yang berpengaruh pada infrastruktur dan rumah-rumah, termasuk tanggul penahan lumpur. Kerusakan pada tanggul akan dapat mengakibatkan lumpur di kolam melimpas ke luar menggenangi infrastruktur dan permukiman yang berada di sekitarnya. Diperlukan pemantauan dan evaluasi atas setiap perkembangan wilayah pengaruh deformasi geologi untuk mengambil langkah-langkah antisipasi penanggulangannya.

Pasca kehancuran tanggul cincin, dan setelah dipastikan deformasi di pusat semburan sangat intensif, maka diputuskan tanggul cincin tidak mungkin dibangun kembali. Dalam kondisi demikian, seluruh luapan lumpur akan mengalir ke utara memenuhi kolam Perumtas, Siring, Glagaharum dan Renokenongo, sehingga seluruh tanggul penahan luapan lumpur statusnya berubah menjadi tanggul utama.

Sejak terjadi krisis finansial global, kemampuan likuiditas PT Lapindo Brantas menjadi sangat terbatas, sehingga kinerja pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong



*Sejak tanggul cincin tidak dapat dipertahankan lumpur mengalir ke segala arah termasuk ke arah barat Kel. Siring*

mengalami penurunan tajam. Karena semburan tetap akan terus berlangsung, tanggul tidak mungkin terus ditinggikan. Agar ancaman luapan dapat dikendalikan, maka upaya mengalirkan lumpur ke Kali Porong dengan **prinsip pola maksimal pada musim penghujan dan pola minimal pada musim kemarau harus dilakukan**. Dalam hal luapan lumpur terus bertambah, dan pengalirannya ke Kali Porong menghadapi kendala, maka penanganannya harus ditingkatkan dengan melakukan mitigasi.

Mitigasi yang telah dilakukan Bapel – BPLS dengan mengerahkan peralatan pompa lumpur dan kapal keruk milik Departemen Pekerjaan Umum adalah untuk mengatasi keadaan sewaktu-waktu luapan lumpur dalam status waspada. Namun dengan makin berkurangnya jumlah pompa PT Lapindo Brantas dan juga dengan semakin seringnya pompa-pompa tidak beroperasi, maka kondisi di kolam lumpur sering mengalami status bahaya. Jumlah peralatan mitigasi perlu ditambah jumlahnya, bila perlu Bapel – BPLS melakukan pengadaan peralatan baru yang sesuai untuk penanganan lumpur panas.

Apabila pengaliran lumpur ke Kali Porong tidak dapat dilakukan dengan prinsip pola maksimal pada musim penghujan dan pola minimal pada musim kemarau, maka upaya pencegahan ancaman keselamatan masyarakat, baik pada wilayah di luar Peta Area Terdampak (PAT) maupun pada Kali Porong tidak akan dapat diwujudkan. Prinsip pola operasi tersebut diharapkan baru akan terwujud paling cepat pada tahun 2011.

Dengan pengaliran lumpur ke Kali Porong yang belum mengikuti pola tersebut, skenario terburuk yang mungkin terjadi adalah deformasi geologi yang ada akan terus berlanjut, dengan kemungkinan area terpengaruh semakin meluas dengan laju amblesan yang bertambah besar. Sepanjang laju amblesan masih konstan, masih mungkin dilakukan perbaikan pada tanggul penahan luapan lumpur. Namun yang ditakutkan adalah bila terjadi amblesan besar yang terjadi serentak dan tiba-tiba, maka lumpur akan tumpah menggenangi jalan kereta api, jalan raya Porong dan permukiman di sekitarnya. Dalam kondisi yang tidak diharapkan seperti ini, terjadinya kerugian akan telah dapat dipastikan, bahkan tidak mustahil akan jatuh korban jiwa.

### **1.1.3. Upaya yang Dilakukan**

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada awal terjadinya semburan lumpur Pemerintah memandang perlu untuk mengambil langkah penanggulangan dengan membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (TimNas PSLS) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 8 September 2006 dengan masa tugas selama 6 (enam) bulan, yang

kemudian masa tugasnya diperpanjang 1 (satu) bulan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007.

TimNas PSLs mempunyai tugas untuk mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo yang meliputi penutupan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur dan penanganan masalah sosial. Pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas TimNas PSLs tersebut dibebankan pada anggaran PT Lapindo Brantas. Berbagai upaya untuk menghentikan dan mengendalikan semburan lumpur tersebut telah dilakukan TimNas PSLs bersama PT Lapindo Brantas, namun belum membuahkan hasil yang berarti sampai dengan akhir masa tugas TimNas. Akhirnya tugas TimNas PSLs dalam penghentian lumpur Sidoarjo berakhir pada tanggal 8 April 2007 setelah Pemerintah menetapkan dan membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007, langkah-langkah pengendalian penanganan semburan lumpur dan luapan lumpur, penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, dan infrastruktur yang terdampak semburan dan luapan lumpur menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dengan tetap memberi tanggung jawab kepada PT Lapindo Brantas dalam penanganan semburan dan luapan lumpur serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan di Area Peta Terdampak.

Serah terima penanganan pekerjaan dan kegiatan penanggulangan semburan lumpur dan luapan lumpur dari TimNas PSLs ke BPLS secara administratif telah dilaksanakan pada 11 April 2007 di Jakarta. Sesuai kesepakatan dengan TimNas PSLs dan PT Lapindo Brantas pada tanggal 12 April 2007, personil TimNas PSLs masih akan bekerja dan dengan pembiayaan dari PT Lapindo Brantas sampai dengan tanggal 30 April 2007, sehingga BPLS secara efektif baru melakukan penanganan semburan dan luapan lumpur mulai tanggal 1 Mei 2007.

Sampai dengan pertengahan tahun 2008, luapan lumpur di Sidoarjo telah menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan bagi masyarakat di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 yang berlokasi di Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengatasi masalah luapan lumpur di 3 (tiga) desa tersebut, Pemerintah memandang perlu melakukan langkah-langkah penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 dengan menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008, dan memasukkan 3 desa tersebut (Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring) dalam Peta Area Terdampak baru dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam rangka untuk mengefektifkan upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan, dan setelah melakukan evaluasi yang komprehensif atas kondisi di lapangan, pada bulan September 2009 Pemerintah merasa perlu menetapkan **perubahan kedua** atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009. Perubahan mendasarkan dari Peraturan Presiden tersebut adalah dengan diubahnya Pasal 9 yang mengatur tugas Deputy Bidang Operasi, diubahnya Pasal 15 yang antara lain mengubah tentang tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam pembiayaan penanggulangan semburan lumpur dan penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong, serta mengubah Pasal 15 B dengan memasukkan beberapa Rukun Tetangga (RT) di Desa Siring Barat, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi ke dalam Peta Area Terdampak baru, yang keseluruhannya berjumlah 9 (sembilan) RT.

Dengan bertambahnya desa dan RT yang masuk dalam Peta Area Terdampak, dan dengan bertambah kompleksnya penanganan pekerjaan di lapangan, menuntut adanya perencanaan yang komprehensif dan tata kerja yang jelas sehingga tugas yang diemban dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya kinerja BAPEL-BPLS yang efektif dan efisien.

Untuk dapat melakukan penilaian atas pencapaian kinerja suatu lembaga pemerintah, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sebesarnya Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sebagai bentuk/perwujudan dari pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah yang mengelola APBN secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada *stakeholders*, yang dituangkan melalui laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP). Berdasarkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah (Sistem AKIP), penyusunan LAKIP dilakukan melalui proses **penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja**.

Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2010-2014, diwajibkan kepada semua Kementerian/ Lembaga,

termasuk di dalamnya adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), untuk menyusun Renstra K/L 2010-2014 berdasarkan Pedoman tersebut.

Sejalan dengan semua itu, Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BAPEL-BPLS) yang merupakan badan baru dengan status LPND di lingkungan Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, berkewajiban pula untuk melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden tersebut di atas.

Untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, serta untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi dari semua unit kerja yang ada, BAPEL-BPLS perlu menyusun rencana strategis yang memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan teknis, serta ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dalam pelaksanaannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan periode 2010 - 2014. Rencana kinerja kegiatan tahunan selanjutnya akan ditetapkan dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan program dan rencana anggaran.

BAPEL-BPLS pertama kali menyusun Renstra pada tahun 2007-2008 untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2007-2011. Namun dengan berakhirnya masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009 pada akhir tahun 2009, dan sejalan dengan periode 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan yang baru, maka BAPEL-BPLS dituntut menyusun Renstra untuk masa 5 (lima) tahun mendatang dengan periode 2010-2014, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut di atas.

Mengingat Renstra 2007-2011 baru berjalan 3 (tiga) tahun, maka dengan memperhatikan kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam RPJMN, permasalahan dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi BAPEL-BPLS, Renstra BAPEL-BPLS 2010-2014 tetap akan melanjutkan target-target yang belum dilaksanakan dan/atau belum dapat dicapai pada Renstra 2007-2011, dengan tetap memperhatikan prioritas dan fokus prioritas dari sasaran Pemerintah pada tahun 2010-2014.

## **1.2. Identifikasi Kondisi Umum**

### **1.2.1. Hasil Evaluasi Terhadap Pencapaian Sasaran Dalam Renstra BAPEL-BPLS Tahun 2007-2011.**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa BAPEL-BPLS pertama kali menyusun Renstra pada tahun 2007-2008 untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2007-2011, yang disesuaikan dengan awal beroperasinya BAPEL-BPLS dan ketentuan yang ada pada waktu itu. Namun dengan berakhirnya masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009 pada akhir tahun 2009, dan sejalan dengan periode 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan yang baru, serta pedoman penyusunan Renstra yang ditetapkan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BAPEL-BPLS dituntut menyusun Renstra untuk masa 5 (lima) tahun mendatang dengan periode 2010-2014.

Meskipun Renstra 2007-2011 baru terlaksana 3 (tiga) tahun, namun telah banyak kinerja sasaran, program, dan kegiatan yang dapat dicapai oleh BAPEL-BPLS. Untuk menggambarkan pencapaian kinerja tersebut, berikut akan diuraikan hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang di BAPEL-BPLS.

#### **Bidang Operasi**

Sebagaimana diketahui bahwa tugas penanggulangan semburan dan luapan lumpur beserta dampaknya tidak hanya menjadi tugas Bapel-BPLS, namun juga menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas. Pembagian tugas telah jelas diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007, yaitu Bapel-BPLS melakukan upaya penanggulangan yang terkait dengan masalah infrastruktur dan masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan biaya dari APBN, serta melakukan pengendalian dan pengawasan atas upaya penanggulangan yang dilakukan PT Lapindo Brantas, sedang PT Lapindo Brantas melakukan upaya penanggulangan semburan dan luapan lumpur di dalam peta area terdampak dengan biaya ditanggung sendiri oleh PT Lapindo Brantas.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam Renstra Bapel-BPLS 2007-2011 terdapat 2 sasaran yang terkait dengan bidang operasi yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas, dan dalam pengendalian Bapel-BPLS, yaitu: **1.** Terkendalinya semburan lumpur dengan metode yang paling aman, layak secara teknis dan finansial; **2.** Berkurangnya potensi bahaya dan meluasnya dampak luapan lumpur dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong secara aman dan efektif.

Sedang sasaran yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bapel-BPLS adalah: **3.** Terlaksananya kegiatan pemantauan deformasi geologi yang berupa gerakan tanah (horizontal/vertikal/lateral) di sekitar semburan (4 Paket) dan kondisi *subsurface*, serta penanganan dampak deformasi di permukaan bumi berupa semburan air/gas yang mengancam keselamatan warga, di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 (60 titik); **4.** Tersedianya data dan informasi (geologi, semburan dan luapan lumpur, kualitas air dan gas) sebagai dasar penanganan area terdampak, rencana pemanfaatan gas dan lumpur, serta penentuan daerah rawan terdampak (10 paket).

Meskipun sasaran nomor 1 dan 2 tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT Lapindo Brantas namun karena dalam pengendalian dan pengawasan Bapel-BPLS, serta karena pencapaian kinerja PT Lapindo Brantas dalam mencapai 2 sasaran tersebut akan berpengaruh pada capaian kinerja Bapel-BPLS dalam penanganan masalah infrastruktur dan sosial kemasyarakatan di luas peta area terdampak, maka pada analisis capaian kinerja ini termasuk juga analisis capaian kinerja dari sasaran nomor 1 dan 2 tersebut di atas meskipun disajikan secara umum.

#### **Pencapaian sasaran oleh PT Lapindo Brantas dengan pengendalian dan pengawasan dari BAPEL-BPLS.**

Sampai dengan pertengahan tahun 2009, gambaran pencapaian kinerja sasaran yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas adalah yang terkait dengan sasaran: **a.** Terkendalinya semburan lumpur dengan metode yang paling aman, layak secara teknis dan finansial, dan **b.** Berkurangnya potensi bahaya dan meluasnya dampak luapan lumpur dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong secara aman dan efektif.

- a. Pengendalian semburan lumpur dengan metode paling aman, layak secara teknis dan finansial dengan mengarahkan pengaliran lumpur ke arah selatan (tepatnya arah barat - selatan) melalui perkuatan dan peninggian tanggul cincin dengan elevasi minimum +15.00 DPL **ternyata sulit dicapai dan dipertahankan** akibat semakin besarnya *magnitude subsidence* akibat deformasi geologi, meskipun berbagai upaya untuk mempertahankan dan meninggikan tanggul cincin sudah diupayakan oleh PT Lapindo Brantas.

Dalam tahun 2008 hampir setiap bulan terjadi tanggul jebol baik sebagai akibat dari pergeseran tanah (*subsidence*) maupun sebagai akibat dari luber (*overtopping*), sehingga aliran lumpur tidak dapat mengarah ke selatan tapi mengarah ke arah lain dan hal ini menjadi sangat membahayakan daerah lain apabila tidak segera diatasi.



*Tanggul cincin di pusat semburan dengan el. +15.00 sulit dipertahankan karena adanya subsidence 20 – 30 cm per hari*

Pada pergeseran tanah (*subsidence*) di awal tahun 2008, lokasi terendah bergeser dari sebelah barat-selatan (P.35) ke titik P.41 (sebelah timur-selatan), sehingga hampir semua pompa-pompa dipindahkan ke titik P.41 karena lumpur tidak bisa dialirkan ke titik-titik pompa berada (P.35), kemudian dipasang pipa-pipa

besi diameter 32 *inch* (1 *line*) dan 20 *inch* (6 *line*) sepanjang  $\pm$  1000 meter yang memakan waktu serta biaya yang besar, terlebih karena seringnya dihentikan oleh warga Desa Besuki yang menuntut dimasukkannya desa mereka ke dalam peta area terdampak.

Karena jarak buang menjadi lebih jauh, maka total kapasitas pompa-pompa jauh menurun, terlebih karena 5 unit pompa Grundfos tidak bisa dipindah dan hanya difungsikan sebagai pompa drainase air hujan, sehingga pada awal Maret 2008 dimobilisasi 2 unit pompa booster dengan kapasitas total 0,8 m<sup>3</sup>/det di titik P.42. Pada akhirnya mulai terlihat bahwa rencana peninggian tanggul cincin menjadi +21.00 m DPL menjadi sulit terwujud karena meningkatnya '*rate of subsidence*'.

Pada bulan Juli 2008, *subsidence* meningkat di sekitar semburan, sehingga tanggul cincin menurun dengan cepat. Dengan beberapa kali kejadian penurunan tanah di pusat semburan tersebut, disimpulkan bahwa tanggul cincin tidak bisa dipertahankan lagi dan Bapel-BPLS harus melakukan perkuatan dan peninggian

tanggul luar, serta pompa-pompa yang ada harus dipindahkan ke dekat pusat semburan (titik P.43).

- b. Strategi yang ditempuh untuk mendukung pencapaian sasaran “Berkurangnya potensi bahaya dan meluasnya dampak luapan lumpur dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong secara aman dan efektif” tersebut adalah mengendalikan luapan lumpur panas dengan mengalirkannya ke Kali Porong secara aman dan efektif, dengan cara membuat: **1.** demarkasi lumpur panas pada pusat semburan dan kolam lumpur diamankan dengan struktur tanggul yang kokoh dengan elevasi tanggul +13.50 m DPL; **2.** sistem pembuangan lumpur menuju Kali Porong dengan ujung outlet di hilir jembatan Kali Porong; **3.** pengerukan endapan dan pengaliran lumpur maksimal pada musim hujan dan minimal pada musim kemarau dan sebagian besar ditampung pada kolam lumpur.

Kemampuan pengaliran lumpur panas dan pengerukan endapan lumpur sangat jauh dari yang diharapkan sehingga tidak tercipta ruang untuk penampungan lumpur pada musim kemarau dan bahkan elevasi lumpur bertambah tinggi. Tercatat selama dua tahun kemampuan pengaliran lumpur ke Kali Porong hanya sebesar 7.782.185 m<sup>3</sup> (padatan) dibandingkan semburan lumpur yang volumenya mencapai 26.800.000 m<sup>3</sup> (padatan), sedang tanggul cincin mengalami jebol dan *overtopping* rata-rata lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas dalam upaya pengaliran lumpur menuju ke Kali Porong, antara lain:

- Untuk mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke arah titik P. 35 di mana terpasang 4 unit pompa *Slurry* (total kapasitas 1 m<sup>3</sup>/det), PT Lapindo Brantas menggunakan 8 unit *Excavator Pontoon* dan 15 unit *Excavator Long Arm* sebagai pengayuh lumpur panas. Sedangkan untuk mendukung sistem pengaliran luapan lumpur, dioperasikan 4 unit pompa air sebagai pengencer dan pendingin pompa lumpur, dengan total kapasitas 1,2 m<sup>3</sup>/det, serta 4 unit pompa *drainase*.
- Meskipun sistem pengaliran mekanis beroperasi 18 jam sehari, namun luapan lumpur masih berkejaran dengan ketinggian tanggul, sehingga diperlukan ± 500 *dump truck* kapasitas 20 m<sup>3</sup> bermuatan tanah, dibantu dengan 3 buah *dozer* dan 3 buah *vibro compactor* untuk mempertinggi dan memperkuat tanggul utama dan tanggul cincin saja.

Dalam perkembangannya, semakin banyak pompa-pompa yang terpasang, serta didatangkan 1 unit kapal keruk, 1 unit pompa *Sumpstech* dan 6 unit pompa *sakuragawa*, dengan total kapasitas menjadi 8,5 m<sup>3</sup>/det. Namun sistem pengaliran lumpur masih tetap seperti semula, dan kelihatannya kemudian terbukti bahwa



Amblesan di tanggul P25, 22 Oktober 2007



Amblesan di Tanggul P78-79, 24 Juni 2009



Amblesan di Tanggul P77-78, 3 Agustus 2009

kapasitas operasional pompa yang ada jauh di bawah volume lumpur yang ke luar dari semburan, sehingga tanggul kolam utama terus dinaikkan sampai elevasi +09.50 m DPL. Perlu dicatat bahwa pompa-pompa air *Grundfos* tidak cocok karena tidak tahan panas dan cepat aus terkena gesekan lumpur panas, sehingga tidak dapat beroperasi optimal (durasi pendek) dan berumur pendek, sedangkan pompa-pompa *slurry* dengan penggerak motor listrik, juga tidak tahan terhadap panas dan beban yang tidak kontinyu.

Pada saat terjadi amblesan tanah (*subsidence*) di awal tahun 2008 semua pompa-pompa dipindahkan ke titik P.41 karena lumpur tidak bisa dialirkan ke titik-titik pompa yang berada di P.35. Selanjutnya dipasang pipa-pipa besi diameter 32 *inch* (1 *line*) dan 20 *inch* (6 *line*) sepanjang  $\pm$  1.000 meter yang memakan waktu serta biaya yang besar, terlebih karena seringnya pelaksanaan pekerjaan dihentikan oleh warga Desa Besuki yang menuntut dimasukkannya desa mereka ke dalam peta area terdampak.

Oleh karena 5 unit pompa Grundfos tidak bisa dipindah dan hanya difungsikan sebagai pompa drainase air hujan, maka pada awal Maret 2008 dimobilisasi 2 unit pompa *booster* dengan kapasitas total  $0,8\text{m}^3/\text{det}$  di titik P.42.

Pada bulan Juni 2008 dibuat rencana untuk mendatangkan tambahan 7 unit *dredger* yang akan mengeruk lumpur di kolam utama pada musim hujan dan mengalirkannya ke Kali Porong besar. Karena adanya krisis keuangan global, sejak bulan September 2008 kondisi keuangan PT Lapindo Brantas / PT Minarak Lapindo Jaya melemah, sehingga pengadaan *dredger* menjadi tertunda dan berakibat pada menurunnya kemampuan dalam penanganan semburan dan luapan lumpur.

### Pencapaian sasaran Deputi Bidang Operasi

Dalam Renstra 2007-2011 Deputi Bidang Operasi bertanggung jawab atas pencapaian sasaran untuk bidang yang menjadi tugas pokoknya yaitu: **a.** Terlaksananya kegiatan pemantauan deformasi geologi yang berupa gerakan tanah (horizontal/vertikal/lateral) di sekitar semburan (4 Paket) dan kondisi *subsurface*, serta penanganan dampak deformasi di permukaan bumi berupa semburan air/gas yang mengancam keselamatan warga, di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 (60 titik), dan **b.** Tersedianya data dan informasi (geologi, semburan dan luapan lumpur, kualitas air dan gas) sebagai dasar penanganan area terdampak, rencana pemanfaatan gas dan lumpur, serta penentuan daerah rawan terdampak (10 paket).

Indikator kinerja, target dan realisasi dari pencapaian sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
a. Terlaksananya kegiatan pemantauan deformasi geologi yang berupa gerakan tanah (horizontal/vertikal/lateral) di sekitar semburan (4 Paket) dan kondisi <i>subsurface</i> , serta penanganan dampak deformasi di permukaan bumi berupa semburan air/gas yang mengancam keselamatan warga, di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 (60 titik)	3 laporan 4 laporan	1 laporan -	34 0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran TTG dan BM di luar Peta Area Terdampak</li> </ul>	Per tahun	Per tahun	100

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi Subsurface</li> </ul>	3 Laporan	1 laporan	34
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi Surface</li> </ul>	4 Laporan	-	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring pengaliran lumpur ke kali Porong</li> </ul>	Per bulan	Per bulan	100
b. Tersedianya data dan informasi (geologi, semburan dan luapan lumpur, kualitas air dan gas) sebagai dasar penanganan area terdampak, rencana pemanfaatan gas dan lumpur, serta penentuan daerah rawan terdampak (10 paket).	4 laporan	3 laporan	75
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya data base untuk rencana penanganan area terdampak</li> </ul>	1 laporan	-	50
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia peta mikrozonasi di luar Peta Area Terdampak</li> </ul>	1 laporan	1 laporan	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan potensi dumber daya</li> </ul>	1 laporan	1 laporan	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data unsur kimia dan fisika air dan lumpur</li> </ul>	1 laporan	1 laporan	100

Realisasi capaian kinerja sasaran “Tersedia data dampak deformasi geologi dan tertanganinya dampak deformasi geologi” didukung oleh pelaksanaan kegiatan pemantauan berkala terhadap wilayah yang terindikasi berpotensi sebagai wilayah *geohazard*. Sampai saat ini BAPEL-BPLS sudah melakukan pemantauan-pemantauan terkait dengan potensi *geohazard* di area semburan dan area sekitarnya, antara lain:

**a. Pemantauan aktifitas semburan lumpur**

Semua kejadian telah direkam dalam bentuk catatan dan visualisasi, termasuk pemantauan gas yang menyertai semburan lumpur. Terjadinya semburan lumpur telah memicu munculnya beberapa fenomena geologi yang berupa *subsidence* (amblesan), *uplift* (pengangkatan), *crack* (retakan), dan *bubble*

(bualan), baik di dalam maupun di luar area semburan, termasuk di sekitar permukiman penduduk.

Data-data mengenai aktivitas semburan dan luapan lumpur panas, termasuk upaya penanganannya, sudah banyak yang dikumpulkan oleh Tim Bapel-BPLS sampai dengan akhir tahun 2009, mulai dari data pemboran sampai dengan data hasil pengukuran harian. Pembagian kelompok data yang telah terkumpul adalah data: pemboran, semburan, *subsidence*, tektonik, konsep dasar *mud volcano*, penanganan (tanggul, pengaliran, lingkungan), dan *geohazard map*. Data-data ini dikumpulkan dari berbagai sumber, baik yang diperoleh dari Tim Bapel-BPLS, Tim PT Lapindo Brantas, badan dan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, lembaga independen, maupun dari peneliti mandiri.

#### b. Pengukuran semburan gas

Munculnya beberapa semburan gas di sawah dan di pemukiman penduduk di sekitar semburan lumpur di Sidoarjo telah berdampak pada meningkatnya kekhawatiran masyarakat setempat karena trauma dengan kejadian semburan lumpur panas (*mud volcano*) yang muncul sejak akhir Mei 2006. Padahal, sebenarnya semburan gas ini (biasa disebut gas rawa), merupakan fenomena geologi yang umum di kawasan sungai atau rawa purba. Hal ini menimbulkan masalah baru, karena gas yang ke luar kebanyakan adalah gas metana yang mudah terbakar dan mempunyai bau tidak enak.



*Pemantauan gas bubble di rumah Bpk Oki, Siring Barat*

*Bubble* yang muncul di sekitar lokasi semburan di luar peta area terdampak jumlahnya meningkat sejalan dengan meningkatnya *subsidence*. Di wilayah semburan lumpur dan sekitarnya, gas ini muncul di banyak tempat di luar area terdampak antara lain: di sumur penduduk, dari sumur bor air dangkal (<10m) dan dalam (>60m), di sawah, sungai, bahkan lewat retakan bangunan rumah. Hingga akhir tahun 2009, kurang lebih telah terjadi 104 semburan gas dengan

berbagai bentuk, karakter dan masa waktu (*lifetime*) yang berbeda dan telah diidentifikasi oleh Tim Divisi Gas dan Deformasi Geologi BAPEL-BPLS.



*Konstruksi untuk separasi bubble*



*Gas dari bubble yang dimanfaatkan sebagai kompor*

Dari ratusan semburan gas yang ada, beberapa di antaranya telah dilakukan penanganan separasi (memisahkan gas dan air), selain untuk menghilangkan baunya, juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dibakar dengan sengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari beberapa yang diseparasi tersebut, telah ada semburan gas yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai bahan bakar memasak. Tidak semua semburan gas dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Yang terbaik adalah semburan gas yang ke luar lewat sumur bor air dalam, karena selain tekanannya lebih tinggi, konsentrasi gas metan-nya juga tinggi, dan masa aktifnya yang relatif lebih lama.

Sampai dengan akhir tahun 2009, BAPEL-BPLS telah membuat sebanyak 17 tungku berbahan bakar gas rawa untuk kepentingan memasak warga sekitar yang

tersebar di desa Siring Barat (7 buah), Desa Mindi (5 buah), Desa Pamotan (3 buah) dan Desa Jatirejo (2 buah). Ke 17 buah tungku tersebut berasal dari 6 semburan gas di 4 desa di atas, yang semua sumber gasnya berasal dari sumur bor air tanah dalam.

Di samping itu, berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilaksanakan oleh Bapel-BPLS mengenai kandungan gas yang berlokasi di desa Siring, Pamotan, Mindi, Pejarakan dan Kedungcangkring menunjukkan adanya diferensiasi kandungan gas metan dan CO<sub>2</sub>. Semakin tinggi kandungan gas metan, kandungan CO<sub>2</sub> semakin kecil atau sebaliknya.

### c. Deformasi geologi

Deformasi merupakan perubahan bentuk dan posisi suatu objek dalam jangka waktu tertentu. Perubahan bentuk objek ini terbagi dalam 3 fenomena yaitu: sekular, periodik dan episodik. Perubahan bentuk sekular berupa perubahan bentuk secara linier, lambat dan merambat. Perubahan bentuk secara periodik berupa perubahan yang mempunyai selang waktu antara detik sampai puluhan tahun. Sedangkan perubahan bentuk episodik berupa perubahan bentuk secara tiba-tiba dan cepat.

Tim Geodetik Divisi Gas dan Deformasi Geologi Bapel-BPLS sampai dengan akhir tahun 2009 telah melakukan pengukuran di 28 titik. Untuk mendukung kegiatan tersebut dilakukan kegiatan/pekerjaan sebagai berikut:

- pengikatan *basepoint* TTG 1304 terhadap orde 0 Jaring Kontrol Horizontal Nasional (BAKOSURTANAL).
- pemasangan 3 (tiga) patok titik pantau deformasi yang baru, yaitu di Keboguyang, Candi, dan Pamotan.
- pengukuran dan pemantauan titik pantau deformasi geologi.
- pengukuran bersama Virama Karya untuk keperluan pembangunan infrastruktur di Muara Kali Porong
- pengukuran untuk keperluan registrasi citra satelit wilayah muara Kali Porong.

Terkait dengan pencapaian indikator kinerja “Tersedianya *data base* untuk rencana penanganan area terdampak”, BAPEL-BPLS melakukan kegiatan studi, kajian, serta penelitian geologi permukaan dan bawah permukaan baik di dalam maupun di luar peta area terdampak. Dari hasil studi, kajian dan penelitian geologi tersebut telah dapat dikumpulkan berbagai data tentang deformasi geologi, kandungan kimia lumpur, kandungan kimia air, dan kandungan kimia gas. Berbagai data tersebut telah digunakan sebagai dasar dalam penanganan penanggulangan dampak dari deformasi geologi terhadap lingkungan permukiman penduduk dan lingkungan hidup.

### **Bidang Sosial**

Ada 4 (empat) sasaran yang terkait dengan bidang sosial yang ditetapkan dalam Renstra BAPEL-BPLS 2007-2011 yang harus dapat diwujudkan oleh Deputi Bidang Sosial, yaitu:

1. Berkurangnya dampak sosial yang dialami warga dan pengembangan peran masyarakat dalam kegiatan penanggulangan luapan lumpur di 12 desa.
2. Berkurangnya dampak sosial sebagai akibat deformasi geologi (berupa *bubble*, semburan gas/air/lumpur) yang mengancam keselamatan warga, serta pencemaran air tanah dan irigasi yang mengakibatkan turunnya produktifitas di 16 desa.
3. Terlaksananya/ terpenuhinya evakuasi dan relokasi warga terdampak di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 ke tempat yang lebih aman.
4. Tersedianya data dan informasi sebagai dasar perumusan kebijakan/ program penanganan masalah sosial kemasyarakatan (5 paket).

Sampai dengan akhir tahun 2009, hasil penting pencapaian sasaran yang terkait dengan bidang sosial tersebut adalah:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terlaksananya proses verifikasi terhadap tanah dan bangunan sebanyak 14.000 berkas pada 12 desa di wilayah Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.	14.000 berkas	13.800 berkas	92
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan permasalahan Bapel BPLS	1 Laporan	1 Laporan	100
Tertanganinya warga yang berada di luar peta terdampak yang kondisi rumah dan tempat tinggalnya membahayakan keselamatan jiwa.	16 desa	12 desa	75
Melaksanakan pemberian bantuan sosial kepada 3.100 KK / 10.020 jiwa.	1066 KK 6094 jiwa	1666 KK 6094 jiwa	156 100
Melaksanakan jual beli tanah dan bangunan di 3 desa: Kedungcangkring, Besuki dan Pejarakan, sebanyak kurang lebih 2.000 bidang (112 Ha).	88,40 Ha (UM 20%) 236.780 m <sup>2</sup>	62,2 Ha (UM 20%) 113.715 m <sup>2</sup>	70,3 48,17
Tersedianya data monografi dan	1 laporan	1 laporan	100

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
permasalahan yang berkembang di desa terdampak (baik di dalam maupun di luar peta area terdampak).			

Realisasi capaian kinerja pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan yang relatif kecil (jauh di bawah 90%) di desa Kedungcangkring, Besuki dan Pejarakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Guna mendukung pencapaian sasaran tersebut, Bapel-BPLS telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu: pelaksanaan sosialisasi dan musyawarah dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di 3 desa, pelaksanaan inventarisasi pengukuran tanah dan bangunan, pelaksanaan verifikasi berkas permohonan jual beli tanah, bangunan dan hasil pengukuran, serta pembayaran jual beli tanah dan bangunan.



*Proses Verifikasi berkas PT Minarak Lapindo Jaya, Juli 2007*



*Pengukuran tanah dan bangunan, Agustus 2008*

- Pelaksanaan inventarisasi pengukuran tanah dan bangunan dilaksanakan oleh pihak kedua, yaitu BPN Kabupaten Sidoarjo untuk pengukuran tanah dan Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sidoarjo untuk pengukuran bangunan. Pelaksanaan inventarisasi pengukuran tanah dan bangunan mencapai 1.717 bidang dengan luas 88,40 Ha dari target yang diperkirakan sebesar 2.000 bidang dengan luas 112 ha.

- Ditinjau dari luasan yang akan dan telah dibebaskan dapat dijelaskan bahwa target sebesar 112 Ha dalam Rencana Strategis adalah termasuk perkiraan luasan untuk Desa Besuki secara keseluruhan. Namun setelah ditetapkan bahwa yang masuk dalam peta area terdampak "baru" adalah Desa Besuki wilayah barat, maka luas tanah yang menjadi target untuk dilakukan proses jual beli tanah berubah menjadi 88,40 ha dengan bangunan seluas 236.788,33 m<sup>2</sup>.
- Realisasi proses jual beli tanah (sebagai uang muka 20%) pada tahun 2008 mencapai 56,90 ha, dan jual beli bangunan mencapai luas 113.715,60 m<sup>2</sup>. Tidak tercapainya target luasan tanah dan bangunan tersebut lebih disebabkan oleh karena masih adanya 87 berkas yang belum diajukan oleh warga untuk proses jual beli tanah dan bangunan.
- Apabila jumlah berkas yang pada tahun 2008 belum dapat diselesaikan prosesnya semula jumlahnya 87 berkas, pada tahun 2009 telah bertambah sebanyak 66 berkas sehingga jumlahnya menjadi 153 berkas. Tambahan 66 berkas tersebut dengan rincian :
  - **51** berkas merupakan berkas tanah gogol Blok Gempol yang awalnya dibagi menjadi 41 berkas, namun setelah ada rembug desa yang baru, akhirnya dibagi menjadi 93 berkas, termasuk 1 berkas yang pemiliknya belum bersedia menerima keputusan rembug desa .
  - **6** berkas tanah sawah milik warga Kedungcangkring yang sudah terlanjur dibayarkan uang muka 20% oleh PT MLJ, namun ternyata letaknya berada di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sehingga PT MLJ menyerahkan berkasnya kepada Bapel BPLS untuk prose penyelesaian selanjutnya .
  - **7** berkas bangunan milik warga yang bangunannya berdiri di atas tanah kavling di Desa Pejarakan yang masih ada sengketa.
  - **2** berkas tanah dan bangunan milik warga Desa Kedungcangkring yang pada tahun anggaran 2008 belum sempat diajukan.

Dari **153** berkas tersebut, pada bulan Agustus 2009 telah dilakukan pembayaran uang muka 20% terhadap **102** berkas dengan nilai nominal Rp. **1.781.829.160,-** sehingga total berkas yang telah dibayarkan uang muka 20% sebanyak **1.732** berkas dengan nilai nominal Rp. **101.982.605.704,-**. Kelebihan pembayaran kepada warga sebesar Rp. **4.120.000,-** belum dapat disetorkan ke Kas Negara karena hingga saat ini warga belum menyetorkannya kepada bendahara Bapel BPLS.

Masih terdapat **51** berkas yang belum dilakukan PIJB dengan rincian:

- **29** berkas tanah kavling di Desa Pejarakan yang hingga saat ini masih ada sengketa dan gugatan dari pemilik tanah asal.
- **7** berkas tanah milik warga Desa Besuki yang tidak bersedia dibayar dengan harga tanah sawah.
- **1** berkas milik warga Pejarakan yang masih keberatan dengan hasil ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
- **6** berkas tanah sawah milik warga Kedungcangkring yang sudah terlanjur dibayarkan uang muka 20% oleh PT. MLJ, namun ternyata letaknya berada di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sehingga PT MLJ menyerahkan berkasnya kepada Bapel BPLS untuk prose penyelesaian selanjutnya .
- **8** berkas tanah wakaf yang hingga saat ini belum ada ketentuan yang dapat dijadikan pedoman untuk proses pengantiannya.

Selain yang belum PIJB, masih terdapat 1 berkas tanah sawah ex gogol Blok Gempol Desa Besuki yang belum mengajukan permohonan jual beli karena belum setuju dengan keputusan rembug desa.

Dengan demikian total luas lahan yang telah dibayar uang muka 20% seluas 62,2 Ha atau 70,3% dari luas lahan yang menjadi target yaitu 88,4 Ha. Sedangkan luas bangunan yang telah dibayar uang muka 20 % seluas 113.715,60 m<sup>2</sup> atau 48,17% dari target seluas 236.780,33 m<sup>3</sup>.

### **Bidang Infrastruktur**

Selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan Renstra BAPEL-BPLS 2007-2010, banyak prestasi penting yang telah dicapai bidang infrastruktur dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja selama 3 (tiga) tahun tersebut antara lain:

Pencapaian kinerja selama 3 (tiga) tahun tersebut antara lain:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terbangunnya tanggul luar dengan elevasi tanggul maksimum 11 m DPL, dan panjang total sekurang-kurangnya 18,60 km.	18,60 km	16,88 km	90,74
Selesaiannya 1 unit bangunan pelimpah.	1	---	0

Selesaiya perbaikan sistem drainase sepanjang 29,10 km.	29,10 km	12,80 km	44,03
Berkurangnya kemacetan lalu - lintas di jalan arteri Porong (segmen Siring – Porong) dan jalan alternatif lainnya dari kecepatan 1-5 km/jam menjadi 40 - 60 km/jam.	1 laporan	1 laporan	100
Selesaiya peningkatan / pemeliharaan jalan dengan panjang total jalan lingkungan 2,5 km; jalan arteri 1,2 km dan jalan alternatif 14,0 km.	17,70 km	15,20 km	85,87
Bebasnya lahan untuk relokasi infrastruktur seluas 123,77 Ha.	123,77 ha	99,15 ha	80,11
Selesaiya pembangunan infrastruktur pengganti infrastruktur yang rusak akibat luapan lumpur sepanjang 2 x 7,1 km jalan arteri, 10,4 km jalan tol dan 7,1 km sarana pipa air baku untuk PDAM Surabaya.	4.297 m	1600 m	37,23
Kali Porong mampu mengalirkan debit banjir rencana $Q_{50}$ sebesar $1.600 \text{ m}^3/\text{det}$ dengan volume peninggian tanggul sepanjang 5,0 km.	5,00 km	4,00 km	80,00
Terbangunnya infrastruktur pengaman banjir di Kali Porong sepanjang 9,8 km untuk mengalirkan air banjir dan lumpur ke laut.	9,80 km	7,00 km	71,40
Terlaksananya pembuatan alur di muara melalui pengerukan endapan sebesar 1,5 juta $\text{m}^3$	1,50 juta $\text{m}^3$	1,00 juta $\text{m}^3$	66,67

Secara rinci capaian target bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

## 1. Penanganan Luapan Lumpur Sampai ke Muara Kali Porong

### a. Tanggul Penahan Luapan Lumpur

Kolam penampung lumpur pada batas Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 seluas  $\pm 592,78$  ha, terdiri dari 4 (empat) buah kolam. Sampai dengan akhir tahun 2009 telah terealisasi pembangunan kolam seluas 510,68 ha. Sebagian kolam ketiga di Desa Gempolsari seluas  $\pm 82,10$  ha belum dapat dibangun karena pelaksanaannya dihentikan oleh warga yang belum menerima pembayaran ganti rugi 20% dari PT Lapindo Brantas. Kolam ke-lima yakni Kolam Kedungcangkring – Besuki (Kebes) sesuai dengan Peta Area Terdampak tanggal 17 Juli 2008, berdasarkan Perpres No. 48 Tahun 2008, dimulai pada bulan Januari 2009 dan selesai pada bulan September 2009.

Ketinggian tanggul cukup aman dari bahaya *over topping*:

- Tanggul P70 – P69 – P68 (tanggul eks PerumTAS-1)

Tanggul utara bagian dalam antara P70 – P69 – P68 (eks PerumTAS-1) telah mencapai elevasi  $\pm 9$  m.



Tanggul P70 – P69 – P68 (eks PerumTAS-1)



Tanggul Renokenongo

- Tanggul P83 – P88 – P42 (tanggul Renokenongo)

Tanggul luar Renokenongo telah selesai dan mencapai elevasi +11,00 m.

- Tanggul P71 – P22 (Tanggul Siring)

Tanggul P71 – P22 sebagai pelindung jalan kereta api dan jalan arteri Porong yang terus-menerus mengalami *subsidence*. Dampak *subsidence* ini terus ditangani, di samping dilakukan penguatan kaki tanggul dengan konstruksi bronjong karena titik berat tanggul bergeser, juga dilakukan pelebaran kaki tanggul untuk mengantisipasi peninggian tanggul yang terus-menerus.



Tanggul P10D – P21 (Siring)



Tanggul P32 – P31 (Jatirejo)



*Tanggul P90 – P96 (Kedungcangkring – Besuki)*

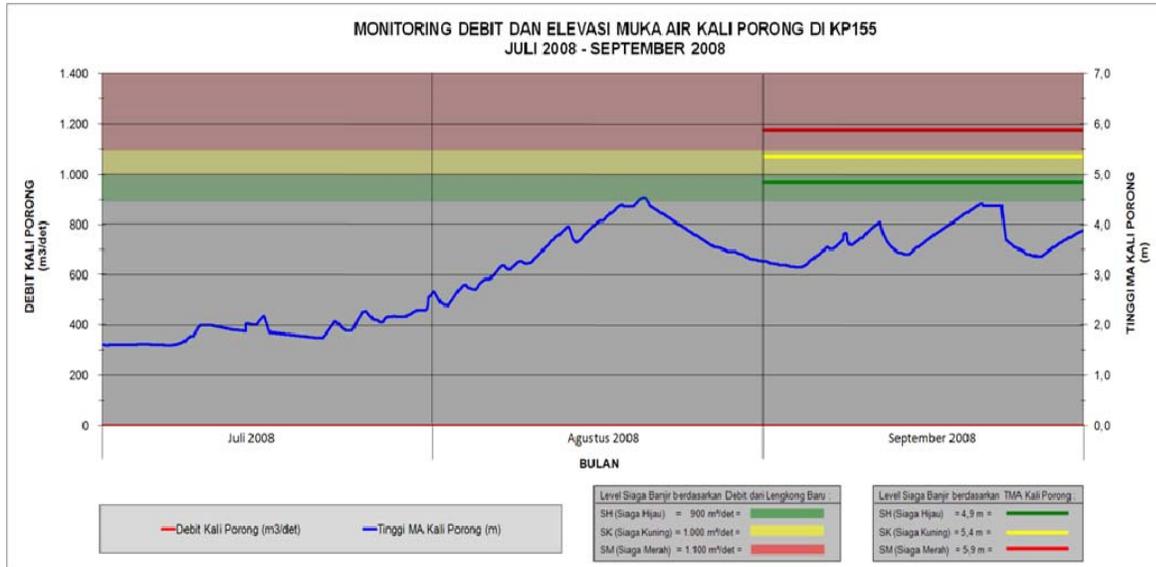
- Tanggul P90 – P96 (tanggul Kedungcangkring – Besuki/Kebes)  
Pekerjaan telah selesai dan elevasi puncak tanggul telah mencapai rata-rata +9,00 m.

#### **b. Pengamanan Kali Porong**

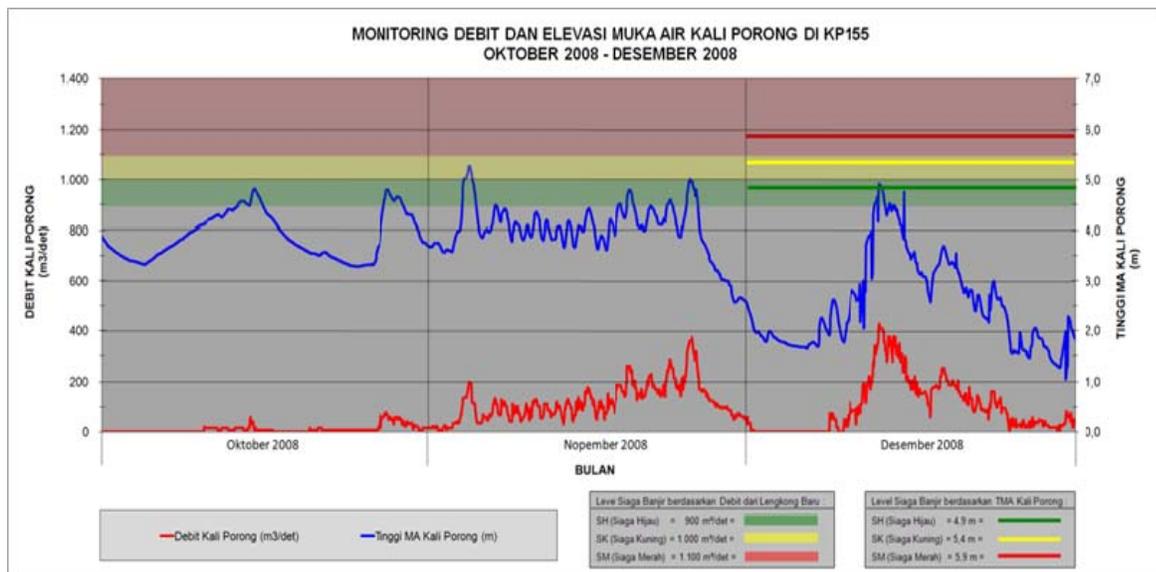
##### 1) Penanganan Endapan Lumpur di Alur Sungai

Agitasi endapan lumpur pada bulan Nopember dan Desember 2008 telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan sehingga Kali Porong dapat menyalurkan debit banjir yang meningkat dari waktu ke waktu. Pada bulan Januari 2009 pekerjaan agitasi telah dihentikan.

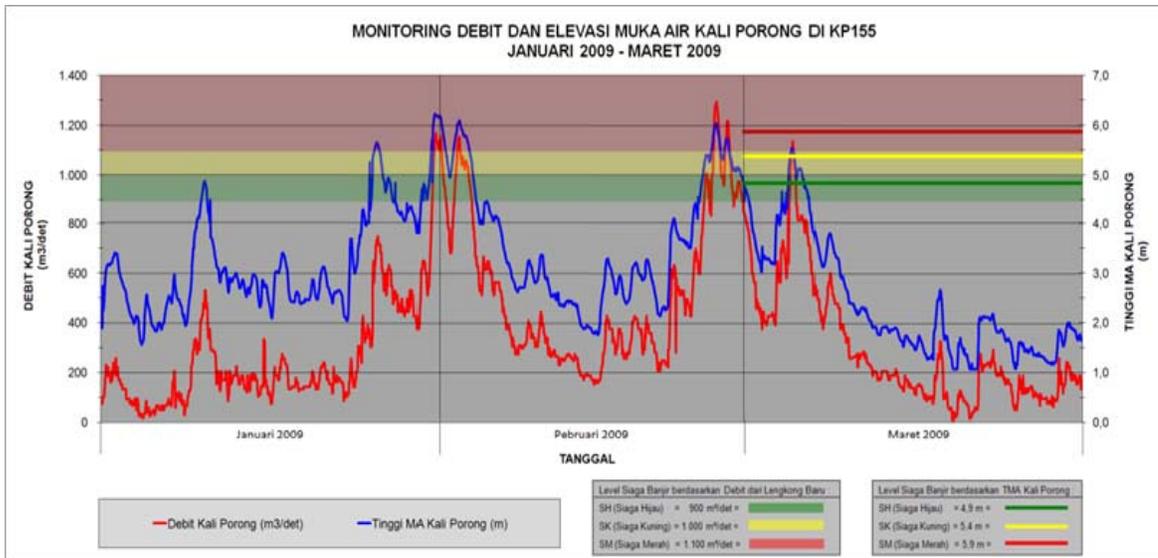
Kondisi debit dan elevasi muka air Kali Porong di Sta KP155 (di dekat jembatan jalan raya Porong) selama bulan Juli 2008 – Juni 2009 dapat dilihat pada grafik berikut:



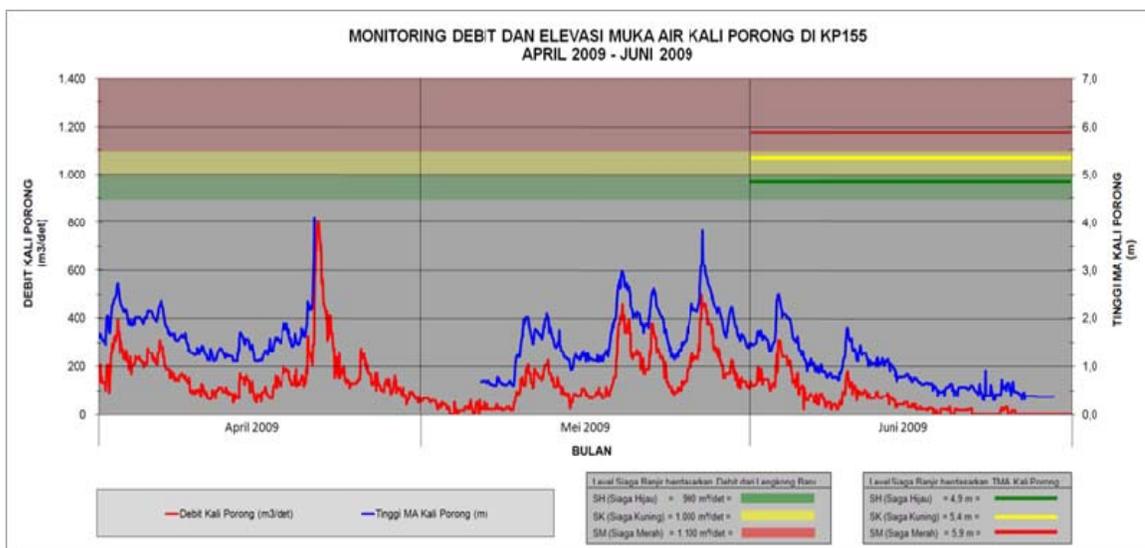
*Grafik monitoring debit dan elevasi muka air Kali Porong di KP155  
Juli – September 2008*



*Grafik monitoring debit dan elevasi muka air Kali Porong di KP155  
Oktober – Desember 2008*



Grafik monitoring debit dan elevasi muka air Kali Porong di KP155  
Januari – Maret 2009



Grafik monitoring debit dan elevasi muka air Kali Porong di KP155  
April – Juni 2009

Dengan adanya debit di Kali Porong yang cukup besar mulai tanggal 26 Januari 2009, nampak bahwa daya air Kali Porong benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membawa lumpur ke hilir.

Kondisi alur sungai Kali Porong pada bulan Oktober 2008 dibandingkan dengan kondisi pada akhir bulan April 2009 yang telah kembali normal seperti pada saat belum terisi Lumpur.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I diperoleh informasi bahwa kapasitas Kali Porong dari bulan ke bulan mengalami perubahan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No	No dan Tanggal Surat	Waktu Pengukuran	Debit Hasil Simulasi, Q (m <sup>3</sup> /det)
1	KP. 058.1/UM/DU/2009, tanggal 26 Pebruari 2009	16 Pebruari 2009	1.400 m <sup>3</sup> /det <sup>1</sup>
2	KP. 083/UM/DU/2009, tanggal 31 Maret 2009	18 Maret 2009	1.600 m <sup>3</sup> /det
3	KP. 124.1/UM/DU/2009, tanggal 4 Mei 2009	15 April 2009	1.600 m <sup>3</sup> /det
4	KP. 170.2/UM/DU/2009, tanggal 25 Juni 2009	17 Mei 2009	1.600 m <sup>3</sup> /det
5	KP. 212/UM/DU/2009 tanggal 10 Agustus 2009	25 Juni 2009	1.600 m <sup>3</sup> /det
		15 Juli 2009	1.600 m <sup>3</sup> /det
6	KP. 226.1/UM/DU/2009 tanggal 1 September 2009	16 Agustus 2009	1.600 m <sup>3</sup> /det
7	KP. 262/UM/DU/2009 tanggal 13 Oktober 2009	14 September 2009	1.350 m <sup>3</sup> /det

Catatan: Kapasitas banjir rencana Kali Porong = 1.600 m<sup>3</sup>/det.

<sup>1</sup> Simulasi untuk debit Kali Porong bulan Januari 2009 adalah sebesar 1.100 m<sup>3</sup>/det.



*Kondisi Kali Porong di hilir jembatan eks tol Gempol pada bulan September 2009  
(atas: saat air laut surut, bawah: saat air laut pasang)*

Pada bulan September 2009, masih belum ada debit air yang mengalir di Kali Porong karena Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Brantas masih berada dalam keadaan musim kemarau. Air yang ada di Kali Porong pada bulan ini adalah air laut yang masuk ke Kali Porong dan mengalir ke hulu (*back water* air laut sampai ke hulu jembatan arteri Porong).

## 2) Pengamanan Terhadap Luapan Banjir

Pembangunan tanggul banjir Kali Porong Tahap I sepanjang 4.000 meter telah selesai 100% pada akhir April 2009.



*Peninggian tanggul Kali Porong di Desa Tlocor*

### 3) Pengamanan Terhadap Gerusan

Perkiraan progres pekerjaan pelindung tebing sungai Kali Porong sampai dengan akhir TA 2009 adalah sepanjang 1.664 m untuk tebing sungai sebelah kiri dan 2.310 m untuk tebing sungai sebelah kanan atau total 3.974 m.

Progres pekerjaan pelindung tebing sungai Kali Porong dapat dilihat pada foto pelaksanaan berikut ini:



*Pekerjaan Revetment di Kali Porong (1)*



Pekerjaan Revetment di Kali Porong (2)

**c. Penanganan Endapan di Muara**

1) Pembuatan Alur Sungai ke Palung Laut

Pekerjaan pengerukan dasar sungai Kali Porong dilaksanakan di lokasi Kali Porong hilir di KP266 - KP77. Hasil pengerukan ditempatkan di lokasi *spoilbank*.

Ada 4 (empat) unit *dredger* yang beroperasi untuk mendukung pekerjaan ini, yaitu *Garumas2*, *Hamson*, *Dixie* dan *Zimmerman*. Di lokasi ini populasi bagan ikan milik masyarakat juga berkembang dengan baik.



Pengerukan Kali Porong



*Spoilbank hasil pengerukan alur sungai Kali Porong  
(atas: Maret 2009, dan bawah: Juli 2009)*

Volume pengerukan sampai dengan akhir TA 2009 diperkirakan mencapai 956.000 m<sup>3</sup>.

## 2) Pembangunan *Jetty*

Pembangunan *jetty* telah dimulai pada awal bulan Maret 2009. Sampai dengan akhir TA 2009 *jetty* yang terpasang sebanyak

535 unit sepanjang 2.625 m @ 2 lapis dan berada di lokasi KP261 - KP277 (R1 – R105).

## 3) Reklamasi

Hasil pengerukan alur sungai Kali Porong ditempatkan di lokasi

*spoilbank* sekaligus untuk reklamasi muara Kali Porong. Pada akhir bulan Maret 2009 diadakan kegiatan penghijauan di lokasi reklamasi dalam rangka ulang tahun BPLS ke-2. Saat ini, di lokasi tersebut dijumpai bahwa tanaman bakau dapat hidup dengan subur.



*Bagan ikan milik masyarakat*



*Pembangunan jetty dari geotextile gulung*



*Tanaman bakau dapat hidup dengan subur di lokasi reklamasi muara Kali Porong*

## 2. Penanganan Infrastruktur Sekitar Pusat Semburan

### a. Revitalisasi Sistem Drainasi

Saluran drainasi yang sudah selesai dikerjakan sepanjang 12,81 km. Pada musim hujan 2008/2009, menurut hasil laporan pemantauan lapangan tidak terjadi genangan, baik di permukiman maupun di jalan arteri Porong dan jalan kereta api. Pompa sebanyak 3 (tiga) unit pada musim hujan 2008/2009 tidak dioperasikan lagi, padahal pada musim hujan 2007/2008 dioperasikan selama 24 jam secara terus-menerus.



*Sistem Drainase di Sekitar Tanggul (searah jarum jam): di tanggul P10D – P21; di entrance eks Gerbang Tol Porong; di Juwet; di Jatirejo*

#### **b. Peninggian Jalan Arteri Porong**

Pekerjaan peninggian jalan arteri setinggi 80 cm terhadap jalan lama, sepanjang 1.200 meter, termasuk saluran drainasi sepanjang 3.100 m telah selesai dan berfungsi menjelang Lebaran 2008. Pada Lebaran 2009 tidak dilaporkan adanya kemacetan berat di jalan arteri Porong. Kemacetan di jalan arteri Porong yang masih terjadi semata-mata karena volume kendaraan yang melintas terutama ke arah Malang telah melampaui kapasitas layanan dan pengaturan kendaraan yang keluar – masuk gang memotong arus lalu lintas utama kurang memadai.



*Jalan nasional Siring – Porong yang telah ditinggikan (1)*



*Jalan nasional Siring – Porong yang telah ditinggikan (2)*

### **c. Pembangunan Jalan Alternatif**

Walau ada sedikit sisa ruas jalan alternatif yang terhambat tanah warga yang belum dibebaskan, namun berfungsinya jalan alternatif ruas Kepadangan – Krembung – Jasem (Ngoro) telah ikut mengurangi beban layanan arteri Porong. Jalan alternatif ini akan menjadi andalan bila ada

gangguan fungsi arteri Porong, baik teknis maupun non teknis, seperti demo yang memblokade lalu lintas.



*Pekerjaan jalan alternatif Krembung – Jasem*



*Pekerjaan jembatan jalan alternatif Krembung – Jasem di atas Porong Canal*



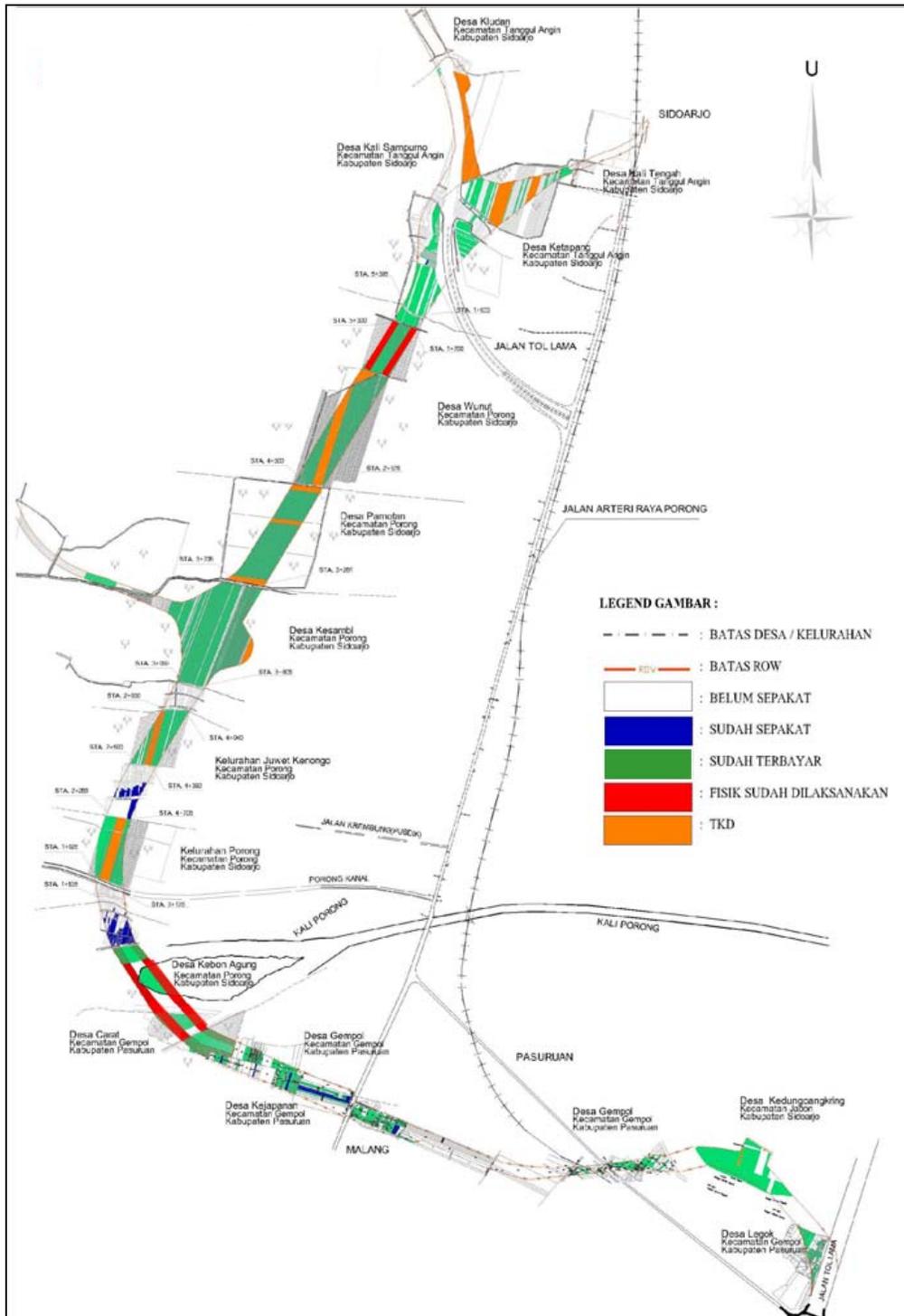
*Pekerjaan jembatan Kali Sadar*

**d. Pembangunan Relokasi Infrastruktur**

Target progres pembebasan tanah sampai dengan akhir tahun anggaran 2009 adalah sebesar 99,15 Ha atau 80,11% dari target total.

Peta lokasi kebutuhan lahan (trase relokasi infrastruktur) dan kondisi

pembebasan tanah dapat dilihat pada gambar berikut:



Peta pembebasan tanah relokasi infrastruktur jalan arteri dan jalan tol

Kegiatan pelaksanaan relokasi jalan arteri raya Siring – Porong masih terkendala penyediaan lahan yang sampai pada akhir TA 2009 belum seluruhnya tersedia. Serah terima lapangan kepada penyedia jasa masih dilakukan sebagian (parsial) sehingga menyebabkan penyedia jasa tidak dapat bekerja secara simultan dan pelaksanaan pekerjaan menjadi terlambat.

SPMK untuk Paket 2 dan Paket 3 telah diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2008 dengan serah terima lapangan sebagian (parsial), sehingga kegiatan pelaksanaan fisik dikonsentrasikan pada pelaksanaan pembangunan jembatan (*fly over*) yang melintas di atas Kali Porong. SPMK untuk Paket 1 dan Paket 4 telah diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2008 dengan serah terima parsial pula, pelaksanaan fisik dikonsentrasikan pada pembangunan overpass dan *fly over* di sekitar jalan tol lama.



*Pelaksanaan pekerjaan Paket 1: pembesian kolom, over pass di Desa Wunut dan pekerjaan Paket 2 : pier head fly over di Kali Porong*



*Pelaksanaan pekerjaan Paket 3: pier head fly over di Kali Porong dan pekerjaan Paket 4 : timbunan di atas tanah lunak di Desa Wunut*



Operasi dredger dan booster dibantu dengan 3 buah

### 3. Mitigasi Luapan Lumpur Sidoarjo

Sejak bulan Nopember 2008 telah beroperasi 3 (tiga) unit *booster* untuk mengalirkan luapan lumpur ke Kali Porong dan menjaga ketinggian permukaan lumpur di kolam Renokenongo stabil pada elevasi +4,50 m.

Langkah mitigasi bencana sampai dengan bulan Agustus 2009 dilakukan dengan mengoperasikan pompa *booster* setiap hari sebanyak 3 (tiga) unit dari 4 (empat) unit yang direncanakan. Masing-masing pompa *booster* beroperasi dengan menyedot lumpur dari kolam Renokenongo dan mengalirkan melalui pipa pembuangan (pipa eks Pertamina diameter 80 cm) ke Kali Porong.

Selain itu dioperasikan juga 1 (satu) unit *dredger* tipe/merk *Waterman* dengan kapasitas 90 m<sup>3</sup>/jam, dan 3 (tiga) unit *exca-ponton*.

Beberapa target kinerja belum dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bangunan pelimpah pada kolam penampung lumpur yang rencana lokasi pembangunannya berada di daerah eks Perumtas, tidak jadi dibangun pada

tahun 2008 karena warga masyarakat sekitar tidak menyetujui rencana pembangunan bangunan pelimpah di lokasi tersebut, karena berbagai alasan yang terkait dengan dampak yang dapat ditimbulkan oleh lumpur yang mengalir lewat saluran pelimpah tersebut. Mengingat pentingnya bangunan pelimpah tersebut, maka pembangunannya tetap akan dilaksanakan dan lokasi tepatnya masih dalam pengkajian.

- b. Target capaian kinerja sasaran perbaikan sistem drainase sampai dengan tahun 2009 adalah sepanjang 29,10 km, yang dapat diselesaikan adalah sepanjang 12,80 km atau sebesar 44,03%. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perbaikan sistem drainase tersebut adalah adanya lokasi drainase yang bersinggungan dengan sarana utilitas kereta api yang berada di bawah penguasaan PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI), dan yang bersinggungan dengan Pasar Porong lama. Untuk saluran drainase yang bersinggungan dengan sarana utilitas PT. KAI pelaksanaannya menunggu keputusan dari PT. KAI, sedang untuk saluran drainase yang bersinggungan dengan Pasar Porong lama, pengerjaannya dilakukan pada malam hari, dari pukul 22.00 sampai dengan pukul 02.00, karena para pedagang pasar tidak mau kegiatan jual belinya terhenti di saat siang hari.

Di samping itu, tidak tercapainya sebagian besar target penyelesaian drainase tersebut juga disebabkan oleh adanya demonstrasi dari warga masyarakat terdampak sebagai akibat dari tidak lancarnya pembayaran proses jual beli tanah dan bangunan. Sistem drainase yang pelaksanaan perbaikannya terkendala demonstrasi warga masyarakat terdampak tersebut adalah sistem drainase yang lokasinya berada di tepi tanggul luar yang bermasalah maupun sistem drainase luar yang melewati daerah terdampak.

Capaian kinerja sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan *DED* sistem drainase, pengoperasian pompa (termasuk *mobile pump*) dan pintu drainase, serta supervisi pelaksanaan perbaikan sistem drainase. Pengoperasian pompa tersebut pada awalnya direncanakan sepanjang tahun, namun setelah berfungsinya saluran drainase, pengoperasian pompa tidak dilakukan secara-menerus sepanjang tahun akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

- c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan/pemeliharaan jalan yang digunakan sebagai jalan alternatif tersebut adalah belum tuntasnya pengadaan tanah pemukiman penduduk sepanjang 300 m yang sampai saat ini belum dapat diproses pengadaan tanahnya yang akan digunakan untuk jalan alternatif tersebut. Perlu

disampaikan di sini bahwa lokasi tanah yang belum tuntas pengadaannya tersebut berada di area Pabrik Gula Krembung, yang sekarang sedang diproses pengadaannya (pengalihan assetnya) oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

- d. Realisasi target pengadaan tanah untuk relokasi berbagai sarana pengganti infrastruktur terdampak sampai dengan tahun 2009 hanya tercapai sebesar 99,15 Ha atau 80,11%, mengingat adanya beberapa permasalahan dalam proses pembebasan tanahnya. Tanah yang bisa dibebaskan tersebut sebagian besar berupa tanah sawah dengan harga ganti rugi yang lebih rendah dari pada harga tanah kering. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyerapan keuangan menjadi lebih rendah apabila dibandingkan dengan luasan tanah sawah yang telah dibebaskan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengadaan tanah untuk relokasi infrastruktur tersebut adalah adanya permintaan harga ganti rugi tanah dari masyarakat dengan nilai minimal sama dengan harga jual beli tanah yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Di samping itu, khususnya untuk warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Pasuruan, meminta agar realisasi pembayaran ganti rugi dilakukan secara bersama-sama antara tanah sawah dan tanah kering.

Selain permasalahan tersebut di atas, masih terdapat tanah kas desa (TKD) seluas  $\pm$  14,25 ha yang belum bisa dilakukan penetapan harganya karena masih diperlukan proses penggantian atas tanah kas desa tersebut.

- e. Dalam Renstra 2007 - 2011 satuan indikator kinerja pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menggunakan satuan kilometer (km), namun untuk memudahkan perhitungan capaian kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan/kegiatan, maka satuan indikator yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diubah menjadi satuan meter (m). Dalam penetapan kinerja tahun 2009, untuk mencapai sasaran "Tersedianya infrastruktur pengganti atas infrastruktur yang rusak akibat luapan lumpur" indikator yang ditetapkan adalah selesainya pembangunan (relokasi) jalan arteri Siring - Porong (jalan dan jembatan) sepanjang 4.297 m, yang mencakup pekerjaan pembangunan over pass dan jalan arteri Siring - Porong I (2.000 m), *fly over*/jembatan Siring - Porong II (866 m), *fly over*/jembatan Porong - Siring I (994 m), serta *fly over*/jembatan dan jalan arteri Porong - Siring II (437 m).

Dalam realisasinya bagian pekerjaan yang dapat dikerjakan sampai dengan akhir TA 2009 hanya untuk pembangunan *fly over*/jembatan Siring-Porong II

(800 m) dan Porong-Siring I (800 m), dengan capaian kinerja total sepanjang 1.600 m atau hanya 37,23% dari total sasaran tahun 2009 (4.297 m). Rendahnya realisasi pencapaian target sasaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Sebagian lahan baru dapat dibebaskan dan diserahkan pada awal bulan November 2008.
- Untuk pekerjaan Paket I (over pass dan jalan arteri Siring-Porong I) dan Paket IV (fly over/jembatan dan jalan arteri Porong-Siring II), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk penyedia jasa baru dapat diterbitkan pada 1 Desember 2008.
- Pelaksanaan pekerjaan fly over/jembatan yang berada di badan sungai Kali Porong mengalami kesulitan karena naiknya muka air sungai Kali Porong pada musim penghujan 2008/2009, dan keterbatasan/tersedianya jalan akses menuju lokasi.
- Lahan yang sudah diserahkan masih terdapat beberapa lokasi yang belum bebas (belum bisa dilakukan pembayaran ganti rugi) sehingga lahan yang sudah bebas tidak berkesinambungan (setempat – setempat).

Untuk keperluan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, kegiatan pembangunan jalan tersebut didukung dengan pekerjaan supervisi relokasi jalan arteri.

- f. Pembangunan infrastruktur pengamanan banjir di Kali Porong sepanjang 15 km untuk mengalirkan air banjir dan lumpur ke laut pada tahun 2008 diwujudkan melalui peninggian tanggul Kali Porong dengan target panjang 5 km, yang realisasi fisiknya mencapai 4 km atau sebesar 80%. Rendahnya pencapaian progres fisik tersebut disebabkan oleh adanya kesulitan dalam mendapatkan bahan timbunan dari luar dan pelaksanaan pekerjaan yang bersamaan dengan datangnya musim hujan.

Pada awal perencanaan, bahan timbunan adalah tanah yang diambil dari luar (sebagaimana bahan timbunan untuk pembuatan tanggul), namun karena bahan timbunan dari luar tersebut terlalu jauh, maka dicari alternatif di tempat lain. Setelah dilakukan beberapa tes laboratorium terhadap tanah yang berada di sekitar tanggul, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa tanah dimaksud memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bahan timbunan tanggul. Sehubungan dengan hal tersebut maka diputuskan timbunan tanggul menggunakan tanah yang berada di sekitar lokasi tanggul.

### **Bidang Sekretariat/Kelembagaan**

Dalam 3 (tiga) tahun pelaksanaan Renstra BAPEL-BPLS 2007-2011, banyak prestasi penting yang telah dicapai bidang sekretariat/kelembagaan BAPEL-BPLS dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja selama 3 (tiga) tahun tersebut antara lain:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Organisasi ramping struktur kaya fungsi.	1 laporan	1 laporan	100
Terimplementasinya ketatalaksanaan yang ada.	1 laporan	1 laporan	100
Rendahnya persentasi temuan pengawas terhadap pelaksanaan prosedur tetap ketatalaksanaan.	4 laporan	4 laporan	100
Ketepatan waktu administrasi kepegawaian.	1 laporan	-	0
Ditetapkannya 6 peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bapel-BPLS.	4 laporan	4 laporan	100
50 orang telah ditingkatkan kompetensinya	50 orang	62 orang	124
Terciptanya sistem informasi yang berbasis Web dan GIS (2 Sistem).	1 laporan (20%)	1 laporan (20%)	100 (100)

Dalam rangka pengaturan organisasi pada tingkat pelaksana, telah ditetapkan Peraturan Kepala Bapel-BPLS Nomor 02/PRT/P/2007 tentang Organisasi Badan Pelaksana BPLS, yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Kepala Bapel-BPLS Nomor 29/PRT/P/2009.

Dalam rangka melengkapi perangkat organisasi tersebut, pada tahun 2008 telah dikaji pembentukan satu unit satuan pengawasan intern guna membantu

Pimpinan Bapel-BPLS dalam melakukan pengawasan dan pembinaan administrasi pengadaan barang dan jasa, serta administrasi keuangan dan barang milik negara kepada para PPK dan stafnya. Pengisian organisasi pengawasan intern tersebut akhirnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapel-BPLS Nomor 14/KPTS/P/2009.

Dalam rangka memberikan panduan yang jelas kepada Bapel-BPLS dalam melakukan koordinasi dan hubungan kerja dengan Dewan Pengarah BPLS dan PT Lapindo Brantas, pada tahun 2008 telah disusun satu Tata Hubungan Kerja Antara Dewan Pengarah BPLS, Bapel-BPLS, dan PT Lapindo Brantas. Dengan tata kerja tersebut diharapkan mekanisme koordinasi dan tata hubungan kerja di antara 3 institusi tersebut dalam berjalan lebih efektif dan efisien.

Di samping tata kerja tersebut, dengan dukungan dari Dewan Pengarah telah pula ditetapkan beberapa peraturan perundangan-undangan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas BAPEL-BPLS yaitu:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
- Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 41/PRT/P/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran Penanganan Masalah Sosial Masyarakat.
- Keputusan Kepala Badan Nomor 42/KPTS/P/2008 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Masalah Sosial Masyarakat di Wilayah Penanganan.
- Keputusan Kepala Badan Nomor 43/KPTS/P/2008 tentang Besaran Bantuan Sosial dan Besaran Harga Jual Beli Tanah dan Bangunan.

Tiga keputusan Kepala BAPEL-BPLS tersebut di atas merupakan landasan pokok dalam pemberian bantuan sosial dan pelaksanaan proses jual beli tanah dan bangunan bagi warga dari 3 desa terdampak sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 48 Tahun 2008.

Dalam tahun 2008 BAPEL-BPLS telah menyelesaikan penyusunan prosedur operasional standar (*standard operational procedure*) sebanyak 16 dokumen guna mendukung pelaksanaan tugas di bidang operasi, bidang sosial, bidang infrastruktur, dan bidang sekretariat/kelembagaan.

Indikator kinerja sasaran “rendahnya persentasi temuan pengawas terhadap pelaksanaan prosedur tetap ketatalaksanaan” dapat dicapai sesuai dengan target

yang ditetapkan karena didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan seperti pelaksanaan pengelolaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Bapel-BPLS, penyusunan laporan keuangan pelaksanaan anggaran Bapel-BPLS, penyusunan RKP, RENJAKL, RKAKL, dan DIPA, serta penyusunan Renstra.

Realisasi capaian sasaran yang berkaitan dengan terapkannya prosedur tetap ketatalaksanaan administrasi bidang kepegawaian yang diindikasikan dengan ketepatan waktu administrasi kepegawaian, khususnya yang terkait dengan sistem kepegawaian, kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2008 mengingat alokasi pendanaan yang direncanakan untuk kegiatan tersebut tidak disetujui dalam pembahasan RKAKL/DIPA. Mengingat pentingnya kegiatan ini dalam menunjang pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai, maka kegiatan ini akan dialihkan pada tahun 2009 atau tahun 2010. Untuk mendukung pelaksanaan administrasi kepegawaian saat ini, sistem yang digunakan adalah dengan memanfaatkan sistem manual yang telah ada, meskipun dari segi waktu tentu penyelesaian administrasi akan relatif lebih lama.



*Latihan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara dan Administrasi Keuangan Negara*

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan/atau ketrampilan pegawai dalam pelaksanaan tugas, pada tahun 2008 Bapel-BPLS telah menyelenggarakan dan mengirim pegawai terkait untuk mengikuti pelatihan. Jumlah pegawai yang telah dilatih dan ditingkatkan kemampuannya pada tahun 2008 mencapai 62 orang, yang mencakup bidang-bidang pelatihan sebagai berikut:

- Pelatihan dan Ujian Nasional Pengadaan Barang dan Jasa
- Pelatihan Produksi Video Dokumenter
- Pelatihan Animasi Informasi Pembangunan Infrastruktur
- Pelatihan Administrasi Keuangan Negara
- Pelatihan dan Sosialisasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
- Pelatihan/sosialisasi Sistem Akun Belanja
- Pelatihan/sosialisasi Form Baru Perpajakan

- Seminar dalam bidang yang terkait dengan bencana semburan Lumpur

Realisasi capaian kinerja sasaran sistem informasi berbasis *web* didukung oleh pelaksanaan kegiatan penyediaan kebutuhan data yang berteknologi handal dengan berbasis sistem informasi geografis yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi perhitungan luasan lahan dan luasan bangunan, khususnya untuk wilayah 3 desa yang masuk dalam peta area terdampak baru sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008.

Penyediaan kebutuhan data dimaksud diwujudkan dengan pengadaan data dan informasi citra satelit (*Quickbird*) lingkup peta area terdampak dan area relokasi infrastruktur serta muara Kali Porong (seluas  $\pm 510 \text{ km}^2$ ).

### 1.2.2. Aspirasi Masyarakat

Bencana lumpur Sidoarjo telah memporak-porandakan berbagai segi kehidupan masyarakat di Peta Area Terdampak, baik dalam bidang perekonomian (musnahnya beberapa pabrik dan tempat kegiatan usaha lainnya), pertanian, prasarana dan sarana pendidikan, perumahan permukiman beserta prasarana dan sarananya, tempat-tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat terdampak sangat mengharapkan agar semua hak miliknya mendapatkan penggantian yang layak dan segera, serta berfungsinya kembali semua prasarana dan sarana publik, sehingga kegiatan perekonomian dan usaha dapat segera pulih.

Harapan tersebut belum sepenuhnya dapat terwujud, mengingat beberapa kendala/ permasalahan yang telah disajikan sebelumnya, sehingga memunculkan berbagai demonstrasi unjuk rasa warga terdampak, baik yang berada di daerah Peta Area Terdampak maupun yang berada di luar Peta Area Terdampak.

Banyaknya kelompok dalam masyarakat terdampak dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda, maka memunculkan pula tuntutan yang beragam di antara kelompok-kelompok yang ada. Berbagai tuntutan yang berbeda tersebut antara lain:

- Warga terdampak di 12 desa / kelurahan secara umum menuntut kejelasan penyelesaian pembayaran jual beli tanah / bangunan.
- Warga desa Gempolsari yang menguasai tanah  $\pm 70 \text{ Ha}$  yang tercemar permanen mengharapkan penyelesaian karena tanah tersebut tidak produktif lagi.
- Warga desa Besuki, Pejarakan dan Kedungcangkring mengharapkan dapat membeli kembali bangunan atau sebagian bangunan miliknya.

- Warga 9 RT (di Kelurahan Siring, Jatirejo dan Mindi) menuntut kejelasan status bangunan mereka dan tanggung jawab atas kehilangan asset tersebut jika harus ditinggalkan. Demikian pula para pengusaha yang menuntut atas keselamatan dan kelanjutan usahanya
- Warga desa Penatarsewu, Sentul, Plumbon menuntut penormalisasi kali Ketapang karena air sungai tersebut tercemar dan mengancam produktivitas tanah dan tambak mereka.

### **1.3. Identifikasi Permasalahan dan Potensi**

#### **1.3.1. Permasalahan**

Analisis terhadap permasalahan yang dihadapi BAPEL-BPLS akan diuraikan berdasarkan bidang yang ada mengingat spesifiknya potensi dan permasalahan yang dihadapi masing-masing bidang dalam melaksanakan tugasnya.

#### **Bidang Operasi**

Masalah utama yang dihadapi Deputi Bidang Operasi BAPEL-BPLS dalam penanganan semburan dan luapan lumpur ada tiga, yaitu semburan yang besar dengan energi dorong yang besar, volume lumpur yang ke luar besar sehingga memicu amblesan dengan laju yang besar, dan teknik pengaliran lumpur ke Kali Porong yang tidak efektif. Kondisi semburan lumpur saat ini masih menunjukkan fluktuatif besar kecil, dan berdasarkan monitoring pernah juga berhenti (periode diam) yakni pada akhir 2008 dan tanggal 20 September 2009 serta terjadinya *sudden collapse* di pusat semburan pada Mei 2008 dan Juni 2008 yang mengakibatkan tanggul *cofferdam* cincin titik P44.2 ambles disusul tanggal 2 Maret 2009 tanggul cincin dengan elevasi +14.00 meter jebol karena tidak mampu menahan subsidence yang terjadi sebesar 20 – 30 cm per hari.

#### **1. Kondisi semburan**

Kondisi semburan pada saat ini masih menunjukkan fluktuatif semburan yang besar, sedang maupun kecil. Tinggi semburan berfluktuasi antara 1-3 meter di atas permukaan lumpur di sekitarnya. Upaya penutupan semburan telah pernah dilakukan oleh PT Lapindo Brantas dengan berbagai cara antara lain side tracking, relief well dan bola-bola beton, namun demikian belum nampak hasilnya. Pada masa BPLS dilakukan dengan membuat konstruksi yang plastis dari kantong-kantong yang diisi sirtu dengan volume yang cukup besar yang diletakkan di



*Hydrostatic counter pressure di sekeliling pusat semburan dengan kantong-kantong yang diisi sirtu*

sekeliling pusat semburan untuk membuat *hydrostatic counter pressure* pada pusat semburan. Namun hasilnya juga belum memadai untuk menutup semburan.

Semburan lumpur Sidoarjo yang sudah berlangsung sejak tahun 2006 diperkirakan akan masih berlangsung lama lebih kurang 20 – 30 tahun dan kemungkinan untuk menutup semburan tingkat keberhasilannya sangat kecil yang disebabkan oleh lubang semburan telah menjadi semakin besar.

Bahkan para ahli geologi yang berkumpul di Cape Town Afrika Selatan pada bulan Oktober 2008 menyatakan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo sulit untuk dihentikan.

## 2. Luapan Lumpur

Dengan hilangnya tanggul cincin sebagai tanggul pembatas semburan dengan pond yang berada di luarnya, maka luapan lumpur dengan debit 100.000 m<sup>3</sup>/hari, saat ini telah mengalir dan mengisi pond di wilayah Peta Area Terdampak dengan



*Tanggul cincin elevasi +14.00 jebol (2 Maret 2009) karena tidak mampu menahan amblesan/subsidence sebesar 20 – 30 cm/hari*

pola aliran dari pusat semburan menyebar ke seluruh penjuru yakni ke utara menuju pond Perumtas, ke barat menuju pond Siring, ke timur menuju pond Renokenongo. Dengan adanya luapan lumpur maka tanggul-tanggul luar yang dibangun oleh BPLS menjadi rawan terhadap ancaman luapan lumpur.

Luapan lumpur terseparasi menjadi lumpur padat yang mengendap pada pond dan air yang terkonsentrasi pada sisi-sisi tanggul terutama pada lokasi Siring Timur, Glagaharum dan Renokenongo. Hal ini dapat mengancam stabilitas tanggul Infrastruktur, sering terjadi amblesan/longsoran dan rembesan pada tanggul.

Selain itu, pembebanan lumpur yang mengisi pond dapat mengakibatkan amblesan/*subsidence* pada lokasi pusat semburan dan lokasi di luar Peta Area Terdampak.

### 3. Pengaliran lumpur ke Kali Porong yang tidak efektif

Dampak krisis keuangan global yang melanda dunia sejak Oktober 2008 telah berdampak pula pada kondisi likuiditas keuangan PT Minarak Lapindo Jaya yang akibatnya pelaksanaan pengaliran lumpur ke Kali Porong menjadi tidak efektif.

Semula PT MLJ mengoperasikan 12 pompa lumpur dengan kapasitas  $3,9 \text{ m}^3/\text{detik}$  dengan jam operasi 18 jam per hari dan setelah terjadinya krisis keuangan global berangsur-angsur jumlah pompa berkurang dan saat ini tinggal 4 buah pompa lumpur yang beroperasi dengan kapasitas  $1,0 \text{ m}^3/\text{detik}$  dengan jam operasi 8 jam per hari.

Untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap ancaman luapan lumpur, maka BPLS telah melakukan tindakan Mitigasi pengaliran lumpur untuk memompa lumpur ke Kali Porong semenjak tahun 2008, namun dalam pelaksanaannya terkendala belum tersedia dana untuk mitigasi pengaliran lumpur yang dikarenakan belum ada payung hukum yang mengaturnya.

Pompa-pompa yang dipasang untuk Mitigasi pengaliran lumpur berupa 3 buah pompa *booster* dan satu buah kapal keruk serta dibantu dengan alat berat sebagai sarana bantu pengaliran lumpur yang terdiri dari 4 buah



3 unit pompa booster untuk mitigasi pengaliran lumpur

*excapontoon*, 3 buah *excavator long arm* dan pompa-pompa air sebagai sarana pengencer lumpur agar mudah dipompa ke Kali Porong.

#### 4. Deformasi geologi

Semenjak tahun 2008 BPLS menyadari bahwa akibat semburan lumpur mengakibatkan deformasi geologi pada daerah sekitar pusat semburan. Deformasi geologi ini dapat berupa amblesan, retakan, uplift maupun timbulnya *bubble-bubble* yang mengandung gas berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Sampai dengan saat ini tercatat jumlah *bubble* yang muncul di luar Peta Area Terdampak 123 buah *bubble* yang termonitor dan dari jumlah tersebut sampai saat ini tercatat masih aktif 12 buah per akhir September 2009. Namun demikian masih perlu diwaspadai *bubble-bubble* tersebut akan aktif kembali di saat

pergantian musim penghujan ke musim kemarau atau terjadi koneksi dengan sumber-sumber gas yang lebih dalam atau terjadi peningkatan tekanan tektonik regional, bisa juga akibat peningkatan aktifitas sistem vulkanik di gunung api aktif di sekitarnya.



*Bubble di pabrik es, Kel. Siring Barat*

Upaya yang dilakukan untuk penanganan *bubble* telah dilakukan oleh BPLS diantaranya membuat konstruksi separator untuk memisahkan lumpur yang keluar dan gas. Diantara *bubble* yang besar terletak pada lokasi PT Lion Steel, pabrik es dan beberapa rumah warga yang kesemuanya berada di Desa Siring Barat.

*Bubble* tersebut sebelum ditangani mempunyai tekanan setinggi 12 meter dan gas metan yang keluar dari *bubble* menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat di sekitar

keluarnya *bubble* sehingga warga Siring Barat pada tiga RT telah diberi santunan sosial berupa uang pindah, uang kontrak rumah dan uang jaminan hidup.

Monitoring dampak deformasi geologi terus dilakukan oleh BPLS antara lain jumlah rumah yang terkena dampak, kerusakan-kerusakan yang diakibatkan fluktuasi tekanan *bubble* dan kondisi bawah permukaan di sekitar pusat semburan dengan menggunakan alat *Ground Penetrating Radar* (GPR). Dari alat ini dapat diketahui kecenderungan tingkat kepadatan lapisan tanah di tempat yang dilakukan pengukuran. Disamping itu juga dilakukan pula pengukuran Titik Tinggi Geodesi (TTG) dan Bench Mark (BM) yang sudah ada untuk mengetahui tingkat penurunan maupun *uplift* tanah di sekitar pusat semburan.

### **Bidang Sosial**

Masalah sosial kemasyarakatan sebagai akibat dari terjadinya semburan dan luapan lumpur yang muncul selama 3 (tiga) tahun terakhir, atau sejak beroperasinya BAPEL – BPLS antara lain:

## 1. Permasalahan Sosial Terkait dengan Landasan Hukum

Batas wilayah populasi penanganan masalah sosial dikategorikan sbb:

a. Wilayah desa terdampak dan terendam luapan lumpur penuh atau sebagian sebagaimana telah ditetapkan oleh Timnas PSLs tanggal 22 Maret 2007 sebagai Peta Area Terdampak, yaitu : Desa (1) Renokenongo, (2) Kedungbendo, (3) Gempolsari, (4) Ketapang, (5) Glagaharum, (6) Kalitengah), (7) Pejarakan, (8), Kedungcangkring, (9) Besuki dan Kelurahan (10) Siring, (11) Jatirejo, (12) Mindi.

b. Wilayah desa di luar Peta Area Terdampak sebagaimana ditetapkan oleh Presiden RI melalui Perpres 48/2008 tanggal 17 Juli 2008, yaitu : Tiga Desa (1) Pejarakan, (2), Kedungcangkring, dan (3) Besuki.

Perpres 48/2008 ini menimbulkan masalah batas wilayah penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar ketiga desa di atas. Secara yuridis maka penanganan masalah sosial kemasyarakatan hanya dapat dilaksanakan di tiga desa tersebut.

c. Wilayah sembilan RT (4 RT di Kelurahan Siring, 2 RT di Kelurahan Jatirejo, dan 3 RT di Kelurahan Mindi) yang disebutkan dalam UU 41/2009 tentang APBN menyebutkan bahwa dana yang tersedia dalam APBN dapat digunakan untuk pemberian bantuan sosial, namun belum jelas tindak lanjut apabila kondisi 9 RT tersebut semakin buruk. Gejala seperti ini sudah tampak di RT 3 Kelurahan Siring.

d. Wilayah lainnya yang secara potensial rawan bencana baik oleh dampak deformasi geologi, luapan air/lumpur, dan pencemaran udara, yaitu : Kelurahan/Desa (1) Gedang, (2) Pamotan, (3) Sentul, (4) Penatar Sewu, (5) Plumbon, (6) Keboguyang.

Desa-desa yang termasuk dalam kategori d, belum ada landasan hukumnya. Namun kondisinya benar-benar memerlukan penanganan.

Bentuk kerawanan bencana pada desa-desa dalam kategori d antara lain:

- Kelurahan Gedang: semburan gas (sekarang tidak aktif), pencemaran air tanah.



*Semburan Siring, 2008*

- Desa Pamotan semburan gas. Terdapat kurang lebih sepanjang 100 m lari tanah di tepi sungai yang muncul semburan gas, dan beberapa rumah yang lantai dan dinding rumahnya retak-retak dan mengeluarkan gas yang sangat mudah terbakar. Selain itu juga terdapat pencemaran air tanah.
- Desa Sentul, Penatar Sewu, dan Plumbon mengalami gagal panen namun sudah terbayar. Buangan air lumpur dianggap warga sebagai penyebab matinya ikan milik petani tambak di desa tersebut.
- Desa Keboguyang merasa tidak aman dari ancaman jebolnya tanggul di Glagaharum dan Besuki, air akan menggenangi desa tersebut.

## 2. Tenggelamnya Makam Umum

Turut tenggelamnya makam umum tidak dapat diabaikan begitu saja karena telah berdampak pada timbulnya kesulitan untuk memakamkan jenazah. Meskipun makam umum pengganti sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tetapi jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal warga di

sekitar peta terdampak sehingga memerlukan alat transportasi dan biaya pemakaman. Tenggelamnya makam ini berdampak pula pada terhalanginya kebiasaan-kebiasaan penduduk untuk mengunjungi atau ziarah kubur. Masih banyak warga yang mempunyai hubungan spiritual religius yang sangat mendalam terhadap makam leluhurnya tersebut mengingat bahwa diantara mereka terdapat nenek moyang yang dianggap sebagai tokoh pendiri desa-desa yang tenggelam.



*Makam di Kel. Siring*

3. Perbedaan Pandang Terhadap Status Tanah Pethok – D atau Letter – C dan SK Gogol

Perpres 14/2007 sudah menetapkan bahwa penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang harus dilakukan oleh PT Lapindo Brantas antara lain membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan **akta jual-beli** kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah. Namun demikian, untuk melaksanakannya ternyata masih ada hambatan.

Salah satu hambatannya yaitu dipermasalahkannya oleh PT Lapindo Brantas tentang bukti kepemilikan yang berupa pethok-D atau letter-C serta ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria tentang larangan bagi Badan Usaha untuk melakukan jual-beli terhadap tanah yang berstatus Hak Milik. Dengan bukti kepemilikan tanah berupa pethok-D atau letter-C, pada hakekatnya statusnya adalah Hak Milik sehingga PT Lapindo Brantas dengan alasan dilarang oleh undang-undang, menolak untuk melakukan akta jual-beli. Terlebih lagi berpedoman pada Perpres 14/2007 yang menyatakan “... *membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo. .... dengan akta jual-beli kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.*”, pihak PT Lapindo Brantas berpendirian hanya akan melakukan **akta jual-beli** terhadap tanah yang sudah bersertifikat karena sudah mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.

Harus diakui bahwa untuk tanah dengan bukti kepemilikan berupa pethok-D, letter-C dan SK Gogol luasnya masih berupa perkiraan karena belum pernah diukur oleh Kantor Pertanahan setempat. Argumentasi PT Lapindo Brantas ini tidak dapat diterima oleh warga dan tetap menuntut agar tidak ada perbedaan perlakuan antara tanah yang sudah bersertifikat maupun tanah yang belum bersertifikat (pethok-D, letter-C dan SK Gogol). Perbedaan pendirian yang tak kunjung mencapai titik temu ini telah memicu timbulnya berbagai unjuk rasa oleh warga korban luapan lumpur.

4. Presepsi diri para korban

Korban luapan lumpur telah mengidentifikasi diri mereka sebagai korban bencana yang berbeda dengan korban bencana alam lainnya. Misalnya korban gempa di Yogyakarta, dan Tsunami di Aceh. Meskipun tidak ada korban jiwa tetapi mereka tetap merasa lebih menderita dibandingkan dengan penderita bencana di dua daerah di atas. Dengan alasan mereka menderita

secara perlahan tetapi pasti yaitu berkembangnya kondisi kesejahteraan mereka yang bertambah buruk, karena menghadapi ketidakpastian. Disamping itu mereka juga menganggap hilangnya tanah tumpah darah mereka untuk selamanya meskipun masih dapat dilihat setiap hari. Hal ini menimbulkan dampak psiko sosial pada warga.

5. Nilai Ganti Rugi yang menggiurkan

Besarnya ganti rugi yang dibayarkan oleh PT Lapindo Brantas kepada warga di dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, ternyata mempunyai “daya tarik” tersendiri bagi warga lainnya. Terbukti dengan munculnya aliansi warga empat desa/kelurahan, yaitu Mindi, Kedungcangkring, Pejarakan, dan Besuki yang menamakan dirinya sebagai GEMPUR-4D yang menuntut desanya dimasukkan juga ke dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 seperti desa-desa lainnya yang sudah ditetapkan di dalam Perpres 14/2007. Alasan mereka bahwa wilayahnya pernah tergenangi luapan lumpur yang mengakibatkan mereka terpaksa mengungsi. Sebenarnya setelah tempat tinggal serta lingkungannya dibersihkan mereka dapat kembali ke rumahnya masing-masing, namun mereka tetap beralasan bahwa tidak lagi merasa aman karena ancaman luapan lumpur yang sewaktu-waktu dapat terjadi.



Kelompok “Gempur 4D” berdemo dengan menutup jalan raya Porong, Februari 2008

Akhirnya dengan pertimbangan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan mekanisme pengaliran lumpur ke kali Porong, Pemerintah memutuskan 3 desa, yaitu desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan, harus dikosongkan dari hunian dengan melakukan jual-beli tanah dan bangunan di wilayah tersebut yang biayanya dibebankan kepada dana APBN. Keputusan tentang hal ini dituangkan ke dalam Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2008. Terbitnya Perpres 48/2008 ini ternyata belum meredakan tuntutan warga, karena desa Besuki yang dimaksud di dalam Perpres 48/2008 hanya desa Besuki yang berada di sebelah barat jalan tol. Karena merasa tuntutannya tidak dipenuhi, warga desa Besuki di sebelah timur jalan tol kembali melakukan unjuk rasa. Mereka berunjuk rasa dengan menutup akses jalan transportasi material untuk pembangunan tanggul penahan lumpur. Akibatnya kegiatan pembangunan tanggul sering mengalami gangguan bahkan tidak jarang mengakibatkan kritisnya kondisi tanggul.

#### 6. Dampak Penurunan Tanah

Disamping dampak luapan lumpur tersebut di atas, semburan juga mengakibatkan timbulnya penurunan tanah yang diikuti dengan munculnya semburan air/lumpur/ gas di pemukiman penduduk. Desa/ kelurahan yang mengalami dampak langsung dari adanya penurunan tanah yang berupa munculnya *bubble gas*, yaitu di Mindi, Siring, Jatirejo, Pamotan, Gedang. Sedangkan hampir semua desa/ kelurahan di luar desa yang sudah tergenangi lumpur, mengalami pencemaran air tanah dalam bentuk perubahan warna, rasa, dan kepekatannya. Bentuk lain dari dampak penurunan tanah adalah dinding dan lantai rumah yang retak-retak. Akibat yang paling parah terjadi di Siring dan Jatirejo.



*Munculnya bubble di Rumah Okky Kel. Siring menenggelamkan rumah*

Dengan demikian warga desa/kelurahan di atas mengalami gangguan dari berbagai aspek, yaitu keamanan bangunan, ketersediaan air bersih, banjir, gangguan pernapasan, dan kemungkinan terjadinya kebakaran karena keluarnya gas yang mudah terbakar dari retakan tanah. Akibat dari situasi ini mereka menuntut wilayahnya dimasukkan ke dalam Peta Area Terdampak dan menuntut pula diperlakukan sama dengan perlakuan terhadap 3 desa yang sudah ditetapkan di dalam Perpres 48/2008. Nampaknya warga di desa ini dalam memperjuangkan tuntutan mereka telah belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh warga 3 desa sebelumnya. Untuk memperoleh perhatian dari Pemerintah dalam memperjuangkan tuntutan mereka, mereka juga melakukan unjuk rasa dengan cara menutup jalan raya Porong yang mengakibatkan tertutupnya jalur lalu lintas.

#### 7. Unjuk Rasa

Situasi dan kondisi sosial demikian kacau dan panas akibat dipicu oleh kepanikan dan ketidakpastian bentuk penanganan, terutama yang terkait dengan masalah ganti rugi atas hak milik, kelanjutan kerja, pendidikan atau proses belajar anak-anak, hilangnya penghasilan atas sawah/tanaman siap panen yang hancur, dan masalah sosial lainnya.

Rentetan masalah di atas mendorong warga untuk melaksanakan berbagai unjuk rasa menuntut pemulihan kembali hak mereka. Warga membentuk kelompok-kelompok untuk mewakili kepentingan mereka dalam masalah ganti rugi. Ciri-ciri perilaku kelompok ini dalam melaksanakan unjuk rasa atau melakukan dialog adalah keras, memaksakan kehendak, terkadang kasar serta kurang rasional, sehingga kelompok tersebut yang pada dasarnya merupakan kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) berubah menjadi kelompok penekan (*pressure group*). Musyawarah mufakat hampir tidak pernah dapat berlangsung secara kekeluargaan karena targetnya adalah diterimanya tuntutan mereka.

Selama tahun 2007 berdasar data dari Kepolisian Sidoarjo telah terjadi 82 kali unjuk rasa, sedangkan pada tahun 2008 terjadi 42 kali unjuk rasa. Bentuk unjuk rasa yang paling sering dilakukan adalah menutup jalan raya Porong serta jalan Kereta Api yang melintas kota Porong sehingga menimbulkan kemacetan yang berlangsung berjam-jam bagi lalu lintas dari Surabaya ke wilayah bagian timur Jawa Timur dan sebaliknya.

Hal inilah yang berpengaruh pada perkembangan ekonomi makro. Banyak industri manufaktur yang berada di Malang, Pasuruan, dan daerah lain di Jawa Timur, bahkan di kecamatan lain di Sidoarjo yang terdampak

kemacetan Jalan Raya Porong. Tidak jarang mereka melakukan unjuk rasa dengan cara menutup jalur angkutan material untuk kegiatan pembangunan tanggul dengan cara menghalangi truk pengangkut sirtu. Ini memang merupakan senjata paling ampuh bagi mereka untuk memaksakan kehendak. Unjuk rasa tidak cukup mereka lakukan hanya di Porong, namun mereka juga melakukannya di beberapa tempat di Jakarta, antara lain di depan Istana Negara serta di daerah Tugu Proklamasi Jakarta sehingga telah mengundang perhatian banyak pihak.

#### 8. Perilaku Konsumtif

Terpicunya perilaku konsumtif sebagian warga yang membelanjakan uang yang diterimanya dari uang bantuan sosial dan uang muka 20% jual beli tanah dan bangunan untuk hal-hal yang tidak mengarah kepada perolehan rumah pengganti melainkan digunakan untuk membeli sepeda motor, mobil bahkan ada yang menikah lagi. Akibatnya pada saat uangnya sudah habis sedangkan pembayaran sisa 80% belum diterima, mereka menjadi kebingungan dan sering melakukan unjuk rasa untuk menuntut segera dibayarkannya sisa 80% untuk membeli tanah dan rumah.

#### 9. Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap PT Minarak Lapindo Jaya

Krisis keuangan global yang melanda dunia sejak Oktober 2008 telah berdampak pula pada kondisi likuiditas keuangan PT Minarak Lapindo Jaya yang akibatnya pelaksanaan pembayaran jual-beli tanah dan bangunan, baik penyelesaian pembayaran uang muka 20% maupun pelunasan 80%, menjadi tersendat. Akibat selanjutnya, pembayaran beberapa berkas permohonan yang belum dibayar uang muka 20% serta pembayaran pelunasan 80% terpaksa dibayarkan dengan dicicil, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan PT Minarak Lapindo Jaya. Skema yang ditawarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya ini ditolak oleh warga dengan alasan bahwa tawaran ini tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Perpres 14/2007. Unjuk rasa demi unjuk rasa yang menolak keputusan PT Minarak Lapindo Jaya ini tidak dapat dihindarkan, bahkan unjuk rasa oleh sekitar 3000 warga telah dilakukan pula di depan Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 3 Desember 2008.

Menanggapi unjuk rasa tersebut, pada tanggal 3 Desember 2008 telah diadakan perundingan antara perwakilan warga dengan pihak PT Minarak Lapindo Jaya yang difasilitasi oleh Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial dan Menteri Sumber Daya Energi dan Mineral. Hasil perundingan disepakati bahwa warga bersedia menerima pembayaran pelunasan 80% dengan dicicil sebesar Rp 30 juta/ bulan.

Namun dalam pelaksanaannya, dengan alasan terus merosotnya kemampuan keuangan, PT Minarak Lapindo Jaya tidak dapat memenuhi kesepakatan tersebut dan menyatakan bahwa hanya sanggup untuk membayar cicilan sebesar Rp 15 juta/bulan. Keadaan ini telah memicu timbulnya unjuk rasa kembali dengan skala yang cukup besar di saat meningkatnya suhu politik di Jawa Timur yang sedang menanti hasil perhitungan suara Pilgub putaran kedua.

Dengan difasilitasi kembali oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS dan beberapa menteri anggota Dewan Pengarah BPLS serta melibatkan Kapolri, pada tanggal 20 Februari 2009 telah diadakan pertemuan kembali antara perwakilan warga dengan pihak PT Lapindo Brantas/PT Minarak Lapindo Jaya di Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bahwa pihak PT Lapindo Brantas tetap berjanji menuntaskan pembayaran 80% namun karena kondisi keuangannya sedang mengalami kesulitan likuiditas maka penyelesaiannya hanya mampu dilakukan dengan cara dicicil sebesar Rp.15.000.000,-/berkas/bulan yang pembayarannya akan disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Harus diakui bahwa keputusan ini tidak akan dapat memuaskan semua pihak namun disadari bahwa keputusan ini merupakan langkah yang paling mungkin untuk dilaksanakan oleh pihak PT Lapindo Brantas/PT Minarak Lapindo Jaya.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan warga tersebut ternyata tidak semua peserta pertemuan dapat menerima keputusan tersebut. Akibatnya mereka masih terus menuntut agar PT Lapindo Brantas/PT Minarak Lapindo Jaya memenuhi kesepakatan 3 Desember 2008.

Perkembangan penanganan masalah perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas adalah sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 351 berkas permohonan warga belum dilakukan pembayaran uang muka 20% dengan perkiraan nilai nominal 20% sebesar Rp. 16.130.288.400,-. Warga mendesak untuk segera dilakukan tindak lanjut terhadap berkasnya.
- 2) Terhadap permasalahan ini, Bapel BPLS selalu khawatir tentang **keamanan tanggul** di desa Glagaharum karena hingga saat ini, para pegogol yang tanahnya sudah dibangun tanggul, belum mendapatkan pembayaran 20%. Hal ini dapat menjadi potensi akan adanya perbuatan anarkis dari pegogol.
- 3) Berkas permohonan B to B atas nama H. Hasan Kedungbendo dan beberapa pengusaha yang tergabung dalam GPKLL, masih belum tuntas pembayarannya. Terhadap permasalahan ini, Bapel BPLS mengalami

hambatan dalam membangun tanggul di desa Kedungbendo karena dihalang-halangi oleh H. Hasan.

- 4) Masih terdapat berkas permohonan warga sebanyak 81 berkas yang telah jatuh tempo pembayaran 80%, hingga saat ini belum menerima pembayaran/cicilan.
- 5) Terhadap permasalahan ini, Bapel BPLS juga mengalami hambatan dalam membangun tanggul di desa Kedungbendo karena dihalang-halangi oleh warga yang belum menerima pembayaran 80%.
- 6) Masih terdapat kurang lebih 100 bidang tanah yang hingga saat ini tidak mengajukan permohonan jual beli karena warisan leluhur. Namun demikian, mereka mempertanyakan bagaimana proses pengantiannya.

### **Bidang Infrastruktur**

Permasalahan dalam bidang infrastruktur dapat digambarkan melalui kondisi/keadaan sebagai berikut:

#### **1. Ancaman Luapan Lumpur Melimpas dan Meluas**

Pada awal tugas Bapel - BPLS, tinggi tanggul penahan lumpur masih terbatas karena elevasi tanggul belum mencapai elevasi yang seharusnya dan banyak lokasi rencana tanggul yang belum terbangun (sebagian lokasi tanggul masih dalam tahap pengerjaan dan belum tersambung dengan tanggul lainnya) serta luapan lumpur belum terkendali sehingga lumpur rawan melimpas.

Sampai dengan akhir bulan September 2009, masih ada lokasi yang belum dapat dibangun, yakni di lokasi untuk tanggul luar di sisi utara di Desa Kedungbendo. Hal ini disebabkan karena adanya larangan oleh warga setempat yang belum menerima 20% nilai pembayaran jual beli tanah dengan PT Lapindo Brantas.



*Tanggul penahan lumpur masih terbatas*



*Pembangunan tanggul di Desa Kedungbendo yang terhenti akibat resistensi warga*

Kondisi demikian dapat menyebabkan lumpur melimpas dan infrastruktur vital berupa jalan kereta api dan jalan arteri yang menghubungkan Surabaya dengan Malang dan Banyuwangi melalui Porong dapat terganggu bahkan terputus akibat luapan lumpur.

Ancaman luapan lumpur semakin kritis terjadi mulai bulan Nopember 2008 karena kinerja operasi pompa mengalirkan lumpur ke Kali Porong yang seharusnya maksimal justru merosot akibat kemampuan likuiditas PT Lapindo Brantas yang terpengaruh oleh krisis keuangan global.

Dalam perencanaan, kesempatan untuk memompa secara maksimal dilakukan pada musim hujan. Hal ini dimaksudkan agar lumpur langsung hanyut ke laut, sekaligus untuk menyiapkan ruang untuk menampung lumpur pada musim kemarau. Dengan pola ini, maka pengaliran lumpur pada musim kemarau dapat dibatasi, karena debit Kali Porong sangat kecil, bahkan nol. Kenyataan di lapangan, hal ini tidak dapat dicapai karena merosotnya kinerja operasi pompa



*Kondisi tanggul yang rawan limpas*

mengalirkan lumpur ke Kali Porong sehingga lumpur dapat meluap melewati PAT.

Fakta ini menunjukkan bahwa kondisi luapan lumpur benar-benar masih belum terkendali, sehingga memerlukan tindakan penanganan segera dan tidak dapat ditunda-tunda dalam rangka untuk keselamatan masyarakat dan melindungi infrastruktur yang berada di dekatnya.

## **2. Sensitivitas Pemilihan Penanganan Luapan Lumpur Secara Permanen**

Sampai saat ini masih terjadi pro-kontra penggunaan Kali Porong sebagai media pengaliran lumpur ke laut. Ada pihak yang setuju karena mempertimbangkan alur Kali Porong telah tersedia, daya air Kali Porong yang sangat besar di musim hujan dan biaya operasi dan pemeliharaan yang tidak besar. Masyarakat yang tidak setuju sangat khawatir terhadap kemungkinan endapan lumpur yang mengeras akan menyebabkan kapasitas Kali Porong menurun dan mengganggu aliran banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Brantas sehingga dapat mengakibatkan banjir di Sidoarjo, Mojokerto dan bahkan Surabaya.

Sebagaimana diketahui, BPLS bekerja berdasar Perpres Nomor 14 Tahun 2007, dimana lumpur harus dialirkan ke laut melalui Kali Porong. Pada awal BPLS bekerja, dengan mencermati kondisi yang dihadapi, yakni semburan masih terus berlangsung, luapan lumpur belum terkendali, kesiapan pembuangan lumpur ke dan di Kali Porong masih ditangani secara parsial, maka dilakukan studi untuk memilih alternatif yang memiliki teknis handal, ekonomis biayanya, serta memperhitungkan resiko lingkungan yang terkecil. Hasilnya setelah dipaparkan kepada Presiden RI bersama 11 (sebelas) menteri di Bandara Juanda pada tanggal 25 Oktober 2007, maka ditetapkan Rencana Induk Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Rencana Induk ini meliputi rencana penanganan luapan lumpur sejak dari kolam penampungan lumpur sampai ke laut melalui Kali Porong, termasuk rencana penanganan infrastruktur wilayah sekitar semburan. Sebelum sampai ke laut, lumpur masih memiliki potensi menimbulkan bencana, sehingga diperkirakan lumpur benar-benar terkendali setelah seluruh rencana induk terealisasikan.

Selain penyiapan rencana induk tersebut, langkah prioritas yang dilakukan oleh Bapel - BPLS adalah melakukan peninggian dan penguatan tanggul penahan lumpur pada lokasi tanggul Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (Timnas PSLS) yang masih rendah atau belum tersambung. Langkah ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang paling mungkin dikerjakan dengan tingkat gangguan



*Demo dan blokade warga yang menghalangi pekerjaan pembangunan tanggul*

masalah sosial kemasyarakatan relatif kecil. Namun demikian kegiatan pekerjaan tanggul sering menghadapi gangguan berupa adanya aksi demo dan blokade oleh warga yang menyampaikan aspirasi menuntut pembayaran *cash and carry* dan juga oleh adanya ancaman lumpur meluap di atas tanggul yang sedang dikerjakan.

Di satu pihak kinerja pengaliran lumpur ke Kali Porong oleh PT Lapindo Brantas yang tidak optimal menyebabkan kolam semakin penuh, tetapi di lain pihak semakin banyak lumpur mengendap di Kali Porong sehingga meresahkan masyarakat.

Belum sampai dikerjakan sesuai elevasi rencana, tanggul sisi barat yang melindungi infrastruktur dan tanggul sisi timur yang melindungi wilayah permukiman, mengalami deformasi geologi berupa amblesan, sehingga harus dipertahankan dengan meninggikan tanggul tersebut. Secepatnya Bapel - BPLS mulai merintis pembuatan tanggul penahan lumpur terluar pada batas PAT. Kegiatan ini tidak mudah diwujudkan karena pembayaran jual-beli tanah dan bangunan oleh PT Lapindo Brantas tidak lancar atau belum ada realisasinya. Penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang menjadi tugas PT Lapindo



*Blokade tanggul Renokenongo*



*Demo dan blokade menolak pembuangan lumpur ke Kali Porong pada bulan Oktober 2007 (kiri) dan Oktober 2008 (kanan)*

Brantas ada kalanya kurang memenuhi harapan warga sehingga mewarnai dinamika dan menjadi hambatan dalam kegiatan pelaksanaan tanggul penahan lumpur.

Untuk mencegah lumpur meluap ke luar dari PAT, lumpur yang ditampung di kolam penampung lumpur harus dikeluarkan dengan dialirkan ke Kali Porong. Dengan demikian wilayah PAT tidak semakin luas dan tanggul penahan lumpur tidak semakin tinggi. Akibat dari dilakukannya pengaliran lumpur ke Kali Porong adalah endapan menumpuk semakin banyak dan mengeras.

Dengan adanya endapan yang mengurangi luas penampang basah sungai atau dengan kata lain menyebabkan kapasitas Kali Porong turun dari 1.600 m<sup>3</sup>/det menjadi 200 m<sup>3</sup>/det, masyarakat sepanjang Kali Porong menjadi resah. Masyarakat dan pengelola Kali Porong sangat khawatir, endapan lumpur akan menyumbat aliran banjir Kali Porong yang berfungsi sebagai *floodway* sistem pengendalian banjir DAS Kali Brantas, sehingga potensial menimbulkan bencana banjir.

Langkah mendesak yang dilakukan Bapel - BPLS adalah mengerahkan peralatan berupa kapal keruk dan *exca-ponton* untuk mengurai endapan yang sudah terlanjur mengeras dan menyiapkan alur untuk mengalirkan debit sungai. Semakin besar debit banjir, akan semakin efektif upaya penggelontoran lumpur ke hilir menuju laut yang berjarak 18 km. Pada saat debit kecil, umumnya hanya lumpur halus yang terbawa, butiran kasar akan ikut hanyut pada debit di atas 600 m<sup>3</sup>/det.



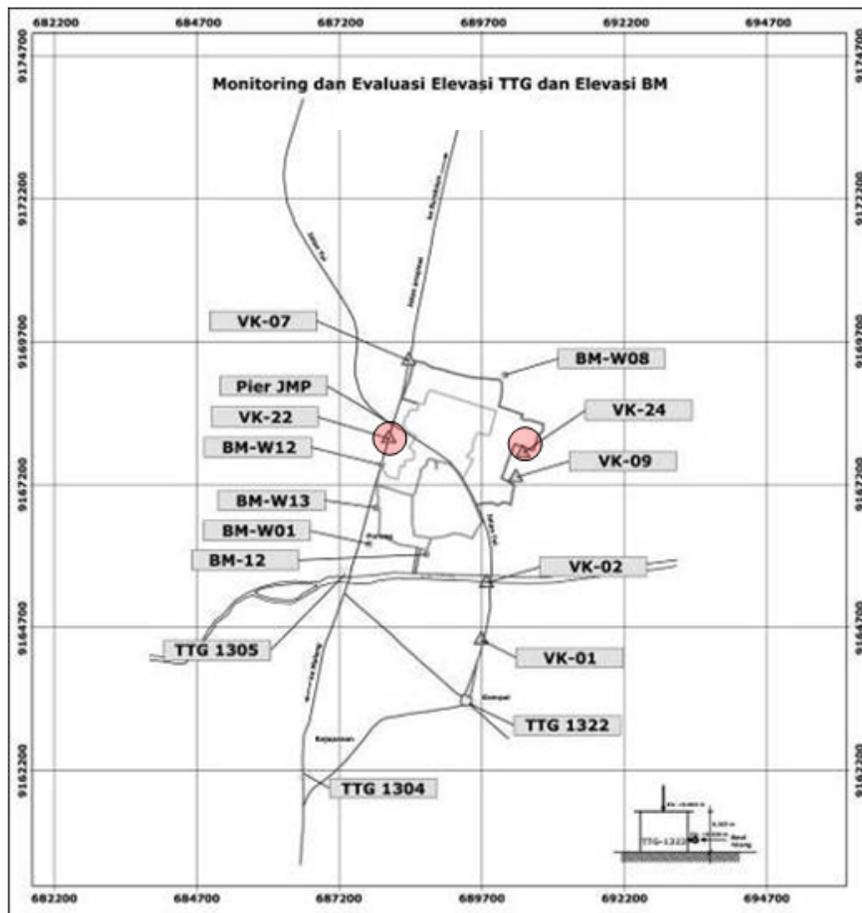
*Endapan lumpur di  
hulu spillway  
(KP160) di Kali  
Porong (kiri) dan  
kegiatan agitasi  
endapan lumpur  
(kanan)*

Kali Porong sebagai *floodway* sistem pengendalian banjir DAS Kali Brantas harus dijaga kondisi dan fungsinya untuk dapat mengalirkan debit banjir dengan kala ulang 50 tahun ( $Q_{50}$ ) sebesar  $1.600 \text{ m}^3/\text{detik}$ . Kegiatan perbaikan kondisi tanggul dengan memasang perkuatan tebing terhadap ancaman tergerus dan longsor dapat meredakan kekhawatiran masyarakat atas adanya tambahan beban Kali Porong selain sebagai prasarana banjir juga media pengangkutan endapan lumpur ke laut.

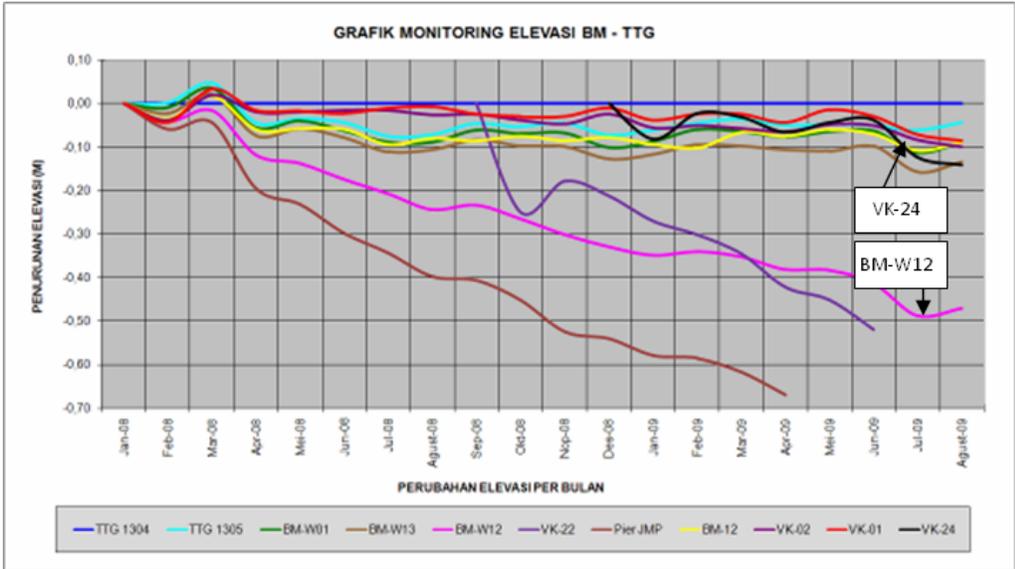


Reaktifasi sesar Watukosek masih akan terus berlanjut dan menimbulkan deformasi geologi di permukaan yang berpengaruh pada infrastruktur dan rumah-rumah termasuk tanggul penahan lumpur. Kerusakan pada tanggul akan dapat mengakibatkan lumpur di kolam melimpas keluar menggenangi infrastruktur dan permukiman yang berada di sekitarnya. Diperlukan pemantauan dan evaluasi atas setiap perkembangan wilayah pengaruh deformasi geologi untuk mengambil langkah-langkah antisipasi penanggulangannya.

Fenomena *subsidence* masih selalu mempengaruhi kondisi tanggul dan infrastruktur sekitar semburan. Pengamatan atas *subsidence* yang terjadi di wilayah kerja BPLS dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi elevasi patok Tanda Tinggi Geodesi (TTG) dan *Bench Mark* (BM) yang lokasinya tersebar.



Peta lokasi TTG dan Benchmark (BM) referensi



Grafik monitoring perubahan elevasi titik BM dan TTG

Pengaruh fenomena *subsidence* nampak jelas pada penurunan tanggul penahan luapan lumpur di beberapa lokasi, antara lain di:

- Lokasi Tanggul P16 – P11 – P10 – P70 seperti nampak dalam foto berikut ini:



Pengaruh *subsidence* pada tanggul penahan luapan lumpur di P16 – P11 – P10 – P70

- Lokasi Tanggul P1 – P4 – P61A – P67 seperti nampak dalam foto berikut ini:



*Pengaruh subsidence pada tanggul penahan luapan lumpur di P1 – P4 – P61A – P67*

Pada bulan Maret 2009, akibat *subsidence*, tanggul Osaka - Siring (P71 – P21) menjadi miring ke arah pusat semburan, sehingga lereng tanggul yang semula mempunyai kemiringan 1 : 1,25 berubah menjadi tegak dan menyebabkan lereng tanggul tidak stabil kemudian longsor. Penanganan dilakukan yaitu dengan membuat turap kayu ganda sebagai *counter weight* (bokongan) dengan lebar 1,50 m yang berfungsi sebagai penahan. Pekerjaan ini sekaligus mengembalikan kemiringan lereng tanggul menjadi seperti semula 1 : 1,25 dan mengembalikan elevasi tanggul ke elevasi +11,00 m untuk menurunkan kondisi Tinggi Jagaan Luapan Lumpur dari “Siaga” menjadi “Normal” (tinggi jagaan/*waking* minimal menjadi 4,00 m terhadap muka lumpur).



*Tanggul Osaka - Siring sebelum, dalam proses dan sesudah perbaikan*



Pembongkaran bekas jembatan jalan tol

Akibat *subsidence*, jembatan bekas tol yang masih tersisa, sebagian dibongkar oleh PT Jasa Marga mulai tanggal 4 Mei 2009.

Pada tanggal 24 Juni 2009 sekitar pukul 03:00 WIB dini hari, dilaporkan bahwa tanggul di titik P79 ambles sepanjang sekitar 180 m dengan amblesan maksimum lebih dari 3,00 m, namun air belum sampai meluap dan *waking*/tinggi jagaan tersisa  $\pm 0,50$  m. Sepanjang badan tanggul banyak dijumpai retakan yang berarah timur laut – barat daya. Retakan-retakan (*crack*) tersebut membagi badan tanggul menjadi beberapa bagian, dengan arah pergerakan dominan turun (*subsidence*) dan bergeser (*horizontal displacement*). Pergerakan-pergerakan tersebut mengakibatkan tanah sawah di sisi sebelah utaranya mengalami “*slumping*” dan terangkat.

Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, segera dilakukan perbaikan tanggul yang ambles. Perbaikan dilakukan dengan mengupas bagian yang retak/patah kemudian dilakukan penimbunan kembali lapis demi lapis sesuai dengan spesifikasi teknis. Ketika perbaikan hampir diselesaikan, pada tanggal 3 Juli 2009 di lokasi tersebut terjadi amblesan lagi sebesar 75 cm. Pada tanggal 5 Juli 2009, tanggul di lokasi P76 juga mengalami amblesan pada El. +4,00 m dan + El. 8,00 m serta bergeser ke arah luar (utara).

Amblesnya tanggul di lokasi P79 akibat *subsidence* (1)



*Amblesnya tanggul di lokasi P79 akibat subsidence (2)*



*Perbaikan tanggul di lokasi P79 yang ambles (atas) dan tanggul selesai diperbaiki (bawah)*



Pada tanggal 3 Agustus 2009 pukul 15:00 WIB terjadi amblesan di lokasi P77 – P78 seperti halnya di lokasi P78 – P79 yang menyebabkan tanggul terbelah dan tanah di hilir tanggul terangkat.



Tanggul di lokasi P77 - P78 yang ambles

Setelah kejadian amblesan seperti tersebut di atas, pada tanggal 10 Agustus 2009 pukul 20:00 WIB terjadi amblesan lagi di lokasi P76 – P77 sepanjang  $\pm$  200 m dengan kedalaman 3,00 m yang menyebabkan tanggul terbelah dan tanah di hilir tanggul terangkat. Tinggi jagaan hanya tersisa 0,50 m dan pada malam itu juga dilakukan penanganan segera untuk memulihkan kondisi tanggul dan menambah tinggi jagaan.



*Tanggul di lokasi P76 – P77 yang ambles (1)*

Karena deformasi geologi, ada beberapa tanggul penahan luapan lumpur yang ambles dan lumpur meluap sehingga tanggul tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi.



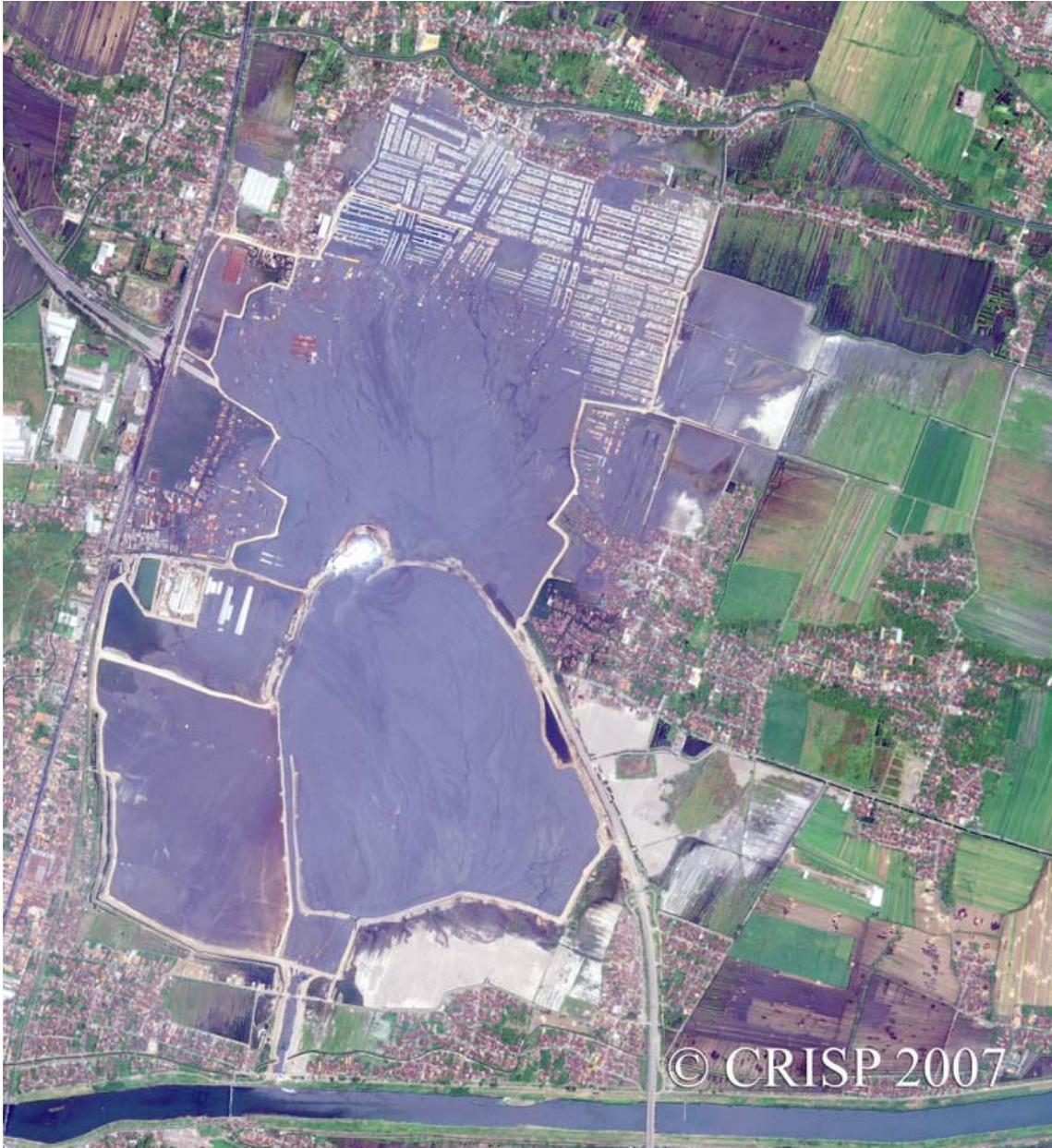
*Amblesnya tanggul P11 – P16*



*Amblesnya tanggul P1 – P4*

#### 4. Dampak Aliran Lumpur ke Utara

Rendahnya kinerja pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong melalui stasiun pompa di titik P36 dan P41 menyebabkan aliran lumpur panas dari pusat semburan dominan ke utara. Sebagian lumpur yang seharusnya dibuang ke Kali Porong justru mengendap di kolam selatan. Kondisi ini menyebabkan muka endapan lumpur di kolam Siring, PerumTAS-1, Glagaharum dan Renokenongo bertambah tinggi, padahal sebagian tanggul mengalami *subsidence*, sehingga lumpur rawan melimpas keluar PAT serta mengancam jalan kereta api serta jalan arteri Porong. Untuk keselamatan masyarakat serta mencegah bencana dan kerugian negara/masyarakat yang lebih besar, Bapel BPLS melakukan upaya Mitigasi Luapan Lumpur.



*Citra satelit 11 Mei 2007*



© CRISP 2009

Citra satelit 30 September 2009



*Lumpur terancam melimpas di tanggul Renokenongo*



*Lumpur terancam melimpas di tanggul Osaka – Siring*



*Operasi dredger dan excavator di tanggul Renokenongo*

Pasca kehancuran tanggul cincin dan setelah dipastikan deformasi di pusat semburan sangat intensif, maka diputuskan tanggul cincin tidak mungkin dibangun kembali. Dalam kondisi demikian, seluruh luapan lumpur akan mengalir ke utara memenuhi kolam PerumTAS-1, Siring, Glagaharum dan Renokenongo, sehingga seluruh tanggul penahan luapan lumpur statusnya berubah menjadi tanggul utama.

Sejak terjadi krisis finansial global, kemampuan likuiditas PT Lapindo Brantas menjadi sangat terbatas, sehingga kinerja pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong mengalami penurunan tajam. Karena semburan tetap akan terus berlangsung, tanggul tidak mungkin terus ditinggikan. Agar ancaman luapan dapat dikendalikan, maka upaya mengalirkan lumpur ke Kali Porong harus ditingkatkan dengan melakukan mitigasi.

Mitigasi yang telah dilakukan Bapel – BPLS dengan mengerahkan peralatan pompa lumpur dan kapal keruk milik Departemen Pekerjaan Umum adalah untuk mengatasi keadaan sewaktu-waktu luapan lumpur dalam status waspada. Namun dengan makin berkurangnya jumlah pompa PT Lapindo Brantas dan juga



*Operasi pompa booster*

makin seringnya pompa-pompa tidak beroperasi, maka kondisi di kolam lumpur sering mengalami status bahaya. Jumlah peralatan mitigasi perlu ditambah jumlahnya, bila perlu Bapel – BPLS melakukan pengadaan peralatan baru yang sesuai untuk penanganan lumpur panas.

Pengaliran lumpur ke Kali Porong, saat ini belum menggunakan pola operasi dengan prinsip pola maksimal pada musim penghujan dan pola minimal pada musim kemarau untuk mencegah ancaman keselamatan masyarakat, baik pada wilayah di luar PAT maupun pada Kali Porong. Pola operasi ini baru akan terwujud paling cepat pada tahun 2011.

Bapel - BPLS dihadapkan pada situasi yang dilematis. Melakukan tindakan mitigasi bisa dinilai membantu tugas PT Lapindo Brantas, namun bila diam saja bisa dinilai lalai dalam menjalankan tugas menanggulangi bencana lumpur Sidoarjo.

##### **5. Tersendatnya Pembangunan Relokasi Infrastruktur**

Jalan arteri Porong yang terletak di dekat pusat semburan, selain mengalami deformasi geologi, juga rawan terhadap ancaman bencana luapan lumpur. Untuk mencegah kerugian negara/masyarakat yang lebih besar, diperlukan relokasi infrastruktur untuk mengganti jalan tol dan jalan arteri Porong. Sebagai langkah prioritas, BPLS menangani peninggian jalan arteri Porong sebagai akses utama yang menghubungkan Kota Surabaya – Malang dan Surabaya – Pasuruan – Banyuwangi serta peningkatan jalan alternatif Kepadangan – Krembung – Jasem (Ngoro) yang aman dari ancaman luapan lumpur dan dapat mengurangi beban

lalu lintas jalan arteri Porong sebelum pembangunan relokasi jalan arteri dan tol selesai.

Percepatan pemulihan infrastruktur jalan arteri dan jalan tol tersebut sangat tergantung tersedianya lahan yang bisa dibebaskan dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2009, tanah sawah di seluruh desa telah sepakat untuk mendapatkan ganti rugi dengan harga Rp 120 ribu/m Untuk tanah darat/kering belum seluruhnya sepakat karena ada beberapa warga yang menuntut harga tanah darat/ kering sama dengan harga ganti rugi oleh PT Lapindo Brantas, yang melampaui harga *Tim Appraisal*



*Musyawaharah kesepakatan harga ganti rugi tanah*

Progres fisik sampai dengan akhir tahun anggaran 2009 diharapkan dapat mencapai 4.297 m atau  $\pm 30,47\%$  karena tersendatnya proses pembebasan lahan yang tidak dapat dilakukan secara serentak. Pada lahan yang mestinya sudah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan, masih terdapat beberapa bidang tanah di dalamnya yang belum bebas sehingga mengganggu akses logistik/material pembangunan.

### **Bidang sekretariat/kelembagaan**

Sekretariat Bapel-BPLS, yang salah satu tugas pokoknya antara lain menyelenggarakan administrasi umum dan ketatalaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bapel-BPLS, pada awal beroperasinya Bapel-BPLS dan selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan tugas, menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

#### **A. Penataan Kelembagaan**

##### **1. Sulitnya mendapatkan pegawai yang professional dan sudah berpengalaman.**

Pada awal berdirinya BPLS, dengan bekal Peraturan Presiden Nomor 14/2007 dan Keputusan Presiden Nomor 31/2007, 6 pejabat pimpinan Bapel-BPLS hanya dibantu oleh 4 orang yaitu 2 orang dari Ditjen SDA untuk menangani infrastruktur dan luapan lumpur serta bidang pendanaan, dan 2 orang dari Perum Jasa Tirta I untuk menangani perencanaan infrastruktur dan bidang SDM, sarana dan prasarana. Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas tersebut tidak memungkinkan untuk dapat segera melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Bapel-BPLS.

Mengingat setelah dilakukannya serah terima dari Timnas PLS kepada Bapel-BPLS pelaksanaan tugas operasional penanggulangan bencana semburan dan luapan lumpur secara otomatis menjadi tanggung jawab Bapel-BPLS, maka Bapel-BPLS dihadapkan pada kebutuhan untuk bisa segera mendapatkan tenaga profesional yang berpengalaman untuk berbagai bidang, baik untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun untuk pelaksanaan tugas-tugas administrasi.

Dengan hanya ada 1 orang tenaga yang menangani bidang sumber daya manusia dan penanganan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana kantor, maka pengadaan tenaga profesional dan berpengalaman pada awal beroperasinya Bapel-BPLS tidak dapat segera dilaksanakan. Di samping itu, pada awal beroperasinya Bapel-BPLS tersebut, belum ada kejelasan tentang sistem penggajian, perkiraan besaran gaji/honorarium yang akan diterima pegawai dan fasilitas yang dapat diberikan oleh Bapel-BPLS kepada tenaga profesional yang bersangkutan.

Meskipun pada waktu itu belum ada kejelasan tentang sistem penggajian dan besaran gaji/honorarium yang akan diberikan kepada calon pegawai Bapel-BPLS, pengadaan pegawai yang memiliki kompetensi yang diperlukan, siap untuk langsung dipekerjakan, dan mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan, tetap harus dilaksanakan segera, khususnya untuk calon yang diseleksi dan berasal dari jajaran instansi yang tugas dan fungsinya memiliki kompetensi yang diperlukan.

Dalam perjalanannya, kebutuhan tenaga profesional yang berpengalaman dengan status pegawai negeri sipil (PNS) yang diperoleh secara diperbantukan dari instansi lain ternyata dalam pembinaan kepegawaian mengalami kendala terkait dengan peraturan yang diterbitkan oleh instansi/daerah yang bersangkutan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar pegawai yang bersangkutan tetap memperoleh hak-haknya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007.

Setelah 3 tahun berjalan, masih ada jenjang jabatan tertentu yang belum dapat diisi pejabatnya karena belum diperolehnya tenaga yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan tersebut. Di samping itu, karena adanya keterbatasan

tersebut, berakibat pada masih adanya pengisian jabatan tertentu yang belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi untuk jabatan yang bersangkutan.

## **2. Adanya tuntutan reformasi birokrasi dengan bentuk organisasi yang ramping struktur tapi kaya fungsi**

Sebagai badan baru yang bersifat *ad hoc* Bapel-BPLS dituntut untuk membentuk kelengkapan organisasi yang ramping struktur tapi kaya fungsi. Tuntutan ini dapatlah dipahami, agar pada saatnya nanti banyaknya pegawai tidak akan menjadi beban bagi Bapel-BPLS.

Pada awal beroperasinya Bapel-BPLS penyusunan kelengkapan organisasi tidaklah dapat dilakukan dengan melihat dan mencontoh bentuk organisasi atau badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah, mengingat organisasi Bapel-BPLS adalah organisasi yang sifatnya "sementara" dan nonstruktural, yang lingkup tugasnya bersifat khusus serta belum pernah ada padanannya. Meskipun demikian, dengan memperhatikan susunan organisasi yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007, dan mengingat Kepala Bapel ditetapkan juga sebagai Pengguna Anggaran, maka pengembangan susunan organisasi yang ada harus dapat menampung tugas yang dibebankan dan memiliki jenjang jabatan yang diperlukan dalam memenuhi ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan anggaran.

## **3. Belum tersedianya kantor yang representatif dan kelengkapan sarana prasarana pendukungnya**

Dengan mulai beroperasinya Bapel-BPLS segera setelah serah terima dengan Timnas PSLs, diperlukan kantor yang representatif untuk tempat mulai bekerja beserta prasarana dan sarannya. Pada waktu itu belum ada kepastian di mana Bapel-BPLS akan berkantor secara permanen mengingat belum ada satupun tempat yang dialokasikan sebagai kantor Bapel-BPLS.

Sambil menunggu mendapatkan kantor dan sarana kerja yang sesuai, Bapel-BPLS berkantor sementara di Somerset Hotel & Apartemen untuk Kantor Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi Bidang Operasi serta 2 pegawai yang menangani SDM dan pendanaan. Untuk Deputi Bidang Infrastruktur dipinjami Mess Perum Jasa Tirta I yang berada Jl. Karah No. 5 Gunungsari Surabaya.

Dengan kondisi kantor yang terpencar-pencar tersebut menimbulkan permasalahan dalam melakukan koordinasi. Untuk mengatasinya koordinasi terpaksa dilakukan melalui komunikasi telepon, meskipun kadang-kadang harus dengan menggunakan telepon seluler. Akibat kantor yang terpencar-pencar tersebut, diperlukan pula alat transportasi (kendaraan) untuk memudahkan pelaksanaan tugas,

namun pada waktu itu kendaraan operasional belum tersedia. Untuk mengatasi kebutuhan kendaraan operasional, dilakukan dengan meminjam dari instansi induk di mana pegawai berasal, pinjam kendaraan dari instansi lain, dan bahkan dengan memakai kendaraan pribadi pegawai.

Pada saat ini ruang kantor BAPEL-BPLS masih belum dapat berkumpul pada satu lokasi, dan setidaknya tersebar di 9 (sembilan) lokasi gedung/rumah yang terpisah, dengan status pinjam pakai 4 (empat) gedung/rumah dan dengan status sewa untuk 5 (lima) gedung/rumah.

#### **4. Masih adanya Persepsi/opini negatif dari warga terdampak dan media massa terhadap Bapel-BPLS**

Ketika awal terjadinya semburan lumpur panas yang menggenangi sejumlah pabrik, rumah dan lahan warga di 12 Desa, Dimana situasi ini telah memaksa warga untuk pergi meninggalkan tempat tinggalnya menuju lokasi pengungsian atau mengontrak rumah. Juga hilangnya pekerjaan, dan mata pencarian, sehingga menimbulkan rasa frustrasi pada sebagian warga. Akibat dari kondisi ini tekanan warga terdampak lumpur menjadi sangat tinggi kepada Bapel-BPLS. Hal ini dipengaruhi pula oleh adanya anggapan bahwa BPLS adalah sama dengan PT Lapindo Brantas dan Timnas PLSL saat itu, hal ini dikarenakan BPLS dibentuk dengan Perpres No 14 Tahun 2007 untuk melanjutkan tugas Timnas PLSL yang sudah selesai masa kerjanya. Namun situasi ini telah jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisi saat ini. Dengan semakin jelasnya tahapan proses pembayaran jual beli tanah dan bangunan terhadap warga korban lumpur, berimbas pada semakin kondusifnya situasi di wilayah penanganan lumpur. Ini terlihat dari semakin berkurangnya intensitas aksi demonstrasi warga. Proses transformasi informasi berupa pemahaman tentang fungsi, tugas, dan wewenang BPLS oleh jajaran Humas Bapel BPLS terhadap para pemangku kepentingan semakin baik.

Dalam proses penyampaian informasi terhadap para pemangku kepentingan masih ditemukan beberapa kendala, antara lain

1. Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang masih “bermain” di kelompok-kelompok warga.
2. Adanya kepentingan-kepentingan politik kekuasaan yang menjadikan isu lumpur sebagai komoditas politik.
3. Adanya perbedaan keinginan antara warga korban dengan PT Lapindo Brantas terkait proses penyelesaian jual beli tanah dan bangunan milik warga.

4. Masih tingginya harapan masyarakat kepada BPLS untuk menyelesaikan semua persoalan yang dialami oleh warga terdampak karena adanya pemahaman yang keliru di masyarakat tentang fungsi, tugas dan wewenang BPLS.
5. Adanya tekanan dari media massa terkait tugas dan tanggung jawab BPLS sesuai dengan Perpres No 40 Tahun 2009.

## **B. Proses Penganggaran**

Sebagai badan baru yang dibentuk setelah ditetapkannya anggaran (DIPA) secara nasional bagi semua instansi Pemerintah (BPLS ditetapkan pada tanggal 8 April 2007), menjadikan BPLS lahir tanpa kejelasan besaran anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugasnya. Untuk dapat menyusun kebutuhan anggaran yang baik tentu perlu didukung dengan penyusunan rencana yang tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan yang mendesak di lapangan.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan proses penganggaran pada saat ini antara lain:

### **1. Relatif seringnya revisi DIPA**

Selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan tugas, perencanaan anggaran dihadapkan pada dinamika penanganan kegiatan di lapangan yang kadangkala tidak dapat diantisipasi berdasarkan data dan informasi yang tersedia, khususnya yang berkaitan dengan penanganan luapan lumpur dan pengalirannya ke muara melalui Kali Porong, penanganan masalah sosial kemasyarakatan dan infrastruktur, sehingga perlu dilakukan beberapa kali revisi anggaran (DIPA).

### **2. Permasalahan dalam administrasi keuangan dan barang**

Sejak tahun pertama berdirinya BPLS, telah mulai dilakukan pembangunan tanggul pengaman lumpur dengan dana APBN. Tanggul ini yang dibangun sebagian merupakan penerusan tanggul lama yang dibangun oleh PT Lapindo Brantas dengan menggunakan dana dari PT Lapindo Brantas sendiri, dan sebagian lagi merupakan pembangunan tanggul baru. Kedua kategori tanggul tersebut terletak di atas tanah Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 yang statusnya "telah dibeli dan akan" menjadi milik PT Lapindo Brantas. Di samping masalah aset tanggul yang terletak di atas tanah pihak lain, ada pula masalah lain, yakni aset berupa tanggul yang terkena penurunan tanah sehingga ada tanggul yang fungsi maupun fisiknya hilang sama sekali dan/atau sebagian hilang karena ambles ke dalam tanah. Hal-hal seperti ini akan memerlukan

penanganan khusus dalam pengadministrasian barang milik negara (BMN) yang harus diantisipasi di kemudian hari.

### C. Kurangnya Kesiapan Pranata Hukum

Pengaruh langsung bencana pada umumnya terjadi di atas permukaan tanah tetapi pada bencana lumpur di Sidoarjo memiliki daya rusak selain di atas permukaan tanah berupa luapan lumpur, juga telah menimbulkan deformasi geologi di bawah permukaan (*sub surface*). Pengaruh deformasi geologi tersebut telah mulai muncul sejak 4 (empat) bulan setelah kejadian semburan panas dan nampak di permukaan tanah berupa *subsidence* (amblesan), *uplift* (pengangkatan), *lateral movement* (pergeseran) yang menyebabkan kerusakan pada bangunan rumah warga dan infrastruktur, serta munculnya *bubble* (bualan) di permukiman yang terus berkembang dengan mengeluarkan air, gas, padatan dan/atau kombinasinya. Beberapa *bubble* mengeluarkan air bertekanan rendah sampai tinggi hingga sekitar 15 meter. Sedangkan gas yang keluar dominan mengandung *methane* yang mudah terbakar dan berbahaya bagi kesehatan, seperti H<sub>2</sub>S dan gas aromatik.

Melihat kondisi tersebut di atas, diperoleh suatu gambaran bahwa:

- Penanganan lumpur panas di Sidoarjo yang menurut jenis dan sifatnya jelas merupakan penanganan terhadap bencana yang sangat berbeda dengan bencana yang terjadi pada umumnya dan masih terus berlangsung hingga kini, yang penanganannya tidak dapat dilakukan sebagaimana penanganan bencana alam yang umumnya, yang dapat dipisahkan sesuai dengan manajemen penanggulangan bencana seperti prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- Kebijakan baru dari Pemerintah berupa Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo terlihat jelas bahwa Pemerintah sangat perhatian dan menganggap penting masalah semburan lumpur panas di Sidoarjo sehingga perlu diatur dan ditangani oleh suatu Badan Khusus (*Emergency de Facto*), meskipun dalam penetapan tersebut tidak didahului dengan suatu pernyataan kedaruratan/keadaan bahaya/bencana sebagaimana dimaksud Pasal 12 UUD 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahap awal ini sudah terjadi permasalahan hukum yakni:

- Dalam penanganan masalah semburan lumpur panas di Sidoarjo semua langkah pemerintah dalam hal ini BPLS tidak boleh melanggar hukum positif atau hukum

yang berlaku umum, telah mengurangi ruang gerak BPLS untuk melakukan upaya-upaya penanganan di lapangan, meskipun kondisi yang sebenarnya adalah bencana/darurat.

- Belum tersedianya suatu peraturan yang khusus/kedaruratan (*exceptional law*) sehingga tindakan BPLS dalam upaya penanganan masalah lumpur panas di Sidoarjo tidak tersendat-sendat akibat dapat diterapkannya hukum publik yaitu keadaan darurat sebagai landasan/ dasar hukum.
- Penanganan dampak semburan lumpur panas semakin meluas di luar wilayah di luar peta area terdampak yang sudah ditetapkan menjadi tanggungjawab APBN;
- Pengadaan barang maupun jasa yang harus dilakukan segera, yang berdasarkan prinsip umum Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 adalah dengan mekanisme lelang, sementara kegiatan di lapangan beradu cepat dengan menerusnya/meningkatnya semburan dan luapan Lumpur.
- Pembangunan infrastruktur pengamanan luapan lumpur panas yang didanai oleh APBN, dibangun di atas lahan yang telah dan sedang dibebaskan (dibeli) oleh PT Lapindo Brantas.

### 1.3.2. Analisis Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan)

Dalam menganalisis faktor lingkungan internal yang dapat mempengaruhi kinerja BAPEL-BPLS dapat dicermati dari aspek **kekuatan (*strengths*)** dan **kelemahan (*weaknesses*)** sebagai berikut:

#### KEKUATAN :

##### 1. Organisasi Berbentuk Badan Ditetapkan dengan Perpres

Perpres Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 8 April 2007 tentang BPLS, organisasi penanggulangan lumpur di Sidoarjo berbentuk badan, yang terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana, kegiatannya dibiayai oleh APBN, sebagai Pengguna Anggaran dan masa kerja BPLS tidak memiliki batas waktu.

Model organisasi ini sangat efektif menangani bencana akibat semburan lumpur di Sidoarjo, karena seluruh sumber daya manajemen berupa: *Man* (sumber daya manusia), *Money* (sumber pembiayaan), *Machine* (peralatan), *Material* (bahan) dan *Method* (metoda kerja/pelaksanaan) dapat diorganisasikan dalam sistem manajemen berbasis kinerja untuk melaksanakan aspek

manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan.

## **2. Pegawai BPLS Dibayar dengan Sistem Renumerasi Sesuai Beban Tugas**

Renumerasi merupakan sistem yang menghargai tenaga profesional sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya. Kegiatan penanggulangan lumpur di Sidoarjo memerlukan tenaga yang kompeten di bidang geologi, sosial, infrastruktur dan tata laksana dari tataran manajer sampai operasional. Masing-masing tataran dan bidang dinilai berdasarkan beban tugas dan tanggung jawab sebagai *job pricing* dalam bentuk renumerasi. Sistem ini selain sebagai motivasi, juga menuntut pegawai untuk selalu bekerja profesional di bidangnya.

## **3. Kepastian Hukum Terhadap Peristiwa Semburan**

Pada awal BPLS dibentuk masih terjadi pro-kontra penyebab terjadinya semburan, antara karena kesalahan pelaksanaan pengeboran dengan fenomena alam. Hal ini selain menyulitkan juga menyibukkan karena harus melayani berbagai aspirasi publik yang saling bertentangan.

Perpres Nomor 40 Tahun 2009 memberikan tugas upaya penanggulangan semburan dan pengaliran lumpur ke Kali Porong yang semula dibebankan kepada PT Lapindo Brantas menjadi kepada negara atau dapat dibiayai APBN.

Kegiatan yang berkaitan dengan semburan dan dampaknya yang berupa luapan lumpur dan deformasi geologi menjadi lebih mudah mengurusnya, karena kalau semula menunggu gerakan PT Lapindo Brantas, maka selanjutnya BPLS menjadi tanpa ragu-ragu langsung bertindak menangani.

## **4. Keberhasilan Penanganan Lumpur ke Laut Melalui Kali Porong**

Pada awal BPLS bekerja, dihadapkan pada aspirasi menentang konsep pengaliran lumpur ke laut melalui Kali Porong, karena dikhawatirkan fungsi kali Porong sebagai *floodway* sistem pengendali banjir Wilayah Sungai (WS) Kali Brantas akan terganggu oleh endapan lumpur yang mengendap, mengeras dan menyumbat aliran sungai, sehingga berpotensi menimbulkan bencana banjir.

Setelah berjalan 3 (tiga) kali musim hujan, yaitu tahun 2006/2007, 2007/2008 dan 2008/2009, bahwa setiap usai musim hujan kapasitas Kali Porong kembali sesuai *design*, yakni  $Q_{100}$  tahun sebesar 1.600 m<sup>3</sup>/detik, publik terutama masyarakat sepanjang Kali Porong sudah dapat menerima konsep ini.

Perkuatan tebing kali Porong yang sudah dilakukan dengan konstruksi *revetment* telah meningkatkan kestabilan tebing terhadap gerusan. Juga endapan lumpur yang mengendap secara alami karena bertemu dengan laut,

telah meningkatkan kelancaran aliran lumpur sampai ke palung laut selat Madura. Hasil pengerukan telah dimanfaatkan untuk reklamasi dan lingkungan pesisirnya pun menunjukkan kondisi biota laut dan populasi bakau tidak mengalami penurunan kualitas.

Dengan keberhasilan menangani lumpur sampai ke laut, maka selanjutnya tinggal dilakukan pemantauan dan evaluasi, untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dengan bangunan pengendali, agar sistem menjadi lebih handal dan berkelanjutan.

#### **KELEMAHAN :**

##### **1. Belum Adanya Pernyataan Sebagai Bencana Alam**

Belum adanya pernyataan bencana, baik alam, non alam, maupun manusia sangat menyulitkan posisi maupun peran BPLS. Di satu pihak secara *de facto* berdasar data dan informasi yang direkam baik melalui media cetak maupun elektronika telah jatuh korban, timbul kerugian dan mengakibatkan warga mengungsi, namun di lain pihak secara *de jure* belum ada pernyataan telah terjadi bencana, faktor alam, non alam, atau manusia.

Kondisi ini bagi BPLS sangat dilematis, karena penanganan terhadap korban maupun prosedur pengadaan penanganan infrastruktur menjadi tidak memiliki pedoman yang baku, sebagaimana umum dilakukan pada kejadian bencana alam. Belum adanya pernyataan resmi pemerintah sebagai bencana alam, juga menyebabkan lembaga-lembaga internasional yang ingin membantu menjadi tidak dapat difasilitasi.

##### **2. Keterbatasan Menetapkan Batas Aman Bencana Geologi**

Kondisi bawah permukaan di wilayah sekitar pusat semburan mengalami perubahan secara dinamis seiring dengan terus keluarnya lumpur panas. Kondisi bawah permukaan dapat dideteksi dengan berbagai peralatan yang umum dilakukan di bidang geologi, namun karena mekanisme perubahan formasi batuan merupakan hal yang kompleks, terkait gaya-gaya yang bekerja baik dalam sistem tektonik maupun vulkanik, sehingga *resultant*-nya dalam mencari keseimbangan, sulit diantisipasi arah maupun laju deformasinya. Setiap saat hanya mampu memperbarui wilayah pengaruh deformasi geologi, namun belum dapat ditentukan batas terluar yang dinyatakan sebagai daerah aman dari bencana geologi.

### 3. Keterbatasan Tersedianya PNS Aktif untuk Pengelolaan APBN

Peraturan yang mensyaratkan perangkat Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan harus PNS aktif tidak mudah dipenuhi dalam rekrutmen pegawai Badan Pelaksana BPLS.

Dalam rangka penanggulangan bencana, BPLS merekrut tenaga profesional, namun karena dana APBN yang dikelola Bapel BPLS sangat besar, maka memerlukan personil yang berpengalaman dalam pengelolaan dana APBN yang sesuai dengan peraturan dengan status PNS aktif, terutama pejabat inti pada satuan kerja dan panitia pengadaan.

### 4. Implementasi Dukungan Sektor Terkait Belum Memadai

Badan Pelaksana bukan lembaga *super body* yang memiliki sumber daya untuk mengatasi permasalahan yang multi dimensi, sehingga memerlukan dukungan sektor terkait untuk menangani dampak terjadinya semburan lumpur panas di Sidoarjo.

Jajaran staf Dewan Pengarah kadang kurang mengikuti perkembangan yang dihadapi Bapel BPLS, walau telah diinformasikan melalui Laporan Bulanan, namun kadang menyampaikan usulan atau opini yang berseberangan kepada publik atau di lingkungan eksternal, sehingga menjadi beban tugas yang harus ditanggapi oleh Bapel BPLS.

Dukungan sektor terutama dari unsur Dewan Pengarah BPLS sangat diperlukan dengan mendayagunakan kewenangan, sumber daya dan/atau kompetensi yang dimiliki masing-masing unsur sehingga penanganan lumpur, sosial dan infrastruktur dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

#### 1.3.3. Analisis Lingkungan Eksternal (peluang dan tantangan)

Dalam menganalisis faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bapel-BPLS dapat dicermati dari **aspek peluang (*opportunities*)** dan **aspek hambatan/ancaman (*threats*)** sebagai berikut:

#### PELUANG :

##### 1. Lumpur Memiliki Kandungan Mineral yang Bernilai Ekonomi

Dari berbagai penelitian diindikasikan bahwa lumpur Sidoarjo dapat digunakan antara lain sebagai bahan untuk pembuatan keramik bermutu tinggi dan juga memiliki kandungan yodium yang bagus untuk bahan obat kulit dan kosmetik. Tentunya tidak tertutup kemungkinan bila diproses secara khusus akan menghasilkan bahan tambang lainnya yang bernilai tinggi.

Pada saat semburan lumpur sudah dapat dikendalikan atau mungkin dalam status tidak bahaya, maka potensi tambang lumpur Sidoarjo patut mendapatkan perhatian untuk dikelola menjadi suatu kegiatan berskala ekonomis, yang akan membuka lapangan kerja bagi warga di sekitarnya. Bagi daerah merupakan peluang untuk menambah kas daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Relokasi Infrastruktur Mendorong Pengembangan Wilayah**

*Design* relokasi infrastruktur telah mempertimbangkan keamanannya terhadap bahaya luapan lumpur dan deformasi geologi, juga telah disesuaikan dengan revisi tata ruang Kabupaten Sidoarjo pasca semburan lumpur, merupakan infrastruktur vital untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa dari dan ke Surabaya dengan daerah sekitarnya.

Adanya simpang susun Kesambi yang menghubungkan relokasi jalan arteri dengan rencana lingkaran barat Sidoarjo, akan membuka wilayah yang selama ini sebagai daerah yang terbatas infrastrukturnya untuk menjadi pusat wilayah pengembangan baru yang berorientasi kepada kegiatan ekonomi.

## **3. Sebagai Fenomena Geologi yang Memiliki Keunikan Tingkat Dunia**

Fenomena semburan lumpur panas merupakan bagian proses pembentukan gunung lumpur, sebagaimana terdapat di beberapa tempat di sekitarnya, adalah fenomena geologi yang unik yang dapat dijadikan sebagai tempat wisata dan pusat penelitian.

Volume semburan sekitar 100.000 m<sup>3</sup> per hari dengan luas genangan mencakup sekitar 780 hektar, cukup dekat dengan Surabaya, dan tersedianya akses sehingga lokasi sangat mudah dicapai, merupakan tempat tujuan wisata kelas dunia yang patut diperhitungkan bagi pengunjung Jawa Timur, baik wisatawan maupun yang sedang berbisnis.

## **4. Momentum Peningkatan Kesejahteraan Warga/Masyarakat Melalui Kebangkitan Sektor Ekonomi**

Kejadian semburan lumpur merupakan musibah yang menyedihkan sehingga warga tercerabut dari wilayah hunian yang selama ini ditempati, bahkan oleh beberapa generasi. Namun warga harus bangkit untuk melanjutkan kehidupan dan bersemangat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan Perpres Nomor 14 Tahun 2007 bahwa aset korban lumpur berupa tanah dan bangunan dilakukan proses jual-beli, dan PT Lapindo Brantas bersedia memberikan harga yang sangat bagus, yakni: tanah sawah sebesar Rp 120.000 per m<sup>2</sup>, tanah darat sebesar Rp 1 juta per m<sup>2</sup> dan bangunan rumah sebesar Rp 1,5 juta per m<sup>2</sup>. Karena nilai yang diterima korban jauh lebih besar dari harga pasar, maka adanya momentum masuknya dana besar, sehingga warga harus cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara membelanjakan uang tersebut untuk tujuan produktif atau investasi dan menghindari belanja yang bersifat konsumtif.

#### **ANCAMAN :**

##### **1. Semburan Dapat Berlangsung 30 Tahun**

Pada saat ini, sesuai perkembangan kondisi bawah permukaan dan upaya dengan teknologi, selain kecil tingkat keberhasilannya juga potensial menimbulkan semburan baru, maka semburan disimpulkan tidak mungkin dihentikan.

Menurut studi model yang disusun oleh Bambang P. Istadi (Energi Mega Persada), Gatot H. Pramono (Bakosurtanal), Prihadi Sumintadireja (ITB) dan Syamsu Alam (Pertamina) pada awal 2009, bahwa bila volume semburan berkisar 100.000 m<sup>3</sup> per hari, dan berdasarkan cadangan formasi batuan yang potensial menjadi sumber lumpur, maka diperkirakan semburan lumpur akan berlangsung antara 23 tahun sampai 35 tahun.

Tidak ada yang berani menjamin bahwa volume semburan akan tetap atau bahkan menurun. Yang dikhawatirkan adalah bila berubah menjadi jauh lebih besar, maka sistem penanganan lumpur ke laut melalui Kali Porong yang ada tidak dapat diandalkan, sehingga diperlukan tambahan sistem baru untuk mengendalikan luapan lumpur.

##### **2. Tren Deformasi Geologi Meluas Radiusnya**

Deformasi geologi di sekitar pusat semburan sampai saat ini masih tetap terjadi dan sifatnya dinamis. Perkembangan deformasi geologi terpantau meningkat radius maupun Intensitasnya. Deformasi geologi berupa *bubble* dilaporkan sangat fluktuaktif, kadang mengecil baik jumlah maupun

intensitasnya, namun tiba-tiba menjadi masalah besar karena menyebabkan kebakaran rumah warga sampai warga seluruh RT diungsikan. Juga munculnya *bubble* yang mendekati trase relokasi infrastruktur, menimbulkan reaksi berlebihan untuk memindahkan trase relokasi infrastruktur.

Deformasi geologi berupa amblesan yang terus berjalan namun dengan laju amblesan kecil, tiba-tiba terjadi amblesan dalam 2 bulan pada 3 lokasi yang bersebelahan sedalam 3,0 - 4,0 m pada tanggul penahan lumpur sepanjang ratusan meter. Hal ini menyebabkan kondisi menjadi kritis karena lumpur nyaris melimpas ke luar Peta Area Terdampak (PAT).

Deformasi geologi masih akan terus berlanjut dan amblesan, retak, geser serta bualan yang mengeluarkan gas dan/atau air di permukaan yang berpengaruh pada infrastruktur dan rumah-rumah, termasuk tanggul penahan lumpur. Kerusakan pada tanggul akan mengakibatkan lumpur di kolam melimpas keluar menggenangi infrastruktur dan permukiman yang berada di dekatnya. Kondisi ini membuat masyarakat selalu was-was sehingga menuntut agar asetnya dibeli oleh pemerintah untuk pindah ke tempat lain.

### **3. Meningkatnya Tuntutan Pemenuhan Hak Dasar oleh Masyarakat**

Tuntutan warga dapat dipilah menjadi 2 (dua), yaitu warga korban lumpur dan warga yang merasa terancam oleh bencana geologi. Bila kedua macam warga tersebut tidak ditangani dengan baik, maka ada indikasi warga akan kembali melakukan berbagai tekanan kepada Bapel BPLS untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya. Warga menuntut pemenuhan hak-haknya, dan rawan menjadi isu pelanggaran HAM.

Hak-hak warga di dalam PAT sudah diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007, namun adanya krisis finansial global berakibat PT Lapindo Brantas mengalami kesulitan likuiditas, sehingga yang semula dengan cara *cash* menjadi dicicil. Ancaman akan muncul bila cicilan tidak dapat dipenuhi tepat pada waktunya.

Sedangkan warga yang berdiam di luar PAT, tetapi karena merasa tidak aman tinggal di wilayah yang berbatasan dengan PAT, menuntut untuk dimasukkan ke dalam PAT. Tingginya harga jual beli tanah dan bangunan yang diberlakukan pada PAT di atas harga pasar, telah ikut mendorong warga menuntut wilayahnya dinyatakan sebagai PAT.

### **4. Keterlambatan Fungsional Relokasi Infrastruktur Mengancam Percepatan Pemulihan Sektor Ekonomi dan Investasi**

Pembangunan relokasi infrastruktur, berupa jalan arteri dan jalan tol, merupakan tumpuan kelancaran arus barang/jasa dari dan ke Surabaya dengan wilayah Malang atau Banyuwangi dan sekitarnya.

Pasca tenggelamnya jalan tol segmen Gempol – Porong oleh luapan lumpur, mengakibatkan selain kondisi iklim investasi menjadi menurun, juga keterpaksaan melalui jalan arteri Porong yang padat dan kurang lancar sebagai satu-satunya akses menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Pembangunan relokasi jalan arteri progres-nya masih rendah, sedangkan pembangunan relokasi jalan tol belum juga dimulai, karena terhambat pengadaan tanah. Warga menuntut harga ganti rugi sama dengan harga yang diterapkan oleh PT Lapindo Brantas yang jauh di atas harga taksiran Tim *Appraisal*.

Hal ini akan menyebabkan investor yang ada pindah tempat operasi, sedang investor baru enggan masuk. Juga pemulihan ekonomi menjadi tersendat akibat ekonomi biaya tinggi.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 2.1. Visi

Arah dan apa yang ingin dicapai oleh suatu unit organisasi pada prinsipnya dapat terlihat dari visi dan misi unit yang akan dilaksanakan. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang realistis berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu oleh suatu unit organisasi. Mengingat visi harus jelas dan mampu menarik komitmen dan menggerakkan orang, menciptakan makna bagi kehidupan anggota unit kerja/organisasi, menciptakan standar keunggulan, menjembatani keadaan sekarang dengan keadaan masa 5 (lima) tahun ke depan, maka BAPEL-BPLS menetapkan visinya sebagai berikut :

**“ Pulihnya sendi kehidupan yang dinamis dari dampak fenomena gunung lumpur di Sidoarjo pada tahun 2014 “**

Rumusan visi tersebut berisikan 4 (empat) bagian kumpulan kata, yang pertama adalah kata **“pulihnya”**, bagian kedua adalah **“sendi kehidupan yang dinamis”**, yang ketiga adalah **“dari dampak fenomena gunung lumpur”**, dan yang keempat adalah **“pada tahun 2014”**.

Untuk memahami makna dari masing-masing bagian tersebut, penggambarannya adalah sebagai berikut:

1. Kata **“pulihnya”** ini menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. **“Pulihnya”** juga mengandung motivasi untuk memulihkan sendi kehidupan dalam waktu yang lebih pendek jika dibandingkan dengan jangka waktu aktifnya semburan yang diperkirakan akan berlangsung hingga 20 tahun. Diharapkan pula bahwa meskipun semburan lumpur masih tetap berlangsung tetapi sendi kehidupan yang dinamis sudah harus dapat pulih kembali lebih dini.

Untuk mencapai **pulihnya** membutuhkan niat yang tulus, sikap yang jujur, dan perilaku kerja keras, disertai dengan kecermatan dalam perencanaan, ketepatan dalam pelaksanaan, ketekunan dan ketelitian dalam pemantauan, serta

kecerdasan dalam melakukan evaluasi sehingga kegiatan dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

2. **Sendi kehidupan yang dinamis** adalah peri kehidupan yang maju, berkembang, dan mengikuti perkembangan zaman (tidak bersifat statis). Gambaran **sendi kehidupan yang dinamis** dapat dilihat dari peran Porong – Sidoarjo yang merupakan urat nadi ekonomi Jawa Timur, simpul mengalirnya arus barang dan jasa dari dan ke bandara dan pelabuhan di Surabaya dengan wilayah Malang, Lumajang, Pasuruan, Banyuwangi dan sekitarnya. Tersedia pula dalam wilayah tersebut infrastruktur transportasi berupa jalan tol, jalan arteri, dan jalan kereta api, termasuk pula infrastruktur energi berupa pipa gas dari Kangean/Madura untuk Gresik, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLN, serta pipa PDAM dari Pandaan dan Umbulan untuk Metropolitan Surabaya.

Kegiatan sosial-ekonomi Porong-Sidoarjo cukup maju dan sebagai sentra industri berorientasi ekspor, serta adanya iklim investasi yang kondusif dan kompetitif pada daerah tersebut. Dengan kondisi tersebut tersedia lapangan usaha dan lapangan kerja sehingga pengangguran dapat ditekan. Aktivitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan menjadi terjamin sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin dirasakan. Di samping itu, dengan pembangunan relokasi infrastruktur lengkap dengan simpang susun Kesambi akan menjadikan wilayah Sidoarjo Barat sebagai pusat pengembangan baru.

3. **Dari dampak fenomena gunung lumpur** dimaksudkan bahwa lumpur yang ke luar dari perut bumi merupakan fenomena bencana geologi sebagai erupsi gunung lumpur, yaitu ke luarnya lumpur disertai fluida ke permukaan sebagai diduga akibat formasi batuan yang tertekan sangat kuat, membentuk struktur diapir (cembung ke atas) di bawah permukaan. Karena kondisi yang tidak stabil ini selanjutnya menyebabkan erupsi gunung lumpur melalui saluran yang belum dapat dipastikan jenisnya. dapat dipastikan secara jelas, yang akhirnya muncul ke permukaan dan nampak sebagai semburan lumpur. Mengingat kemungkinan semburan akan berlangsung lebih dari 20 tahun, serta munculnya dampak yang nyata dan begitu luas mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat terdampak dan masyarakat di sekitarnya, maka harus ada solusi permanen agar lumpur dapat dikendalikan sehingga masyarakat merasa aman untuk menjalankan aktivitasnya tanpa harus memikirkan adanya gangguan/bahaya dari luapan lumpur, dan berfungsinya kembali semua prasarana dan sarana publik terdampak.
4. **Pada tahun 2014** dimaksudkan sebagai batasan waktu pencapaian visi melalui berbagai upaya yang akan dituangkan dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan dan

strategi, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan BAPEL – BPLS.

Gambaran masing-masing uraian tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan akan dapat memberikan motivasi dan digunakan sebagai pegangan bagi setiap pegawai BAPEL – BPLS dalam berkiprah dan ikut andil dalam mewujudkan visi dimaksud.

## 2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh unit kerja untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan unit kerja dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi ini, diharapkan seluruh pimpinan dan pegawai di setiap unit kerja dan pihak yang berkepentingan (*stake-holders*) dapat mengenal peran BAPEL-BPLS dengan lebih baik, dan dapat berpartisipasi dalam mendorong keberhasilannya. Dengan memperhatikan tugas pokok yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007, BAPEL-BPLS menetapkan misinya sebagai berikut:

**“Menanggulangi semburan dan luapan lumpur serta  
menangani masalah sosial kemasyarakatan dan infrastruktur  
dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil “**

Dalam misi tersebut di atas, terkandung suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh segenap pimpinan dan pegawai BAPEL-BPLS untuk menangani penanggulangan semburan dan luapan lumpur, masalah sosial kemasyarakatan, serta pengamanan dan relokasi infrastruktur, sehingga kegiatan sosial-ekonomi masyarakat bisa kembali pulih seperti sediakala.

## 2.3. Tujuan

BAPEL-BPLS memahami apa yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada, BAPEL-BPLS merumuskan tujuan strategis yang harus dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan tujuan strategis tersebut adalah:

- a. Pulihnya kehidupan sosial masyarakat.
- b. Terlindunginya warga dari bencana geologi.
- c. Pulihnya infrastruktur jalan dan terbangunnya infrastruktur luapan lumpur melalui Kali Porong.
- d. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang handal.

#### 2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (*impact*)

Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut, BAPEL-BPLS menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai untuk masing-masing tujuan, dengan disertai indikator kinerja dari masing-masing sasaran. Rumusan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (INDIKATOR KINERJA)
Terlindunginya warga dari bencana geologi.	Pengurangan dampak fenomena geologi.	Terlaksananya prinsip pola pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong. Cepatnya antisipasi dampak fenomena geologi dan penanganannya.
Pulihnya kehidupan sosial masyarakat.	Pengurangan dampak sosial masyarakat.	Jumlah warga terdampak yang masalah sosial kemasyarakatannya telah selesai dituntaskan.
Pulihnya infrastruktur jalan dan terbangunnya infrastruktur luapan lumpur melalui Kali Porong.	Lancar dan amannya pengaliran luapan lumpur dan banjir ke laut. Lancarnya arus barang dan jasa pada infrastruktur jalan yang telah direlokasi.	Lumpur yang dialirkan ke Kali Porong dapat tergelontor sampai laut di muara Kali Porong. Tidak adanya luapan lumpur dan/atau banjir meluap dari tanggul luar Peta Area Terdampak. Peningkatan aktivitas distribusi barang dan jasa pada infrastruktur jalan yang telah direlokasi.
Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang handal.	Mewujudkan organisasi berbasis kinerja yang efektif, efisien, dinamis, responsif, dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan tugas.	Penguatan sumberdaya, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Kebijakan nasional yang terkait dengan penanggulangan bencana lumpur di Sidoarjo salah satunya dituangkan Pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun 2009 dalam Pasal 13 yang menyebutkan:

#### Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, maka alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dapat digunakan untuk melunasi kekurangan pembayaran pembelian tanah, bantuan kontrak rumah, tunjangan hidup dan biaya evakuasi di luar peta terdampak pada tiga desa (desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan), serta untuk bantuan kontrak rumah, tunjangan hidup, biaya evakuasi dan relokasi pada sembilan rukun tetangga di tiga desa (Siring Barat, Jatirejo, dan Mindi).
- (2) Kekurangan pembayaran pembelian tanah di luar peta area terdampak pada tiga desa (desa Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan) dilakukan setelah pembayaran pembelian tanah di dalam peta area terdampak selesai dilakukan.

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk segera menyelesaikan penanganan masalah sosial kemasyarakatan warga terdampak semburan dan luapan lumpur di Sidoarjo. Kebijakan tersebut merupakan salah satu prioritas utama dan menjadi acuan menjadi acuan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi dari Renstra BAPEL-BPLS 2010-2014, dengan fokus penanganan/penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan di Desa Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan, serta sembilan Rukun Tetangga (RT) di Desa Siring

Barat, Jatirejo, dan Mindi, yang diwujudkan dalam penetapan program dan kegiatan teknis beserta indikatornya masing-masing.

Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan infrastruktur sebagai salah satu faktor pendukung dalam percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi, akan menjadi perhatian bagi BAPEL-BPLS dalam menyelesaikan pembangunan relokasi infrastruktur terdampak semburan dan luapan lumpur serta infrastruktur penanganan luapan lumpur, sehingga arus/distribusi barang dan jasa akan segera lancar kembali, dan dengan demikian diharapkan akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, yang pada akhirnya akan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tujuan untuk membangun/membentuk birokrasi yang bersih, efisien, efektif, produktif, transparan, yang melayani masyarakat, dan akuntabel. BAPEL-BPLS sebagai salah satu badan Pemerintah (LPND) berkewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi tersebut dan berkaitan dengan hal tersebut akan menjadikan kebijakan Pemerintah ini sebagai dasar dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan teknis BAPEL-BPLS dalam Renstra 2010-2014.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bapel-BPLS**

Arah kebijakan dan strategi Renstra BAPEL-BPLS memuat langkah-langkah yang berupa program dan kegiatan teknis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

#### **3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo**

Setiap bencana harus segera ditanggapi dengan cepat dan ditangani dengan tepat. Penanggulangan bencana satu dengan yang lain tidak selalu sama, tergantung karakteristik sumber bencananya. Pada prinsipnya ada 3 (tiga) macam pendekatan penanggulangan yang harus ditetapkan pilihannya dengan cerdas dan cermat sehingga dapat diperoleh hasil yang efektif dan efisien, yaitu:

- a. *Keep the disaster away from the people* (Jauhkan bencana dari masyarakat)
- b. *Keep the people away from the disaster* (Jauhkan masyarakat dari bencana); atau

c. *Living in harmony with the disaster* (Hidup harmonis dengan bencana).

Demikian pula pada bencana lumpur panas Sidoarjo, yang memiliki karakteristik: berjangka panjang, daya rusak meliputi di atas permukaan dan bawah permukaan serta berada pada wilayah permukiman padat, maka pilihan pendekatan penanggulangan harus bersifat komprehensif, holistik dan berkelanjutan.

Pendekatan menjauhkan bencana dari masyarakat pernah dicoba pada awal bencana dengan tindakan untuk menutup atau menghentikan semburan lumpur panas. Berbagai teknik yang umum dipakai pada kegiatan pengeboran minyak, yakni: *snubbing unit* dan *relief well*, namun tidak memberikan hasil yang signifikan, atau dengan kata lain gagal, begitu juga dengan memasukkan bola-bola beton.

Pendekatan menjauhkan masyarakat dengan bencana, yang pada awalnya mendapatkan penolakan keras dari masyarakat, namun setelah diketahui nilai jual beli aset masyarakat sangat menggiurkan, masyarakat berubah dan menuntut untuk dipindahkan menjauhi bencana. Pilihan ini sangat dilematis bagi pemerintah, sedangkan kemampuan keuangan negara pun masih terbatas, karena harus berbagi dengan penanganan kejadian bencana di berbagai lokasi di tanah air dalam waktu yang bersamaan/berurutan. Kebijakan membebaskan wilayah yang luas dengan nilai yang sangat besar yang sifatnya bukan kegiatan *cost recovery* dikhawatirkan akan dinilai tidak adil bagi wilayah lain.

Pendekatan yang terakhir yang dipilih oleh BPLS adalah *living in harmony with the disaster* atau Hidup harmonis dengan bencana. Mengingat semburan lumpur panas tidak mungkin dihentikan, padahal volume semburan sekitar 100.000 m<sup>3</sup> per hari terus keluar, deformasi geologi berupa amblesan dan munculnya *bubble* terus berlangsung, maka perlu dilakukan penanggulangan dengan tujuan, yaitu:

- Pulihnya kehidupan sosial masyarakat;
- Terlindunginya warga dari bencana geologi;
- Pulihnya infrastruktur jalan dan luapan lumpur melalui Kali Porong;
- Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang handal.

Untuk mewujudkan penanggulangan dengan pendekatan hidup harmonis dengan bencana, telah disusun Rencana Induk Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, yang terdiri dari:

1. Rencana pengamanan bencana geologi;
2. Rencana pengaliran lumpur ke Kali Porong;
3. Rencana penanganan luapan lumpur di sekitar wilayah semburan;

4. Rencana pengamanan Kali Porong;
5. Rencana penanganan endapan di muara.

Melengkapi pembahasan arah kebijakan dan strategi BAPEL-BPLS secara rinci dalam Renstra 2010-2014, berikut ini disajikan terlebih dahulu uraian tentang kelembagaan/organisasi BAPEL-BPLS, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

### **3.2.2. Kelembagaan/organisasi Bapel-BPLS**

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo merupakan satu kelembagaan *ad hoc* yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dengan misi utama menanggulangi dampak bencana akibat semburan lumpur di Sidoarjo dengan mengadakan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur dengan memperhitungkan resiko lingkungan yang terkecil.

Dalam Peraturan Presiden tersebut Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana (BAPEL), yang dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pengarah bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan BAPEL bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah.

#### **DEWAN PENGARAH**

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2007 disebutkan bahwa Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yang dilaksanakan oleh BAPEL-BPLS.

Keanggotaan Dewan Pengarah terdiri dari :

- a. Ketua : Menteri Pekerjaan Umum merangkap Anggota
- b. Wakil Ketua : Menteri Sosial merangkap Anggota
- c. Anggota :
  1. Menteri Keuangan;
  2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  3. Menteri Dalam Negeri;
  4. Menteri Kelautan dan Perikanan;

5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
10. Panglima Daerah Militer V/Brawijaya;
11. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan
12. Bupati Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengarah di bidang administrasi dan komunikasi dengan BAPEL – BPLS dan pihak-pihak terkait lainnya, dibentuk Sekretariat Dewan Pengarah, yang beranggotakan pula unsur dari Anggota Dewan Pengarah lainnya sebagai pejabat penghubung.

#### **BAPEL - BPLS**

Susunan Organisasi BAPEL - BPLS berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2007 tersebut terdiri dari:

- Kepala Badan Pelaksana;
- Wakil Kepala Badan Pelaksana;
- Sekretaris Badan Pelaksana
- Deputi Bidang Operasi;
- Deputi Bidang Sosial;
- Deputi Bidang Infrastruktur.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2007, Kepala Badan Pelaksana telah menetapkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Nomor 02/PRT/P/2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana - BPLS yang terdiri dari susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 yang dijabarkan kembali sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Dalam pelaksanaan anggaran (DIPA), Kepala Badan Pelaksana ditetapkan pula sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, yang tentunya dalam pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya di bidang penggunaan anggaran tersebut harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan pelaksanaannya.

Tugas dan tanggung jawab bidang Operasi, bidang Sosial, bidang Infrastruktur dan Sekretariat adalah sebagai berikut:

**1. Bidang Operasi mempunyai tugas:**

- a. menyelenggarakan koordinasi operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana operasi teknis upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- c. melakukan pengendalian operasi upaya penanggulangan semburan lumpur yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas;
- d. melaksanakan penanganan luapan lumpur;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur.

Tugas Bidang Operasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tersebut telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 sehingga rumusannya menjadi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan koordinasi operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana operasi teknis upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
- c. melakukan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur;
- d. melaksanakan penanganan luapan lumpur ke Kali Porong.
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur.

**2. Bidang Sosial mempunyai tugas:**

- a. menyelenggarakan koordinasi penanganan masalah sosial masyarakat;
- b. menyusun rumusan strategi dan rencana penanganan masalah sosial masyarakat;

- c. melaksanakan bantuan dan perlindungan serta pemulihan sosial kemasyarakatan;
- d. melakukan pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah sosial kemasyarakatan akibat luapan lumpur.

**3. Bidang Infrastruktur mempunyai tugas:**

- a. menyelenggarakan koordinasi penanganan masalah infrastruktur;
- b. menyusun rumusan strateji dan rencana penanganan masalah infrastruktur;
- c. melaksanakan pembangunan konstruksi infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur;
- d. memelihara dan mengamankan infrastruktur;
- e. mengadakan evaluasi dan pelaporan penanganan masalah infrastruktur akibat luapan lumpur.

**4. Sekretariat mempunyai tugas:**

- a. menyelenggarakan administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pelaksana;
- b. mengelola pegawai, perencanaan kerja, pendanaan, perlengkapan kerja, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, dan keamanan serta sistem informasi Badan Pelaksana;
- c. menyelenggarakan ketatalaksanaan dan hubungan kerja Badan Pelaksana di bidang administrasi dengan instansi terkait;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pelaksana.

Untuk mendukung pelaksanaan tata hubungan kerja antar Kelompok Kerja dan adanya tuntutan untuk penyusunan organisasi yang ramping struktur dan kaya fungsi, BAPEL-BPLS senantiasa melakukan kajian terhadap organisasi yang telah ada, sehingga mendapatkan bentuk organisasi yang ideal, ramping struktur namun kaya fungsi, dan dengan menempatkan tenaga/pegawai yang berbasis kompetensi.

### **3.2.3. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan organisasi, BAPEL-BPLS berusaha untuk mendapatkan tenaga yang telah berpengalaman dan siap pakai karena tugas yang ditangani merupakan tugas penting, mendesak dan harus mendapatkan penanganan segera. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, dilakukan melalui pengadaan/rekrutmen pegawai, baik untuk pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Pegawai tetap adalah pegawai profesional yang memiliki keahlian/kompetensi tertentu yang diseleksi oleh dan diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Bapel-BPLS, sedangkan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang memiliki ketrampilan tertentu yang diseleksi dan diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

#### **a. Pegawai Tetap**

Pelaksanaan rekrutmen pegawai tetap dilakukan oleh Sekretaris Badan Pelaksana dan selanjutnya diangkat dengan Surat Pengangkatan oleh Kepala Badan Pelaksana serta diikat dengan Surat Perjanjian Kerja.

Dalam melakukan rekrutmen pegawai tetap yang berstatus PNS, Sekretaris Bapel-BPLS menghubungi atau melakukan koordinasi dengan Departemen PU dan instansi sekitar Surabaya/Sidoarjo antara lain Pemerintah Provinsi Jatim, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Balai Besar Sungai Kali Brantas dan Perum Jasa Tirta I untuk mendapatkan tenaga sesuai persyaratan yang diperlukan Bapel-BPLS. Seleksi pegawai dengan status PNS didasarkan pada *curriculum vitae (CV)* pegawai yang bersangkutan, sedang untuk pegawai yang bukan dari PNS, dilakukan dengan menyeleksi surat lamaran yang masuk berdasarkan kebutuhan dan pemenuhan persyaratan yang diperlukan.

Untuk keperluan pengadaan pegawai tetap tersebut, Bapel-BPLS melakukan koordinasi dengan beberapa instansi di pusat dan di daerah, antara lain Departemen Pekerjaan Umum, Propinsi Jawa Timur, Perum Jasa Tirta 1.

#### **b. Pegawai Tidak Tetap**

Pelaksanaan rekrutmen pegawai tidak tetap dilakukan oleh PPK sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam DIPA. Pengangkatan pegawai dan pembuatan SPK dilakukan oleh PPK yang bersangkutan.

Jumlah pegawai BAPEL-BPLS pada tahun 2009 berjumlah 114 orang dengan rincian pegawai tetap sebanyak 90 orang dan pegawai tidak tetap sebanyak 24 orang.

### 3.2.4. Ketatalaksanaan

Dalam operasionalisasi organisasi BAPEL-BPLS, di samping didasarkan pada Perpres No. 14 Tahun 2007 jo Perpres No. 40 Tahun 2009, ditetapkan pula Peraturan Ketua Dewan Pengarah Nomor: 01/PRT/DP-BPLS/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 Tentang Tata Kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan 16 (enam belas) Sistem Prosedur Operasional. Penyusunan dan penetapan tata kerja dimaksud adalah sebagai tindak lanjut dari Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 14 tahun 2007. Dengan telah diterbitkannya Tata Kerja BPLS tersebut, maka mekanisme hubungan kerja antara Dewan Pengawas dengan Bapel dan antara Bapel dengan PT Lapindo Brantas menjadi lebih jelas, baik yang menyangkut peran, kedudukan, tugas dan tanggungjawab, maupun yang berkaitan dengan tata hubungan kerja. Tata Kerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Di samping itu, sebagai tindak lanjut dari Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden RI No. 14 tahun 2007 telah disusun dan ditetapkan sistem prosedur operasional, yang merupakan mekanisme atau panduan pelaksanaan tugas BAPEL-BPLS. Dengan ditetapkannya 16 (enam belas) sistem prosedur operasional tersebut, pelaksanaan pekerjaan bidang operasi, bidang sosial, bidang infrastruktur, dan kesekretariatan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Di samping penetapan tata kerja dan sistem prosedur operasional tersebut, dalam rangka memberikan pemahaman kepada para pegawai BAPEL-BPLS yang berasal dari berbagai instansi tentang ketatalaksanaan (prosedur baku) yang diberlakukan Pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, administrasi anggaran/keuangan, dan administrasi barang milik negara, BAPEL – BPLS senantiasa mengembangkan kemampuan pegawai dengan mengikutsertakannya dalam berbagai pelatihan di bidang ketatalaksanaan administrasi, antara lain pelatihan pengadaan barang dan jasa, pelatihan sistem administrasi keuangan negara, sosialisasi akun belanja dan perpajakan, serta sistem akuntansi barang milik negara.

### 3.2.5. Program, Indikator Kinerja Program (outcome), dan Kegiatan Teknis

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, organisasi, tugas dan fungsi BAPEL-BPLS, serta ketatalaksanaan, SDM yang dimiliki, dan permasalahan yang dihadapi, program indikatif BAPEL-BPLS ditetapkan sebagai berikut:

**Program Teknis** : Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo

**Program Generik** : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BAPEL-BPLS.

Dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (*outcome*) BAPEL-BPLS ditetapkan sebagai berikut:

<b>INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)</b>	<b>USULAN PROGRAM</b>
<p>Terlaksananya prinsip pola pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong.</p> <p>Cepatnya antisipasi dampak fenomena geologi dan penanganannya.</p>	<p>Memberikan rasa aman kepada penduduk yang bermukim di wilayah pengaruh bencana lumpur Sidoarjo yang diukur dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- volume luapan lumpur yang dapat dialirkan ke Kali Porong</li> <li>- tersedianya informasi yang akurat tentang kondisi geologi dan tata lingkungan di wilayah pengaruh bencana lumpur Sidoarjo.</li> <li>- jangka waktu penanganan/ penyelesaian dampak</li> </ul>	<p>Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo</p>
<p>Jumlah warga terdampak yang masalah sosial kemasyarakatannya telah selesai dituntaskan.</p>	<p>Terpenuhinya hak-hak dasar warga terdampak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perpres yang diukur dari penyelesaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemberian bantuan sosial;</li> <li>- perlindungan sosial; dan</li> <li>- pemulihan sosial.</li> </ul>	<p>Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo</p>
<p>Lumpur yang dialirkan ke Kali Porong dapat tergelontor sampai laut di muara Kali Porong.</p> <p>Tidak adanya luapan lumpur dan/atau banjir meluap dari tanggul luar</p>	<p>Terjaganya kemampuan dan keamanan Kali Porong dalam mengalirkan luapan lumpur dan banjir, yang diukur dari daya tampung Kali Porong dalam pengaliran luapan lumpur dan banjir.</p> <p>Terjaganya kemampuan tanggul dalam menahan lumpur yang diukur dari tinggi</p>	<p>Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo</p>

INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( <i>OUTCOME</i> )	USULAN PROGRAM
<p>Peta Area Terdampak.</p> <p>Peningkatan aktivitas distribusi barang dan jasa pada infrastruktur jalan yang telah direlokasi.</p>	<p>jagaan.</p> <p>Berfungsinya infrastruktur jalan alternatif dan jalan relokasi yang diukur dari mulai digunakannya infrastruktur jalan yang bersangkutan untuk kepentingan umum.</p>	
<p>Penguatan sumberdaya, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.</p>	<p>Meningkatnya kinerja tahunan BAPEL-BPLS yang diukur dari capaian kinerja sasaran dalam LAKIP.</p> <p>Meningkatnya prosentase penanganan dan/ atau terselesaikannya keluhan masyarakat yang diukur dari jumlah keluhan dan ditangani atau diselesaikan.</p> <p>Mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan Bapel BPLS yang diukur/dilihat dari opini yang diberikan oleh BPK dalam hasil audit laporan keuangan BAPEL- BPLS.</p>	<p>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo</p>

Dengan memperhatikan program yang telah ditetapkan, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja setingkat eselon II yang dimiliki, BAPEL-BPLS menetapkan kegiatan teknis dan indikator kinerja kegiatan teknis (*output*) masing-masing unit kerja sebagai berikut:

## USULAN PROGRAM: PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO

### BIDANG OPERASI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong, yang diukur dari:</p> <p><b>Indikator Kinerja :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya perencanaan pengendalian operasi pengaliran lumpur ke arah selatan kolam penampungan lumpur dengan dipompa ke Kali Porong</li> <li>- Tersedianya data pengukuran BM dan TTG di wilayah sekitar pusat semburan</li> <li>- Tersedia laporan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur</li> </ul>	<p>Perencanaan Operasi Luapan Lumpur</p>	<p>Perencanaan Operasi</p>
<p>Terlaksananya pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong, yang diukur dari:</p> <p><b>Indikator Kinerja :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah lumpur yang terpompa ke Kali Porong = 200 juta m<sup>3</sup> selama tahun 2010 - 2014</li> <li>- Kolam penampungan tetap aman terhadap curah hujan 200 mm/hari selama 3 hari</li> <li>- Terbentuknya sistem operasi yang aman meskipun aktivitas pemompaan berhenti selama 7 hari akibat masalah sosial.</li> </ul>	<p>Penanganan Luapan Lumpur</p>	<p>Penanganan Semburan dan Luapan Lumpur</p>

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaliran lumpur ke Kali Porong dapat dihentikan selama 3 bulan pada musim kemarau, kolam masih mampu menampung luapan Lumpur</li> </ul>		
<p>Meningkatnya kemampuan penyediaan data dan informasi fenomena geologi dan penanganan bencana geologi.</p> <p><b>Indikator Kinerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah laporan/kajian/analisa penanganan semburan dan luapan lumpur.</li> <li>- Tersedianya data surface dan subsurface sebagai bahan perencanaan penanggulangan semburan dan penanganan luapan lumpur ke Kali Porong.</li> <li>- Tersedianya data subsidence akibat pengaruh deformasi geologi.</li> </ul>	<p>Mitigasi dan penanganan bencana geologi, dan monitoring lingkungan.</p>	<p>Mitigasi Bencana</p>

**USULAN PROGRAM: PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO**

**BIDANG SOSIAL**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>Meningkatnya kualitas penyusunan rencana di bidang sosial kemasyarakatan, yang diukur dari:</p> <p><b>Indikator Kinerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terfasilitasikannya perolehan kesempatan kerja buruh-buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau anggota keluarganya yang dewasa pada 18 desa sebanyak 2.200 orang.</li> <li>- Tersedianya data monografi dan permasalahan yang berkembang di desa terdampak (baik di dalam maupun di luar peta area terdampak) sebanyak 18 desa</li> <li>- Tersedianya data dan permasalahan sosial yang berkembang di desa terdampak (baik di dalam maupun di luar peta area terdampak), sebanyak 18 desa.</li> <li>- Ketersediaan perencanaan kajian pengembangan bidang sosial dan ekonomi 5 kajian/laporan.</li> </ul>	<p>Perencanaan dan Pengelolaan Pemulihan Sosial</p>	<p>Perencanaan dan Pemulihan Sosial.</p>
<p><b>Terselenggaranya bantuan sosial kemasyarakatan warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo, yang diukur dari:</b></p> <p><b>Indikator Kinerja :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tertanganinya penyaluran bantuan sosial warga yang berada di luar peta terdampak yang kondisi air tanah tidak layak minum di 12 desa, untuk 5408 KK/19476 jiwa, 20 l/orang/hari</li> </ul>	<p>Pengelolaan Penanganan Bantuan Sosial</p>	<p>Penanganan Bantuan Sosial</p>

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya tanggap darurat bagi warga yang berada di luar peta terdampak yang kondisi rumah dan tempat tinggalnya membahayakan keselamatan jiwa.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan dapur umum 500 or/14hr, 7 kali/lokasi.</li> <li>• Perawatan kesehatan dan obat-obatan 1 paket.</li> <li>• Bantuan pemakaman untuk 40 orang</li> </ul> </li> <li>- Terlaksananya pemberian bantuan sosial kepada 3 Desa ( Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan) berupa biaya:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jadup selama 6 bulan 1.666/KK, 6.094 jiwa</li> <li>• Kontrak rumah 1 tahun untuk 1.666 KK</li> </ul> </li> <li>- Terlaksananya bantuan sosial penyelamatan warga di 9 RT (desa Mindi, Siring dan Jatirejo) yang kondisi rumah dan tempat tinggalnya membahayakan keselamatan jiwa berupa biaya :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jadup selama 6 bulan untuk 2.970 jiwa.</li> <li>• Evakuasi untuk 867 KK</li> <li>• Bantuan Pemukiman Sementara/Kontrak 867 KK</li> </ul> </li> <li>- Terlaksananya bantuan sosial program contingency warga di luar peta area terdampak</li> </ul>		
<p>Terlaksananya perlindungan sosial terhadap warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo, yang diukur dari:</p> <p><b>Indikator Kinerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pembayaran jual beli tanah</li> </ul>	<p>Peningkatan dan Pengelolaan Penanganan Perlindungan Sosial</p>	<p>Perlindungan Sosial</p>

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>dan bangunan di 3 (tiga) desa: Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan total 1.800 bidang dengan luas lahan 66,5 Ha dan luas bangunan 236.780,33 m<sup>2</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya program contingency untuk pembebasan tanah dan bangunan di desa-desa yang sudah tidak lagi layak huni di luar Peta Area Terdampak.</li> <li>- Terlaksananya proses verifikasi terhadap berkas permohonan jual beli tanah dan bangunan sebanyak 14.000 di 12 desa wilayah Peta area Terdampak 22 Maret 2007.</li> <li>- Terlaksananya pemahaman proses jual beli tanah dan bangunan kepada 14.000 pemilik berkas di 12 desa terdampak, serta pemberian bantuan sosial.</li> <li>- Terbentuk dan berfungsinya Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi berkas permohonan jual beli tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur, yang berada di dalam PAT 22 Maret 2007;</li> <li>- Terlaksananya pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berupa jual beli tanah dan bangunan, ganti rugi pabrik, sawah dan buruh yang tidak produktif serta bantuan sosial yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas / PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ);</li> </ul>		

**USULAN PROGRAM: PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO****BIDANG INFRASTRUKTUR**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>Meningkatkan kualitas penyusunan rencana penanganan infrastruktur dan relokasi infrastruktur, yang diukur dari :</p> <p><b>Indikator kuantitas :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan review disain infrastruktur relokasi jalan arteri Porong serta laporan supervisi / pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan relokasi jalan Arteri, Simpang Susun Kesambi dan PDAM</li> <li>- Laporan Supervisi / pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur luapan lumpur</li> <li>- Laporan Review Design infrastruktur luapan lumpur, perbaikan sistem drainase, pengamanan Kali Porong dan peningkatan/ pemeliharaan jalan lingkungan.</li> <li>- Laporan Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan Muara Kali Porong</li> <li>- Laporan disain pengembangan kawasan sekitar semburan</li> </ul>	Perencanaan pembangunan infrastruktur	Perencanaan Infrastruktur
<p>Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pembangunan/pemeliharaan penanganan infrastruktur akibat luapan lumpur Sidoarjo, yang diukur dari :</p> <p><b>Indikator Kuantitas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbangun tanggul luar 3 desa dan Gempolsari, panjang total sekurang-kurangnya 3.500 m.</li> <li>- Selesaiannya perbaikan saluran irigasi dan</li> </ul>	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan Lumpur.	Penanganan dan Pengamanan Infrastruktur

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>drainase dengan panjang masing-masing, sekurang-kurangnya 1.500 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbangunnya 1 unit bangunan pelimpah</li> <li>- Selesai perbaikan sistem drainase Kali Ketapang sepanjang 15,0 km.</li> <li>- Selesai pembangunan infrastruktur lindungan tebing pengaman banjir di Kali Porong sepanjang 2.700 m untuk mengalirkan air banjir dan lumpur ke laut.</li> <li>- Selesai pembangunan Groundsil di Kali Porong</li> <li>- Selesai normalisasi alur Kali Porong di muara melalui pengerukan endapan sebesar 500.000 m<sup>3</sup></li> <li>- Selesai peningkatan/ pemeliharaan jalan dengan panjang total jalan lingkungan Mindi 1,5 km;</li> <li>- Selesainya pemeliharaan tanggul yang mengalami subsidence</li> <li>- Lancarnya aliran banjir K. Porong sebesar 1.600 m<sup>3</sup>/det dengan hilangnya endapan lumpur dengan upaya agitasi di Kali Porong.</li> <li>- Selesainya pengembangan kawasan sekitar semburan untuk wisata geologi.</li> </ul>		
<p>Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pembangunan/ pemeliharaan penanganan infrastruktur pengganti akibat luapan lumpur Sidoarjo, yang diukur dari :</p> <p><b>Indikator Kuantitas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Tanah Lahan areal pelaksanaan relokasi jalan Arteri Porong dan Jalan Tol Gempol Porong seluas 123,77 HA</li> </ul>	<p>Pembangunan relokasi Infrastruktur</p>	<p>Pembangunan Relokasi Infrastruktur</p>

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>diselesaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selesainya infrastruktur pengganti infrastruktur yang rusak akibat luapan Lumpur, berupa relokasi jalan arteri sepanjang 7,1 km</li> <li>- 1 (satu) unit simpang susun Kesambi di Porong selesai dibangun</li> <li>- 2 (dua) Pipa air baku untuk PDAM Surabaya diameter 450 mm sepanjang @ 7,1 km telah terpasang</li> <li>- Pelapisan aspal beton relokasi jalan arteri Porong sepanjang 2 x 7,1 Km selesai dilaksanakan</li> <li>- Landscaping kiri dan kanan jalan relokasi arteri Porong dari masing-masing arah dari dan ke kota Surabaya, sepanjang 2 x 7,1 km telah selesai.</li> </ul>		

**USULAN PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS  
TEKNIS LAINNYA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR  
SIDOARJO**

**BIDANG SEKRETARIAT/KELEMBAGAAN**

<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)</b>	<b>USULAN KEGIATAN</b>	<b>UNIT ESELON 2</b>
<p>Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program anggaran dan pelaporan yang diukur dari :</p> <p><b>Indikator Kinerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan waktu tersusunnya dokumen perencanaan, program dan anggaran yang merupakan hasil koordinasi</li> <li>- LAKIP</li> <li>- Renstra</li> </ul>	<p>Penyiapan program anggaran serta laporan keuangan dan barang</p>	<p>Perencanaan Program dan Anggaran</p>
<p>Terciptanya organisasi dan tata laksana yang efektif yang diukur dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi ramping struktur kaya fungsi</li> <li>2. Terimplementasinya ketatalaksanaan yang ada.</li> <li>3. Terpenuhi kompetensi sesuai organisasi yang ada.</li> </ol> <p><b>Indikator Kinerja :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai.</li> <li>- Jumlah pejabat yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya.</li> <li>- Laporan ketersediaan sistem kepegawaian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem kepegawaian</li> <li>• Pedoman Pembinaan Pegawai</li> </ul> </li> </ul>	<p>Pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana.</p>	<p>Kepegawaian dan Umum</p>

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola karir</li> <li>- Tersedianya Data base kepegawaian</li> </ul>		
<p>Tersedianya peraturan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Bapel-BPLS yang diukur dari :</p> <p><b>Indikator Kinerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah peraturan yang ditetapkan</li> <li>- Jumlah sosialisasi dan penyebaran informasi tugas dan perkembangan permasalahan Bapel-BPLS</li> <li>- Meningkatnya pemahaman masyarakat luas terhadap tugas dan permasalahan yang dihadapi Bapel-BPLS dan penanganan bencana lumpur Sidoarjo</li> </ul>	<p>Penanganan masalah Hukum, Humas dan Sistem Informasi Manajemen</p>	<p>Hukum dan Humas</p>
<p>Terwujudnya tata kelola keuangan dan barang yang akuntabel, yang diukur dari :</p> <p><b>Indikator Kinerja:</b></p> <p>Rendahnya persentase temuan aparat pengawas terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sistem pengendalian intern.</p>	<p>Pengawasan Pengelolaan Keuangan</p>	<p>Pengawasan Intern</p>

Matriks Kinerja BAPEL-BPLS secara rinci dan Rincian Target Kegiatan Teknis dari masing-masing program dan pendanaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1.1., Lampiran 1.2., Lampiran 2.1., dan Lampiran 2.2. renstra ini.

### 3.2.6. Peran PT Lapindo Brantas

Sesuai dengan Perpres No. 14 Tahun 2007 penanggulangan bencana lumpur Sidoarjo beserta dampak ikutannya menjadi tanggung jawab BPLS dan PT Lapindo Brantas selaku pihak swasta yang melakukan pengeboran minyak di lokasi sumur

Banjar Panji 1 yang sempat diduga menjadi penyebab munculnya semburan lumpur pada waktu itu. Dalam Perpres tersebut BPLS dengan biaya yang dibebankan pada APBN bertanggung jawab atas penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dan penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo.

Di lain pihak, PT Lapindo Brantas dengan biayanya sendiri bertanggung jawab atas penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan melakukan pembelian tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo di dalam peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007, dengan pembayaran secara bertahap berdasarkan sertifikat tanah / akta jual-beli tanah / bukti kepemilikan tanah yang sah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, **serta bertanggung jawab atas upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama dan pengaliran luapan lumpur sampai ke Kali Porong.**

Tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam bidang sosial kemasyarakatan tersebut termasuk pemberian kompensasi gagal panen kepada petani, kompensasi kepada buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja oleh pabrik, serta kompensasi kepada usaha kecil dan pabrik yang lenyap dan ditenggelamkan lumpur di dalam peta area terdampak, bantuan kontrak rumah selama 2 (dua) tahun, serta biaya jaminan hidup dan bantuan biaya evakuasi kepada masyarakat terdampak.

Pada bulan September 2009 Pemerintah menetapkan **perubahan kedua** atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009. Perubahan mendasarkan dari Peraturan Presiden tersebut yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab PT Lapindo Brantas antara lain dengan diubahnya Pasal 9 yang mengatur tugas Deputi Bidang Operasi, diubahnya Pasal 15 yang antara lain mengubah tentang tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam pembiayaan penanggulangan semburan lumpur dan penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong.

Dengan perubahan kedua tersebut tanggung jawab penanganan semburan dan pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong menjadi tanggung jawab BAPEL-BPLS dengan pembiayaan dari APBN, sedang penyelesaian proses jual beli tanah dan bangunan di Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 yang belum dapat dituntaskan pembayarannya oleh PT Lapindo Brantas, tetap menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas. Dalam pelaksanaan proses jual beli tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak tersebut, PT Lapindo Brantas tetap dibantu oleh Tim Verifikasi

Tanah dan Bangunan yang dibentuk oleh BAPEL-BPLS yang beranggotakan berbagai instansi terkait sebagai berikut:

- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur
- Kepolisian Daerah Jawa Timur
- Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya
- Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
- Kepolisian Resor Sidoarjo
- Kejaksaan Negeri Sidoarjo
- Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo
- Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS)
- Perangkat desa (Camat di tiga kecamatan dan 12 Kepala Desa/Kelurahan).
- PT Minarak Lapindo Jaya.

Hingga bulan Juli 2009, PT Lapindo Brantas/ PT MLJ telah melakukan pembayaran atas jual beli tanah dan bangunan milik warga di wilayah Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sebesar Rp 1.896.047.000.000,- (59,61%) dari total kewajiban senilai Rp 3.942.592.000.000.

### 3.2.7. Peran pemerintah daerah dan masyarakat

Dalam penanggulangan bencana lumpur di Sidoarjo tersebut, BAPEL-BPLS senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, mengingat di samping masing-masing pemerintah daerah tersebut merupakan Anggota Dewan Pengarah, pemerintah daerah tersebut secara sendiri-sendiri juga mempunyai peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana lumpur Sidoarjo, baik dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan maupun dalam pengadaan lahan untuk relokasi infrastruktur.

Peran pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan antara lain:

- pemberian fasilitas penampungan sementara kepada para penduduk yang mengungsi di Pasar Baru Porong.
- pembukaan pos kesehatan bagi masyarakat terdampak.
- bantuan alat angkut bagi anak sekolah yang orang tuanya mengungsi di Pasar Baru Porong.

- sosialisasi, fasilitasi, mediasi, serta pendekatan individual berupa klarifikasi, konsultasi, pemberian penjelasan dan motivasi kepada penduduk terdampak, para pengunjung rasa, atau dalam rangka pertemuan warga terdampak dengan PT Lapindo Brantas.
- pemberian biaya bantuan gagal panen kepada para petani.
- penempatan pejabat/stafnya dalam Tim Verifikasi Jual Beli Tanah dan Bangunan.
- Penyediaan tangki air di beberapa desa yang air tanahnya tercemar.
- Peran satlak penanggulangan bencana secara langsung dalam menangani korban bencana
- Bantuan modal usaha bagi eks peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh Bapel BPLS.

### 3.2.8. Strategi Pendanaan

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BAPEL-BPLS dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 serta usulan program dan kegiatan masing-masing unit organisasi, dan tanggung jawab PT Lapindo Brantas dalam penyelesaian proses jual beli tanah dan bangunan warga terdampak, strategi pendanaan yang diusulkan untuk mencapai target dalam Renstra BAPEL-BPLS tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

SUMBER PENDANAAN	TARGET PENDANAAN
Pemerintah Pusat (APBN)	Rp 7.210.839.100
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (APBD)	Rp. 500.000
PT Lapindo Brantas	Rp 2.046.545.000
<b>Total Pendanaan</b>	<b>Rp 9.257.884.100</b>

Rincian target pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) sebagaimana tersebut dalam lampiran 2.2.

Jumlah kebutuhan dana APBN sebesar Rp 7.210.839.100 termasuk kebutuhan dana sebesar Rp 3.785.669.280 untuk program *contingency* pembebasan tanah dan pemberian bantuan sosial bagi penduduk/ warga di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dan 17 Juli 2008, yang baru akan dialokasikan apabila terdapat kejadian yang tidak diduga dan besar pengaruhnya bagi kehidupan sosial kemasyarakatan penduduk/ warga di luar peta area terdampak dimaksud.

## BAB IV PENUTUP

Rancangan Rencana Strategik (RENSTRA) BAPEL - BPLS tahun 2010 - 2014 merupakan dokumen Renstra Kedua BAPEL-BPLS yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2010-2014.

Rancangan RENSTRA ini merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) serta Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-KL) BAPEL – BPLS setiap tahunnya. Rancangan RENSTRA ini juga merupakan acuan perencanaan bagi semua unit organisasi di lingkungan BAPEL – BPLS dalam upaya penanggulangan semburan dan luapan lumpur Sidoarjo beserta dampaknya, dan bagi PT Lapindo Brantas dalam penyelesaian pembayaran proses jual beli tanah dan bangunan warga yang masuk Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan upaya penanggulangan semburan dan luapan lumpur Sidoarjo beserta dampak yang menyertainya tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen rancangan RENSTRA ini, namun ditentukan pula oleh adanya dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas (khususnya masyarakat terdampak), serta tuntutan kerja keras kepada seluruh jajaran BAPEL – BPLS dan PT Lapindo Brantas dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan semua upaya yang dilakukan tersebut, harapan dari semua pihak agar dampak semburan dan luapan lumpur Sidoarjo tidak meluas dan segera diatasi dapat terlaksana, sehingga pulihnya sendi kehidupan yang dinamis dan aman dari dampak fenomena gunung lumpur di Sidoarjo pada tahun 2014 dapat terwujud.

---

# LAMPIRAN

Lampiran 1.1.**MATRIKS KINERJA BADAN PELAKSANA – BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BAPEL – BPLS)**

- NAMA KEMENTERIAN/ LEMBAGA** : **BADAN PELAKSANA – BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO**  
**VISI** : Pulihnya Sendi Kehidupan Yang Dinamis Dari Dampak Fenomena Gunung Lumpur di Sidoarjo Pada Tahun 2014  
**MISI** : Menanggulangi Semburan Dan Luapan Lumpur Serta Menangani Masalah Sosial Kemasyarakatan Dan Infrastruktur Dengan Memperhatikan Risiko Lingkungan Yang Terkecil.  
**TUPOKSI** : Menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil.

TUJUAN	SASARAN KINERJA BAPEL BPLS	INDIKATOR KINERJA SASARAN BAPEL - BPLS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	USULAN PROGRAM
Terlindunginya warga dari bencana geologi.	Pengurangan dampak fenomena geologi.	Terlaksananya prinsip pola pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong.  Cepatnya antisipasi dampak fenomena geologi dan penanganannya.	Memberikan rasa aman kepada penduduk yang bermukim di wilayah pengaruh bencana lumpur Sidoarjo yang diukur dari: - volume luapan lumpur yang dapat dialirkan ke Kali Porong - tersedianya informasi yang akurat tentang kondisi geologi dan tata lingkungan di wilayah pengaruh bencana lumpur Sidoarjo. - jangka waktu penanganan/ penyelesaian dampak	Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo
Pulihnya kehidupan sosial masyarakat.	Pengurangan dampak sosial masyarakat.	Jumlah warga terdampak yang masalah sosial kemasyarakatannya telah selesai dituntaskan.	Terpenuhinya hak-hak dasar warga terdampak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perpres yang diukur dari penyelesaian: - pemberian bantuan sosial; - perlindungan sosial; dan - pemulihan sosial.	Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo
Pulihnya infrastruktur jalan dan terbangunnya infrastruktur luapan lumpur melalui Kali Porong.	Lancar dan amannya pengaliran luapan lumpur dan banjir ke laut.	Lumpur yang dialirkan ke Kali Porong dapat tergelontor sampai laut di muara Kali Porong.  Tidak adanya luapan lumpur dan/atau banjir meluap dari	Terjaganya kemampuan dan keamanan Kali Porong dalam mengalirkan luapan lumpur dan banjir, yang diukur dari daya tampung Kali Porong dalam pengaliran luapan lumpur dan banjir.  Terjaganya kemampuan tanggul dalam menahan lumpur yang diukur dari tinggi jagaan.	Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo

TUJUAN	SASARAN KINERJA BAPEL BPLS	INDIKATOR KINERJA SASARAN BAPEL - BPLS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	USULAN PROGRAM
	Lancarnya arus barang dan jasa pada Infrastruktur jalan yang telah direlokasi.	tanggul luar Peta Area Terdampak.  Peningkatan aktivitas distribusi barang dan jasa pada infrastruktur jalan yang telah direlokasi.	Berfungsinya infrastruktur jalan alternatif dan jalan relokasi yang diukur dari mulai digunakannya infrastruktur jalan yang bersangkutan untuk kepentingan umum.	
Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang handal.	Mewujudkan organisasi berbasis kinerja yang efektif, efisien, dinamis, responsif, dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan tugas.	Penguatan sumberdaya, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.	Meningkatnya kinerja tahunan BAPEL-BPLS yang diukur dari capaian kinerja sasaran dalam LAKIP.  Meningkatnya prosentase penanganan dan/ atau terselesaikannya keluhan masyarakat yang diukur dari jumlah keluhan dan ditangani atau diselesaikan.  Mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan Bapel BPLS yang diukur/dilihat dari opini yang diberikan oleh BPK dalam hasil audit laporan keuangan BAPEL- BPLS..	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Lampiran 1.2.(1)**MATRIKS KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAKSANA – BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BAPEL – BPLS)****BIDANG OPERASI****USULAN PROGRAM: PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO**

<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)</b>	<b>USULAN KEGIATAN</b>	<b>UNIT ESELON 2</b>
Memberikan rasa aman kepada penduduk yang bermukim di wilayah pengaruh bencana lumpur Sidoarjo yang diukur dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- volume luapan lumpur yang dapat dialirkan ke Kali Porong</li> <li>- tersedianya informasi yang akurat tentang kondisi geologi dan tata lingkungan di wilayah pengaruh bencana lumpur Sidoarjo.</li> <li>- jangka waktu penanganan/ penyelesaian dampak</li> </ul>	Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong, yang diukur dari:  <b>Indikator Kinerja :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya perencanaan pengendalian operasi pengaliran lumpur ke arah selatan kolam penampungan lumpur dengan dipompa ke Kali Porong</li> <li>- Tersedianya data pengukuran BM dan TTG di wilayah sekitar pusat semburan</li> <li>- Tersedia laporan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur</li> </ul>	Perencanaan Operasi Luapan Lumpur	Perencanaan Operasi
	Terlaksananya pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong, yang diukur dari:  <b>Indikator Kinerja :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah lumpur yang terpompa ke Kali Porong = 200 juta m<sup>3</sup> selama tahun 2010 - 2014</li> <li>- Kolam penampungan tetap aman terhadap curah hujan 200 mm/hari selama 3 hari</li> <li>- Terbentuknya sistem operasi yang aman meskipun aktivitas pemompaan berhenti selama 7 hari akibat masalah sosial.</li> <li>- Pengaliran lumpur ke Kali Porong dapat dihentikan selama 3 bulan pada musim kemarau, kolam masih mampu menampung luapan Lumpur</li> </ul>	Penanganan Luapan Lumpur	Penanganan Semburan dan Luapan Lumpur
	Meningkatkan kemampuan penyediaan data dan informasi fenomena geologi dan penanganan bencana geologi.	Mitigasi dan penanganan bencana geologi, dan	Mitigasi Bencana

INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( <i>OUTCOME</i> )	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
	<b>Indikator Kinerja:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah laporan/kajian/analisa penanganan semburan dan luapan lumpur.</li> <li>- Tersedianya data surface dan subsurface sebagai bahan perencanaan penanggulangan semburan dan penanganan luapan lumpur ke Kali Porong.</li> <li>- Tersedianya data subsidence akibat pengaruh deformasi geologi.</li> </ul>	monitoring lingkungan.	

Lampiran 1.2 (2)**MATRIKS KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAKSANA – BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BAPEL – BPLS)****BIDANG SOSIAL****USULAN PROGRAM: PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>Terpenuhinya hak-hak dasar warga terdampak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perpres yang diukur dari penyelesaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemberian bantuan sosial;</li> <li>- perlindungan sosial; dan</li> <li>- pemulihan sosial.</li> </ul>	<p>Meningkatnya kualitas penyusunan rencana di bidang sosial masyarakat, yang diukur dari :</p> <p><b>Indikator Kinerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terfasilitasinya perolehan kesempatan kerja buruh-buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau anggota keluarganya yang dewasa pada 18 desa sebanyak 2.200 orang.</li> <li>- Tersedianya data monografi dan permasalahan yang berkembang di desa terdampak (baik di dalam maupun di luar peta area terdampak) sebanyak 18 desa</li> <li>- Tersedianya data dan permasalahan sosial yang berkembang di desa terdampak (baik di dalam maupun di luar peta area terdampak), sebanyak 18 desa.</li> <li>- Ketersediaan perencanaan kajian pengembangan bidang sosial dan ekonomi 5 kajian/laporan.</li> </ul>	<p>Perencanaan dan Pengelolaan Pemulihan Sosial</p>	<p>Perencanaan dan Pemulihan Sosial.</p>
	<p>Terselenggaranya bantuan sosial masyarakat warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo, yang diukur dari:</p> <p><b>Indikator Kinerja :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tertanganinya penyaluran bantuan sosial warga yang berada di luar peta terdampak yang kondisi air tanah tidak layak minum di 12 desa, untuk 5408 KK/19476 jiwa, 20 l/orang/hari</li> <li>- Terlaksananya tanggap darurat bagi warga yang berada di luar peta terdampak yang kondisi rumah dan tempat tinggalnya membahayakan keselamatan jiwa. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan dapur umum 500 or/14hr, 7 kali/lokasi.</li> <li>• Perawatan kesehatan dan obat-obatan 1 paket.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Pengelolaan Penanganan Bantuan Sosial</p>	<p>Penanganan Bantuan Sosial</p>

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan pemakaman untuk 40 orang</li> <li>- Terlaksananya pemberian bantuan sosial kepada 3 Desa ( Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan) berupa biaya:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jadup selama 6 bulan 1.666/KK, 6.094 jiwa</li> <li>• Kontrak rumah 1 tahun untuk 1.666 KK</li> </ul> </li> <li>- Terlaksananya bantuan sosial penyelamatan warga di 9 RT (desa Mindi, Siring dan Jatirejo) yang kondisi rumah dan tempat tinggalnya membahayakan keselamatan jiwa berupa biaya :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jadup selama 6 bulan untuk 2.970 jiwa.</li> <li>• Evakuasi untuk 867 KK</li> <li>• Bantuan Pemukiman Sementara/Kontrak 867 KK</li> </ul> </li> <li>- Terlaksananya bantuan sosial program contingency warga di luar peta area terdampak.</li> </ul>		
	<p>Terlaksananya perlindungan sosial terhadap warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo, yang diukur dari:</p> <p><b>Indikator Kinerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pembayaran jual beli tanah dan bangunan di 3 (tiga) desa: Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan total 1.800 bidang dengan luas lahan 66,5 Ha dan luas bangunan 236.780,33 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Terlaksananya program contingency untuk pembebasan tanah dan bangunan di desa-desa yang sudah tidak lagi layak huni di luar Peta Area Terdampak.</li> <li>- Terlaksananya proses verifikasi terhadap berkas permohonan jual beli tanah dan bangunan sebanyak 14.000 berkas di 12 desa wilayah Peta area Terdampak 22 Maret 2007.</li> <li>- Terlaksananya pemahaman proses jual beli tanah dan bangunan kepada 14.000 KK di 12 desa terdampak, serta pemberian bantuan sosial.</li> <li>- Terbentuk dan berfungsinya Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi berkas permohonan jual beli tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur, yang berada di dalam PAT 22 Maret 2007;</li> <li>- Terlaksananya pengawasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berupa jual beli tanah dan bangunan, ganti rugi pabrik, sawah dan buruh yang tidak produktif serta bantuan sosial yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas / PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ);</li> </ul>	Peningkatan dan Pengelolaan Penanganan Perlindungan Sosial	Perlindungan Sosial

Lampiran 1.2.(3)**MATRIKS KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAKSANA – BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BAPEL – BPLS)****BIDANG INFRASTRUKTUR****USULAN PROGRAM: PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>Terjaganya kemampuan dan keamanan Kali Porong dalam mengalirkan luapan lumpur dan banjir, yang diukur dari daya tampung Kali Porong dalam pengaliran luapan lumpur dan banjir.</p> <p>Terjaganya kemampuan tanggul dalam menahan lumpur yang diukur dari tinggi jagaan</p> <p>Berfungsinya infrastruktur jalan alternatif dan jalan relokasi yang diukur dari mulai digunakannya infrastruktur jalan yang bersangkutan untuk kepentingan umum.</p>	<p>Meningkatkan kualitas penyusunan rencana penanganan infrastruktur dan relokasi infrastruktur, yang diukur dari:</p> <p><b>Indikator kuantitas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan review disain infrastruktur relokasi jalan arteri Porong serta laporan supervisi / pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan relokasi jalan Arteri, Simpang Susun Kesambi dan PDAM</li> <li>- Laporan Supervisi / pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur luapan lumpur</li> <li>- Laporan Review Design infrastruktur luapan lumpur, perbaikan sistem drainase, pengamanan Kali Porong dan peningkatan/ pemeliharaan jalan lingkungan.</li> <li>- Laporan Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan Muara Kali Porong</li> <li>- Laporan disain pengembangan kawasan sekitar semburan</li> </ul>	Perencanaan pembangunan infrastruktur	Perencanaan Infrastruktur
	<p>Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pembangunan/pemeliharaan penanganan infrastruktur akibat luapan lumpur Sidoarjo, yang diukur dari:</p> <p><b>Indikator kuantitas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbangun tanggul luar 3 desa dan Gempolsari, panjang total sekurang-kurangnya 3.500 m.</li> <li>- Selesai perbaikan saluran irigasi dan drainase dengan panjang masing-masing, sekurang-kurangnya 1.500 m.</li> <li>- Terbangunnya 1 unit bangunan pelimpah</li> <li>- Selesai perbaikan sistem drainase Kali Ketapang sepanjang 15,0 km.</li> <li>- Selesai pembangunan infrastruktur lindungan tebing pengaman banjir di Kali Porong sepanjang 2.700 m untuk mengalirkan air banjir dan lumpur ke laut.</li> </ul>	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan Lumpur	Penanganan dan Pengamanan Infrastruktur

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selesai pembangunan Groundsil di Kali Porong</li> <li>- Selesai normalisasi alur Kali Porong di muara melalui pengerukan endapan sebesar 500.000 m<sup>3</sup></li> <li>- Selesai peningkatan/ pemeliharaan jalan dengan panjang total jalan lingkungan Mindi 1,5 km;</li> <li>- Selesainya pemeliharaan tanggul yang mengalami subsidence</li> <li>- Lancarnya aliran banjir K. Porong sebesar 1.600 m<sup>3</sup>/det dengan hilangnya endapan lumpur dengan upaya agitasi di Kali Porong.</li> <li>- Selesainya pengembangan kawasan sekitar semburan untuk wisata geologi.</li> </ul>		
	<p>Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pembangunan/ pemeliharaan penanganan infrastruktur pengganti akibat luapan lumpur Sidoarjo, yang diukur dari :</p> <p><b>Indikator Kuantitas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Tanah Lahan areal pelaksanaan relokasi jalan Arteri Porong dan Jalan Tol Gempol Porong seluas 123,77 HA diselesaikan.</li> <li>- Selesaiya infrastruktur pengganti infrastruktur yang rusak akibat luapan Lumpur, berupa relokasi jalan arteri sepanjang 7,1 km</li> <li>- 1 (satu) unit simpang susun Kesambi di Porong selesai dibangun</li> <li>- 2 (dua) Pipa air baku untuk PDAM Surabaya diameter 450 mm sepanjang @ 7,1 km telah terpasang</li> <li>- Pelapisan aspal beton relokasi jalan arteri Porong sepanjang 2 x 7,1 Km selesai dilaksanakan</li> <li>- Landscaping kiri dan kanan jalan relokasi arteri Porong dari masing-masing arah dari dan ke kota Surabaya, sepanjang 2 x 7,1 km telah selesai.</li> </ul>	Pembangunan relokasi Infrastruktur	Pembangunan Relokasi Infrastruktur

Lampiran 1.2.(4)**MATRIKS KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAKSANA – BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BAPEL – BPLS)****BIDANG SEKRETARIAT/KELEMBAGAAN****USULAN PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
<p>Meningkatnya kinerja tahunan BAPEL-BPLS yang diukur dari capaian kinerja sasaran dalam LAKIP</p> <p>Meningkatnya prosentase penanganan dan/ atau terselesaikannya keluhan masyarakat yang diukur dari jumlah keluhan dan ditangani atau diselesaikan.</p> <p>Mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan Bapel BPLS yang diukur/dilihat dari opini yang diberikan oleh BPK dalam hasil audit laporan keuangan BAPEL- BPLS.</p>	<p>Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program anggaran dan pelaporan yang diukur dari :</p> <p><b>Indikator Kinerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketepatan waktu tersusunnya dokumen perencanaan, program dan anggaran yang merupakan hasil koordinasi</li> <li>- LAKIP</li> <li>- Renstra</li> </ul>	<p>Penyiapan program anggaran serta laporan keuangan dan barang</p>	<p>Perencanaan Program dan Anggaran</p>
	<p>Terciptanya organisasi dan tata laksana yang efektif yang diukur dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi ramping struktur kaya fungsi</li> <li>2. Terimplementasinya ketatalaksanaan yang ada</li> <li>3. Terpenuhi kompetensi sesuai organisasi yang ada</li> </ol> <p><b>Indikator Kinerja :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai.</li> <li>- Jumlah pejabat yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya.</li> <li>- Laporan ketersediaan sistem kepegawaian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem kepegawaian</li> <li>• Pedoman Pembinaan Pegawai</li> <li>• Pola karir</li> </ul> </li> <li>- Tersedianya data base kepegawaian</li> </ul>	<p>Pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana</p>	<p>Kepegawaian dan Umum</p>

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN KEGIATAN	UNIT ESELON 2
	<p>Tersedianya peraturan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Bapel-BPLS yang diukur dari :</p> <p><b>Indikator Kinerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah peraturan yang ditetapkan</li> <li>- Jumlah sosialisasi dan penyebaran informasi tugas dan perkembangan permasalahan Bapel-BPLS</li> <li>- Meningkatnya pemahaman masyarakat luas terhadap tugas dan permasalahan yang dihadapi Bapel-BPLS dan penanganan bencana lumpur Sidoarjo</li> </ul>	<p>Penanganan masalah Hukum, Humas dan Sistem Informasi Manajemen</p>	<p>Hukum dan Humas</p>
	<p>Terwujudnya tata kelola keuangan dan barang yang akuntabel, yang diukur dari :</p> <p><b>Indikator Kinerja:</b></p> <p>Rendahnya persentase temuan aparat pengawas terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sistem pengendalian intern.</p>	<p>Pengawasan Pengelolaan Keuangan</p>	<p>Pengawasan Intern</p>

Lampiran 2.1.

**MATRIKS TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014  
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO**

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO</b>							
<b>1.</b>	<b>Perencanaan operasi luapan lumpur</b>	<b>Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong</b>						<b>Perencanaan Operasi</b>
a.	Survey Geologi	Data geologi permukaan dan bawah permukaan  Tersedianya data: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laju subsidence</li> <li>• Volume kolam tampungan dan laju luapan lumpur</li> <li>• Sistem geohidrologi wilayah PAT dan luar PAT</li> <li>• Dampak luapan lumpur terhadap kondisi lingkungan</li> </ul>	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
b.	Pengukuran titik referensi dan Kali Porong	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta topografi wilayah area terdampak dan luar terdampak</li> <li>• Profil Kali Porong</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya data pengukuran titik referensi di wilayah sekitar pusat semburan</li> <li>• Tersedianya profil cross dan long Kali Porong</li> </ul>	Data pengukuran 25 km (2 lap)					
c.	Review Perencanaan Penanggulangan semburan dan	Tersedianya perencanaan penanggulangan semburan dan penanganan luapan lumpur  Tersusunnya perencanaan pengendalian operasi pengaliran lumpur ke arah selatan kolam penampungan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
	pengaliran luapan lumpur	lumpur dengan dipompa ke Kali Porong						
d. Pengadaan alat lab	Tersedianya alat pantau deformasi geologi	Jumlah: <ul style="list-style-type: none"> <li>Alat pantau geofisika = 2 unit</li> <li>Alat pantau geodetik = 7 unit</li> <li>Perangkat lunak = 2 paket</li> </ul>		1 unit 3 unit 2 paket	2 unit	2 unit	1 unit	
e. Studi Geothermal	Tersedianya data sumber air dan lumpur	Data radioisotop air dan unsur-unsur langka yang terkandung dalam lumpur		1 laporan				
f. Pemantauan bawah permukaan	Tersedianya informasi struktur batuan bawah permukaan	Data geofisika	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
<b>2. Penanganan luapan lumpur</b>	<b>Terlaksananya pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong</b>							<b>Penanganan Semburan dan Luapan Lumpur</b>
a. Penanggulangan luapan lumpur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya potensi bahaya dan meluasnya dampak luapan lumpur dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong secara aman dan efektif.</li> <li>Pengaliran lumpur dari pusat semburan ke Kali Porong dengan aman, efektif, serta resiko terkecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beroperasinya sistem pengaliran lumpur dengan kapal keruk.</li> <li>Debit lumpur yang dialirkan ke kali Porong</li> </ul>	Beroperasinya 6 unit kapal keruk  27 juta m <sup>3</sup> lumpur	Beroperasinya 8 unit kapal keruk  32,4 juta m <sup>3</sup> lumpur	Beroperasinya 12 unit kapal keruk  48 juta m <sup>3</sup> lumpur	Beroperasinya 12 unit kapal keruk  48 juta m <sup>3</sup> lumpur	Beroperasinya 12 unit kapal keruk  48 juta m <sup>3</sup> lumpur	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
<b>3. Mitigasi dan penanganan bencana geologi dan monitoring lingkungan</b>	<b>Meningkatnya kemampuan penyediaan data dan informasi fenomena geologi dan penanganan bencana geologi</b>							<b>Mitigasi Bencana</b>
a. Pengadaan alat studio	Tersedianya alat studio	Alat monitoring CCTV dan telemetri = 8 unit	3 unit	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
b. Pemantauan dan penanganan mitigasi	Tersedianya data monitoring permukaan dampak deformasi geologi	Tersedianya data: bubble, waking, crack, dan amblesan tanah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
<b>4. Perencanaan dan pengelolaan pemulihan sosial</b>	<b>Meningkatnya kualitas penyusunan rencana di bidang sosial kemasyarakatan</b>							<b>Perencanaan dan Pemulihan Sosial</b>
a. Pendidikan dan pelatihan teknis/ keterampilan	Terlaksanakannya beberapa jenis pelatihan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan Jahit Sepatu</li> <li>▪ Pelatihan Sulam Pita</li> <li>▪ Pelatihan Otomotif</li> <li>▪ Pelatihan Olah Pangan</li> <li>▪ Pelatihan Penanganan Bencana</li> <li>▪ DII</li> </ul>	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan ketrampilan	9 Angkatan, 350 orang	10 Angkatan, 400 orang				
b. Penyuluhan dan penyebaran	Penyuluhan di 18 Desa	Tersedianya data dari permasalahan sosial yang	98 Kegiatan	98 Kegiatan	98 Kegiatan	98 Kegiatan	98 Kegiatan	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
informasi (sosialisasi) dan musyawarah		berkembang di desa terdampak (baik di dalam maupun di luar peta area terdampak)						
c. Observasi sosial, pemantauan dan pencatatan kondisi lingkungan	Observasi di 18 Desa	Tersedianya data monografi dan permasalahan yang berkembang di desa terdampak ( baik di dalam maupun di luar peta area terdampak)	144 Kegiatan					
d. Kajian pengembangan sosial dan ekonomi	Kajian di 3 Kecamatan (Kecamatan Jabon, Porong, dan Tanggulangin)	Ketersediaan perencanaan kajian pengembangan bidang sosial dan ekonomi	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
e. Koordinasi penanganan masalah pendidikan dan kesehatan	Koordinasi di daerah menurut area terdampak 22 Maret 2007 dan daerah di luar area terdampak Perpres 48 / 2008	Melaksanakan koordinasi penanganan masalah pendidikan dan kesehatan	1 Laporan					
<b>5. Pengelolaan penanganan bantuan sosial.</b>	<b>Terselenggaranya bantuan sosial kemasyarakatan warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo.</b>							<b>Penanganan Bantuan Sosial</b>
a. Pemberian bantuan air bersih	Pemberian bantuan air bersih	Tertangani penyaluran bantuan sosial air bersih bagi kondisi air tanah tidak layak minum	2 tangki (5000 L), 12 desa, 180 hari	2 tangki (5000 L), 12 desa, 180 hari	2 tangki (5000 L), 12 desa, 180 hari	2 tangki (5000 L), 12 desa, 180 hari	2 tangki (5000 L), 12 desa, 180 hari	
b. Pengadaan dapur umum bagi warga di 18 desa yang terdampak	Dapur umum di 18 Desa	Terlaksananya tanggap darurat bagi warga yang berada di luar peta terdampak yang kondisi	500 jiwa/14 hari, 7 kali/lokasi					

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
bencana		rumah dan tinggalnya membahayakan keselamatan jiwa						
c. Pengadaan PPPK dan bantuan obat-obatan	Pengadaan PPPK dan bantuan obat-obatan di 18 Desa		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
d. Bantuan pemakaman	Bantuan pemakaman di 18 Desa	Tersalurkannya bantuan pemakaman untuk warga di 18 Desa	40 org / thn	40 org / thn				
e. Bantuan sosial berupa bantuan kontrak rumah untuk:								
1) 1.666 KK warga di 3 desa (Besuki, Kedungcangkri ng, Pejarakan)	Pemberian bantuan sosial di 3 Desa	Terlaksananya bantuan sosial berupa kontrak rumah, evakuasi dan jaminan hidup	1.666 KK / 6.094 Jiwa					
2) 900 KK warga di 9 RT (Kelurahan Jatirejo, Siring, dan Mindi)	Pemberian bantuan sosial di 9 RT	Tersalurkannya biaya jadup dan evakuasi untuk warga di 9 RT yang kondisi tempat tinggalnya membahayakan keselamatan jiwa	900 KK / 2.970 Jiwa	900 KK / 2.970 Jiwa	900 KK / 2.970 Jiwa	900 KK / 2.970 Jiwa		
3) Bantuan sosial program contingency warga di luar peta area terdampak	Pemberian bantuan sosial di luar peta area terdampak	Terlaksananya bantuan sosial program <i>contingency</i>		5.206 KK/ 18.755 jiwa	5.206 KK/ 18.755 jiwa			

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
<b>6. Peningkatan dan pengelolaan perlindungan sosial</b>	<b>Terlaksananya perlindungan sosial terhadap warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo.</b>							<b>Perlindungan Sosial</b>
a. Pembayaran jual beli tanah dan bangunan di 3 desa	Pembayaran jual beli tanah di 3 Desa	Terbayarnya bidang tanah di 3 Desa	1.800 Bidang	1.800 Bidang	1.800 Bidang			
b. Fasilitasi pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan yang dilaksanakan oleh PT MLJ	Terbentuk dan berfungsinya Tim Verifikasi	Terverifikasinya berkas warga yang akan dibeli oleh PT MLJ	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
c. Program contingency untuk pembebasan tanah dan bangunan di desa-desa yang sudah tidak lagi layak huni di luar Peta Area Terdampak	Terlaksanakannya pembebasan tanah dan bangunan di luar peta area terdampak	Terlaksananya program contingency untuk pembebasan tanah dan bangunan warga seluas 535 Ha		107 Ha	107 Ha	160,5 Ha	160,5 Ha	
d. Pemantauan pelaksanaan penanganan masalah kompensasi gagal panen, upah buruh yang	Pemantauan kompensasi yang dilakukan PT. Minarak Lapindo Jaya	Terlaksananya kompensasi yang dilakukan PT Minarak Lapindo Jaya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
dilaksanakan oleh PT Minarak Lapindo Jaya.								
e. Pengawasan pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan oleh PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ)	Pelaksanaan Verifikasi berkas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh PT MLJ	Jumlah berkas yang lolos verifikasi	14.000 Berkas	14.000 Berkas	14.000 Berkas			
<b>7. Perencanaan pembangunan infrastruktur</b>	<b>Meningkatkan kualitas penyusunan rencana penanganan infrastruktur dan relokasi infrastruktur</b>							<b>Perencanaan Infrastruktur</b>
a. Disain dan supervisi pembangunan Jalan Arteri dan pipa PDAM KMS	Terlaksananya desain dan supervisi pelaksanaan relokasi jalan arteri dan pipa PDAM KMS	Tersedianya Laporan desain dan supervisi / pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan relokasi jalan arteri dan pipa PDAM:  1) Lanjutan Supervisi pembangunan jalan arteri  2) supervisi pembangunan Simpang Susun Kesambi  3) Supervisi Pembangunan pipa PDAM KMS  4) Desain relokasi jalan arteri dan PDAM	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		(tambahan) akibat deformasi 5) Supervisi pembangunan jalan arteri, PDAM (tambahan)			1 paket			
b. Desain dan supervisi pembangunan infrastruktur luapan lumpur	Terlaksananya kegiatan review disain dan supervisi untuk pelaksanaan infrastruktur luapan lumpur	Tersedianya review disain dan supervisi infrastruktur luapan lumpur 1) supervisi pembangunan infrastruktur luapan lumpur 2) Studi dan detail desain penanggulang-an lumpur Sidoarjo berbasis keberlanjutan 3) Studi dan detail desain penataan dan pengembang-an muara Kali Porong	1 paket  1 paket  1 paket	1 paket  1 paket  1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
<b>8. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur</b>	<b>Memberikan rasa aman masyarakat di sekitar semburan lumpur dan menyediakan infrastruktur untuk percepatan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat/ Jawa Timur</b>							<b>Penanganan dan Pengamanan Infrastruktur</b>
a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur	Terlaksananya pengamanan kawasan pemukiman dan infrastruktur di luar PAT akibat luapan lumpur Sidoarjo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terbangun tanggul luar 3 desa dan Gempolsari panjang total sekurang-kurangnya 3.500 m</li> <li>▪ Selesaiya perbaikan</li> </ul>	3.500 m   1.500 m					

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		<p>saluran irigasi dan drainase dengan panjang masing-masing, sekurang-kurangnya 1.500 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terbangunnya 1 unit bangunan pelimpah</li> <li>▪ Perbaiki sistem drainase dan K Ketapang sepanjang 22 km dan saluran irigasi.</li> <li>▪ Selesaiya pembangunan groundsill di Kali Porong</li> <li>▪ Selesaiya normalisasi alur Kali Porong di muara melalui pengerukan endapan sebesar 500.000 m<sup>3</sup></li> <li>▪ Selesaiya peningkatan/pemeliharaan jalan dengan panjang total jalan lingkungan Minda 1,5 km;</li> <li>▪ Pemeliharaan tanggul yang mengalami <i>subsidence</i> akibat deformasi geologi</li> </ul>	1 unit	5 km	10 km	7 km		
			1 unit					
			500.000 m <sup>3</sup>					
			1,5 km					
			3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	
b. Penataan dan Pengembangan wilayah	Tertatanya lingkungan permukiman yang sehat, serta kelancaran arus barang,	1) Perbaikan jalan, drainase dan penataan lingkungan sekitar jalan arteri Porong	2 paket		2 paket		2 paket	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
berdekatan dengan PAT	jasa dan masyarakat	dan jalan alternatif total 5,8 km						
		2) Pembangunan kawasan riset 10 Ha	1 paket	2 paket				
		3) Perbaikan pipa PDAM tipe exposed 1,2 km	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	
c. Revitalisasi Kali Ketapang	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung K. Ketapang dalam mengalirkan debit banjir	1) Pembebasan tanah 53,25 Ha		53,25 Ha				
		2) Normalisasi Kali Ketapang 24 km		10 km	14 km			
		3) Pembuatan jalan inspeksi Kali Ketapang 20 km		8 km	8 km	4 km		
		4) Perbaikan dam Penatarsewu (rubber dam) 1 unit			1 paket	1 paket		
		5) Normalisasi Kali Jatianom, Kali Datar dan Kali Buyuk total 21 km		21 km				
d. Penataan dan pengembangan muara Kali Porong	Tertata dan terlindunginya alur muara Kali Porong	1) Penataan kawasan reklamasi muara Kali porong	1 paket	2 paket	1 paket			
		2) Pembuatan dermaga beserta fasilitasnya		1 paket	1 paket			
		3) Perbaikan/peningkatan jalan Porong ke Muara Kali Porong total 17 km		7 km	10 km			
<b>9. Pembangunan relokasi</b>	<b>Menyediakan infrastruktur untuk percepatan pemulihan</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan</b>						<b>Pembangunan Relokasi</b>

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
<b>Infrastruktur</b>	<b>kehidupan sosial ekonomi masyarakat/Jawa Timur</b>	<b>pembangunan/pemeliharaan penanganan infrastruktur akibat luapan lumpur Sidoarjo</b>						<b>Infrastruktur</b>
a. Melanjutkan pengadaan tanah	Kelancaran pelaksanaan pembangunan relokasi jalan arteri maupun jalan tol Gempol Porong	Pengadaan Tanah Lahan areal pelaksanaan relokasi jalan Arteri Porong dan Jalan Tol Gempol Porong seluas 123,77 HA diselesaikan	24,76 Ha					
b. Melanjutkan pembangunan jalan arteri	Kelancaran arus barang/jasa dan masyarakat dari Surabaya menuju Pasuruan/Malang dan sebaliknya	Melanjutkan pembangunan fisik jembatan, jalan arteri siring – Porong sepanjang 2 x 7,1 km (4 paket)	9,9 Km					
c. Pembangunan simpang susun Kesambi	Kelancaran arus barang/jasa dan masyarakat dari Sidoarjo menuju Kawasan Pengembangan dan Pemukiman Baru, pengganti kota Porong	1 (satu) unit simpang susun Kesambi di Porong selesai dibangun		1 paket				
d. Pembangunan relokasi pipa PDAM	Pengaliran air bersih dari Umbulan di Pasuruan dan dari Tamanan di Pandaan menuju Sidoarjo dan Surabaya tidak mengalami hambatan	2 (dua) Pipa air baku untuk PDAM Surabaya diameter 450 mm sepanjang @ 7,1 km telah terpasang			7,1 km			
e. Pelapisan aspal beton jalan arteri	Kelaikan jalan bagi pengendara kendaraan yang lewat di jalan arteri	Pelapisan aspal beton relokasi jalan arteri Porong sepanjang 2 x 7,1 Km selesai				2 x 7,1 km		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		dilaksanakan						
f. Pembuatan landscaping di kiri – kanan jalan Relokasi Arteri Porong	Kenyamanan dan keamanan bagi pengendara	Landscaping kiri dan kanan jalan Relokasi Arteri dari masing-masing arah dari dan ke kota Surabaya, sepanjang 2 x 7,10 km telah selesai				2 x 7,1 km		
g. Pembangunan relokasi ruas di Desa Pamotan	Pengamanan jalan arteri dari bahaya dampak deformasi geologi	Jalan relokasi ruas arteri baru di Desa Pamotan selesai dibangun total 1,5 km					1,5 km	
<b>B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO</b>								
<b>1. Peningkatan dan pengelolaan perencanaan, program dan anggaran</b>	<b>Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program anggaran dan pelaporan</b>							<b>Perencanaan, Program dan Anggaran</b>
a. Penyusunan Renstra	Tersedianya Renstra Bapel BPLS	Tersedianya Renstra tepat pada waktunya			1 laporan			
b. Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP Bapel BPLS	Penyusunan LAKIP tepat pada waktunya	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
<b>2. Peningkatan dan pengelolaan urusan kepegawaian.</b>	<b>Terciptanya organisasi dan tata laksana</b>							<b>Kepegawaian dan Umum</b>
a. Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan	Pelaksanaan pembayaran gaji, honorarium, dan tunjangan	Ketepatan waktu pelaksanaan pembayaran gaji, honorarium, dan tunjangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya seluruh kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran	1 laporan					
c. Evaluasi Jabatan	Tersedianya evaluasi laporan evaluasi jabatan	Tersedianya Ranking Jabatan		1 laporan	1 laporan			
d. Menyusun sistem kepegawaian	Tersedianya peraturan kepegawaian tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status pegawai</li> <li>• Hubungan kerja</li> <li>• Kompensasi pegawai</li> <li>• Pembinaan pegawai</li> </ul>	Ditetapkannya Peraturan Kepegawaian tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status pegawai</li> <li>• Hubungan kerja</li> <li>• Kompensasi pegawai</li> <li>• Pembinaan pegawai</li> <li>• Pola Karir</li> <li>• Data base pegawai</li> </ul>		1 laporan				
e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Terselenggaranya Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	20 org					
f. Penyusunan SOP		SOP dapat dilaksanakan	10 SOP					
<b>3. Penanganan masalah hukum, kehumasan dan sistem informasi</b>	<b>Tersedianya peraturan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Bapel-BPLS</b>							
a. Penyusunan pokok-pokok pikiran penanganan	Tersedianya kajian masalah hukum	Laporan kajian masalah hukum		1 laporan				

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
	masalah hukum							
	b. Pengelolaan web	Web BPLS yang menampilkan informasi yang terbaru	Laporan pengelolaan web	1 laporan				
	c. Penyuluhan dan penyebaran informasi	Terselenggaranya penyuluhan dan penyebaran informasi BPLS	Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi kepada publik	1 laporan				
<b>4.</b>	<b>Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Lembaga</b>	<b>Terwujudnya tata kelola keuangan dan barang yang akuntabel</b>						<b>Pengawasan Intern</b>
	a. Pemeriksaan Operasional dan Keuangan	Terlaksananya pengawasan operasional	Rendahnya persentase temuan aparat pengawas terhadap kepatuhan atas peraturan perundang-undangan sistem pengendalian intern.	6 laporan				

Lampiran 2.2.

**MATRIKS KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014  
BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO**

(dalam ribuan rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					TOTAL 2010 - 2014
	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>A. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO</b>						
<b>BIDANG OPERASI</b>	<b>184,674,987</b>	<b>163,193,590</b>	<b>159,643,590</b>	<b>159,000,000</b>	<b>158,700,000</b>	<b>825,212,167</b>
<b>1. Perencanaan operasi luapan lumpur</b>	<b>2,639,157</b>	<b>6,300,000</b>	<b>2,750,000</b>	<b>2,450,000</b>	<b>2,150,000</b>	<b>16,289,157</b>
a. Survey Geologi	1,144,291	1,000,000	800,000	800,000	800,000	
b. Pengukuran titik referensi dan Kali Porong	160,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
c. Review Perencanaan Penanggulangan semburan dan pengaliran luapan lumpur		300,000	250,000	150,000	150,000	
d. Pengadaan alat Lab	447,706	1,100,000	1,000,000	800,000	500,000	
e. Studi Geothermal		3,000,000				
f. Pemantauan bawah permukaan	887,160	700,000	500,000	500,000	500,000	
<b>2. Penanganan luapan lumpur</b>	<b>180,380,580</b>	<b>155,000,000</b>	<b>155,000,000</b>	<b>155,000,000</b>	<b>155,000,000</b>	<b>800,380,580</b>
a. Penanganan pengaliran luapan lumpur	180,380,580	155,000,000	155,000,000	155,000,000	155,000,000	
<b>3. Mitigasi dan penanganan bencana geologi dan monitoring lingkungan</b>	<b>1,655,250</b>	<b>1,893,590</b>	<b>1,893,590</b>	<b>1,550,000</b>	<b>1,550,000</b>	<b>8,542,430</b>
a. Pengadaan alat studio	73,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
b. Pemantauan dan penanganan mitigasi	1,582,250	1,843,590	1,843,590	1,500,000	1,500,000	
<b>BIDANG SOSIAL</b>	<b>249,970,206</b>	<b>606,043,130</b>	<b>820,493,852</b>	<b>1,127,180,676</b>	<b>1,372,996,765</b>	<b>4,176,684,629</b>
<b>4. Perencanaan dan pengelolaan pemulihan sosial</b>	<b>3,531,952</b>	<b>2,266,734</b>	<b>2,493,408</b>	<b>2,742,748</b>	<b>3,017,022</b>	<b>14,051,864</b>
a. Pendidikan dan pelatihan teknis/keterampilan.	2,648,949	1,345,768	1,480,345	1,628,379	1,791,217	
b. Penyuluhan dan penyebaran informasi (sosialisasi) dan musyawarah.	586,025	595,155	654,671	720,138	792,151	

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					TOTAL 2010 - 2014
	2010	2011	2012	2013	2014	
c. Observasi sosial, pemantauan dan pencatatan kondisi lingkungan	49,018	50,811	55,892	61,481	67,629	
d. Kajian pengembangan sosial dan ekonomi.	247,960	275,000	302,500	332,750	366,025	
e. Koordinasi penanganan masalah pendidikan dan kesehatan						
<b>5. Pengelolaan penanganan bantuan sosial</b>	<b>9,021,208</b>	<b>57,531,053</b>	<b>21,215,803</b>	<b>8,252,228</b>	<b>1,762,243</b>	<b>97,782,535</b>
a. Pemberian bantuan air bersih.	438,900	467,500	514,250	565,675	622,243	
b. Pengadaan dapur umum bagi warga di 18 desa yang terdampak bencana.	520,893	750,000	750,000	750,000	750,000	
c. Pengadaan PPPK dan bantuan obat-obatan	385,280	350,000	350,000	350,000	350,000	
d. Bantuan pemakaman.	75,280	40,000	40,000	40,000	40,000	
e. Bantuan sosial yang berupa bantuan kontrak rumah untuk:						
1) 1.666 KK warga di 3 desa (Besuki, Kedungcangkring, Pejarakan)	5,370,855	4,165,000	4,165,000	4,165,000		
2) 900 KK warga di 9 RT (Kelurahan Jatirejo, Siring, dan Mindi)	2,230,000	2,381,553	2,381,553	2,381,553		
3) Program contingency warga di luar peta area terdampak		49,377,000	13,015,000			
<b>6. Peningkatan dan pengelolaan perlindungan sosial</b>	<b>237,417,046</b>	<b>546,245,343</b>	<b>796,784,641</b>	<b>1,116,185,700</b>	<b>1,368,217,500</b>	<b>4,064,850,230</b>
a. Pembayaran jual beli tanah dan bangunan di 3 desa	237,417,046	51,735,887	51,735,887			
b. Fasilitasi pelaksanaan jual beli tanah dan bangunan yang dilaksanakan oleh PT Minarak Lapindo Jaya		325,776	358,354			
c. Program contingency untuk pembebasan tanah dan bangunan di desa-desa yang sudah tidak lagi layak huni di luar Peta Area Terdampak		494,183,680	744,690,400	1,116,185,700	1,368,217,500	
<b>BIDANG INFRASTRUKTUR</b>	<b>764,307,567</b>	<b>498,500,000</b>	<b>457,789,946</b>	<b>211,000,000</b>	<b>186,500,000</b>	<b>2,118,097,513</b>
<b>7. Perencanaan pembangunan infrastruktur</b>	<b>9,496,745</b>	<b>7,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>26,996,745</b>

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					TOTAL 2010 - 2014
	2010	2011	2012	2013	2014	
a. Disain dan Supervisi Pembangunan Jalan Arteri dan pipa PDAM KMS						
1) Lanjutan supervisi pembangunan jalan arteri	2,000,000			1,000,000	1,000,000	
2) Supervisi pembangunan simpang susun Kesambi		1,000,000				
3) Supervisi pembangunan pipa PDAM KMS			1,000,000			
4) Disain relokasi jalan arteri dan PDAM (tambahan) akibat deformasi		1,000,000				
5) Supervisi pembangunan jalan arteri, PDAM (tambahan)			1,000,000			
b. Disain dan Supervisi Pembangunan Infrastruktur Luapan Lumpur						
1) Supervisi pembangunan infrastruktur luapan lumpur	4,000,000	3,000,000	2,500,000	2,500,000	1,000,000	
2) Studi dan detail disain Penanggulangan Lumpur Sidoarjo berbasis keberlanjutan	3,000,000	2,000,000				
3) Studi dan detail disain penataan dan pengembangan muara Kali Porong	496,745	500,000				
<b>8. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur</b>	<b>407,952,422</b>	<b>341,000,000</b>	<b>378,289,946</b>	<b>130,500,000</b>	<b>94,500,000</b>	<b>1,352,242,368</b>
a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur	332,352,422	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
b. Penataan dan pengembangan wilayah berdekatan PAT						
1) Perbaikan jalan, drainase dan penataan lingkungan sekitar jalan arteri Porong dan jalan alternatif	63,600,000		43,000,000		43,000,000	
3) Pembangunan kawasan riset	5,000,000	15,000,000				
4) Perbaikan pipa PDAM tipe exposed	6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
c. Revitalisasi Kali Ketapang						
1) Pembebasan Tanah		77,500,000				
2) Normalisasi Kali Ketapang		100,000,000	141,789,946			

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					TOTAL 2010 - 2014
	2010	2011	2012	2013	2014	
3) Pembuatan jalan inspeksi Kali Ketapang		8,000,000	8,000,000	4,000,000		
4) Perbaikan dam Penatarsewu (rubber dam)			75,000,000	75,000,000		
5) Normalisasi Kali Jatianom, Kali Datar dan Kali Buyuk		55,000,000				
d. Penataan dan pengembangan muara Kali Porong						
1) Penataan kawasan reklamasi	1,000,000	2,000,000	1,000,000			
2) Pembuatan dermaga beserta fasilitasnya		2,000,000	3,000,000			
3) Perbaikan/peningkatan jalan Porong ke muara		30,000,000	55,000,000			
<b>9. Pembangunan relokasi infrastruktur</b>	<b>346,858,400</b>	<b>150,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	<b>77,000,000</b>	<b>90,000,000</b>	<b>738,858,400</b>
a. Melanjutkan pengadaan tanah	147,799,607			27,000,000		
b. Pembangunan relokasi jalan arteri	199,058,793					
c. Pembangunan simpang susun Kesambi		150,000,000				
d. Pembangunan relokasi pipa PDAM			75,000,000			
e. Pelapisan aspal beton jalan arteri				30,000,000		
f. Pembuatan landscaping di kiri – kanan jalan Relokasi Arteri Porong				20,000,000		
g. Pembangunan relokasi ruas di desa Pamotan					90,000,000	
<b>TOTAL PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO</b>	<b>1,198,952,760</b>	<b>1,267,736,720</b>	<b>1,437,927,388</b>	<b>1,497,180,676</b>	<b>1,718,196,765</b>	<b>7,119,994,309</b>
<b>B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO</b>						
<b>1. Peningkatan dan pengelolaan perencanaan, program dan anggaran</b>	<b>78,130</b>	<b>90,000</b>	<b>290,000</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>638,130</b>
a. Penyusunan Renstra			200,000			
b. Penyusunan LAKIP	78,130	90,000	90,000	90,000	90,000	

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI					TOTAL 2010 - 2014
	2010	2011	2012	2013	2014	
<b>2. Peningkatan dan pengelolaan urusan kepegawaian.</b>	<b>16,729,750</b>	<b>17,930,000</b>	<b>17,930,000</b>	<b>18,280,000</b>	<b>18,306,911</b>	<b>89,176,661</b>
a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan	12,444,755	12,500,000	12,500,000	13,000,000	13,000,000	
b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	4,016,385	5,000,000	5,100,000	5,100,000	5,126,911	
c. Evaluasi Jabatan		150,000	150,000			
d. Menyusun sistem kepegawaian		100,000				
e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	75,260	100,000	100,000	100,000	100,000	
f. Penyusunan SOP	193,350	80,000	80,000	80,000	80,000	
<b>3. Penanganan masalah hukum, kehumasan dan sistem informasi</b>	<b>330,000</b>	<b>240,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>870,000</b>
a. Penyusunan pokok-pokok pikiran penanganan masalah hukum		140,000				
b. Pengelolaan WEB	135,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
c. Penyuluhan dan penyebaran informasi	195,000					
<b>4. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Lembaga</b>	<b>-</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>160,000</b>
a. Pemeriksaan Operasional dan Keuangan		40,000	40,000	40,000	40,000	
<b>TOTAL PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO</b>	<b>17,137,880</b>	<b>18,300,000</b>	<b>18,360,000</b>	<b>18,510,000</b>	<b>18,536,911</b>	<b>90,844,791</b>
<b>TOTAL PROGRAM BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO</b>	<b>1,216,090,640</b>	<b>1,286,036,720</b>	<b>1,456,287,388</b>	<b>1,515,690,676</b>	<b>1,736,733,676</b>	<b>7,210,839,100</b>